



Perencanaan
Pembangunan

EKONOMI



Fatimatuazzahro, S.H.I., M.S.E.I. | Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Penulis:

Fatimatuzzahro, S.H.I., M.S.E.I.

Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.



GEMILANG PRESS INDONESIA

PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Penulis:

Fatimatuzzahro, S.H.I., M.S.E.I.

Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.

ISBN: 978-634-96135-2-1

Editor: Tita Yunia Zalni, S.Pd., M.Pd.

Penyunting: Madina Chairunnisa, S.Pd.

Desain Sampul dan Tata Letak: Neza Sartika

Diterbitkan oleh: GEMILANG PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 062/SBA/2024

Talago permai No. 25 RT. 002 RW 004, Ampang Kuranji, Kota
Padang

Website: www.gemilangpress.com

Email: cvgpi.office@gmail.com

Cetakan pertama, Juli 2025

© Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul *Perencanaan Pembangunan Ekonomi* ini dapat terselesaikan dan hadir di tangan pembaca. Buku ini merupakan hasil dari komitmen kami untuk menghadirkan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, pendekatan, dan teknik dalam perencanaan pembangunan ekonomi yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks, kami melihat pentingnya menyediakan sumber literatur yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif. Buku ini disusun berdasarkan kajian literatur yang luas serta ditopang oleh analisis kritis terhadap berbagai dokumen perencanaan nasional dan praktik internasional. Dengan struktur yang sistematis dan pendekatan multidisipliner, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, birokrat, serta para pelaku pembangunan lainnya.

Kami menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami membuka diri terhadap segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan pada edisi berikutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan bantuan selama proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas serta menjadi bagian dari upaya kolektif dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang adil, tangguh, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Jember, Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 KONSEP DASAR PEMBANGUNAN EKONOMI	7
A. Definisi dan Tujuan Pembangunan Ekonomi.....	7
B. Indikator dan Ukuran Pembangunan.....	13
C. Teori-Teori Pembangunan Ekonomi	19
D. Keterkaitan antara Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi.....	29
BAB 3 PERENCANAAN EKONOMI: DEFINISI, TUJUAN DAN FUNGSI	33
A. Pengertian Perencanaan Ekonomi.....	35
B. Tujuan dan Fungsi Perencanaan Ekonomi.....	37
C. Jenis dan Model Perencanaan Ekonomi.....	42
D. Sejarah dan Evolusi Perencanaan Ekonomi	49
BAB 4 TEKNIK DAN INSTRUMEN PERENCANAAN	61
A. Teknik Peramalan (<i>Forecasting</i>)	62
B. Analisis <i>Input-Output</i>	63
C. Analisis Biaya-Manfaat (<i>Cost-Benefit Analysis</i> , CBA)	66
D. Pemrograman Linier dan Optimasi	69

E.	Model Makroekonomi dalam Perencanaan	72
BAB 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL		
		75
A.	Strategi dan Kebijakan Pembangunan Nasional	75
B.	Lembaga dan Proses Penyusunan Rencana Pembangunan	79
C.	Studi Kasus: Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJP & RPJM).....	84
BAB 6 PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH		
		91
A.	Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Daerah	92
B.	Peran Pemerintah Daerah dan Otonomi	96
C.	Potensi Lokal dan Penguatan Ekonomi Wilayah	101
D.	Studi Kasus: Perencanaan Daerah Tertinggal dan Perdesaan	107
BAB 7 PERENCANAAN BERBASIS PARTISIPASI DAN INKLUSI		
		117
A.	Pendekatan <i>Bottom-Up</i> dan <i>Top-Down</i>	117
B.	Peran Masyarakat Sipil dan Sektor Swasta	119
C.	Perencanaan Responsif Gender dan Inklusif Sosial	120
BAB 8 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN		
		123
A.	Sumber Pembiayaan: APBN/APBD, Investasi, dan Pinjaman	124
B.	Peran Lembaga Keuangan Nasional dan Internasional	127
C.	Strategi Pembiayaan yang Berkelanjutan	130

BAB 9 EVALUASI DAN MONITORING	
PEMBANGUNAN	135
A. Tujuan dan Indikator Evaluasi	136
B. Sistem Monitoring dan Evaluasi (MONEV)	138
C. Studi Kasus: Evaluasi Program Nasional	140
BAB 10 TANTANGAN DAN ARAH MASA DEPAN	
PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
EKONOMI	143
A. Globalisasi dan Disrupsi Teknologi	143
B. Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan ...	144
C. Perencanaan Adaptif di Era Krisis dan Pandemi.....	146
D. Rekomendasi Strategis untuk Pembangunan Masa Depan	147
DAFTAR PUSTAKA	153
BIODATA PENULIS.....	157

BAB 1

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan ekonomi merupakan proses strategis yang tidak hanya memetakan tujuan jangka panjang suatu negara, tetapi juga merumuskan cara-cara sistematis untuk mencapainya secara berkelanjutan. Di tengah dinamika global yang ditandai oleh ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, perkembangan teknologi digital, dan gejolak geopolitik, kebutuhan akan suatu sistem perencanaan yang adaptif, *evidence-based*, dan partisipatif menjadi semakin mendesak (Todaro & Smith, 2020).

Dalam konteks pembangunan, ketidakseimbangan spasial, kesenjangan pendapatan, dan keterbatasan sumber daya menuntut upaya pengelolaan dan alokasi yang tepat sasaran. Pembangunan tidak bisa diserahkan semata pada mekanisme pasar; dibutuhkan intervensi negara yang terencana dan terukur agar transformasi struktural dapat berlangsung secara adil dan inklusif.

Indonesia, dengan keanekaragaman geografis, sosial, dan budaya, menghadapi tantangan perencanaan yang sangat khas. Ketimpangan antar wilayah, urbanisasi yang tidak terkendali, dan kerentanan terhadap krisis global mempertegas urgensi perencanaan pembangunan ekonomi yang menyeluruh. Lebih dari sekadar agenda teknokratik, perencanaan perlu menjadi instrumen perubahan sosial yang berpihak pada rakyat, menjembatani kepentingan pusat dan daerah, serta menyelaraskan antara pertumbuhan dan pemerataan.

Maka, memahami prinsip, pendekatan, dan teknik perencanaan ekonomi bukan hanya menjadi kepentingan akademik, tetapi juga kebutuhan praksis bagi siapa pun yang terlibat dalam pembangunan bangsa. Dalam kerangka inilah buku ini disusun, sebagai kontribusi ilmiah untuk memperkuat kapasitas analitis dan strategis dalam merancang masa depan ekonomi yang lebih berkeadilan.

Tujuan utama perencanaan pembangunan ekonomi adalah memberikan arah strategis serta kerangka kebijakan yang sistematis untuk mengelola sumber daya nasional secara optimal, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan berfungsi sebagai instrumen rasional dan terukur yang mampu:

1. Mengorganisasi dan menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan analisis kebutuhan nyata masyarakat, sehingga setiap kebijakan dan program dapat tepat sasaran dan berdampak signifikan;
2. Mengarahkan investasi publik secara efisien ke sektor-sektor produktif yang memiliki potensi penggerak pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja;
3. Mendorong transformasi struktural ekonomi, beralih dari ketergantungan pada sektor tradisional menuju sektor berbasis pengetahuan, teknologi, dan nilai tambah tinggi yang menjadi motor inovasi dan daya saing nasional;
4. Menjaga keseimbangan fundamental antara stabilitas makroekonomi yang kokoh dan keadilan sosial yang merata, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas secara sosial.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan tidak hanya menjadi panduan teknokratis, melainkan juga wujud komitmen pemerintah untuk membangun masa depan yang lebih adil, tangguh dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pentingnya perencanaan pembangunan semakin mengemuka seiring dengan kompleksitas tata kelola pembangunan di era kontemporer. Dalam konteks desentralisasi yang memberi ruang lebih besar bagi pemerintahan daerah, perencanaan tidak lagi menjadi monopoli pemerintah pusat semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan aktor-aktor multi-sektor, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal.

Perencanaan berperan sebagai jembatan strategis yang menghubungkan visi besar pembangunan nasional seperti tercermin dalam Visi Indonesia Emas 2045 dengan kebutuhan nyata dan dinamika sosial-ekonomi di tingkat akar rumput. Dengan demikian, perencanaan yang inklusif dan partisipatif menjadi kunci untuk menjamin bahwa arah pembangunan nasional dapat terwujud secara efektif, adil, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat legitimasi dan kepemilikan masyarakat terhadap proses pembangunan itu sendiri.

Lebih jauh lagi, perencanaan ekonomi modern perlu berfungsi sebagai platform deliberatif yang mengakomodasi keberagaman aktor pembangunan mulai dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil. Melalui mekanisme dialog antar sektor yang terbuka dan inklusif, perencanaan ini mampu merumuskan kebijakan berbasis konsensus dan bukti empiris (*evidence-based planning*). Dengan pendekatan tersebut, perencanaan tidak lagi sekadar menjadi alat teknis administratif, melainkan juga menjadi

instrumen demokrasi ekonomi yang memperkuat partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembangunan nasional.

Buku ini menyajikan kajian komprehensif mengenai aspek-aspek fundamental dalam perencanaan pembangunan ekonomi, yang meliputi dimensi konseptual, pendekatan metodologis, serta instrumen teknis yang esensial. Dengan cakupan yang luas, buku ini membahas evolusi pemikiran dan praktik perencanaan ekonomi, mulai dari model sentralistik klasik hingga paradigma partisipatif yang mengedepankan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, buku ini menguraikan klasifikasi dan tujuan beragam model perencanaan, seperti *indicative planning*, *directive planning*, dan *strategic planning*, yang menjadi landasan bagi pengambilan keputusan pembangunan. Di ranah teknis, pembaca akan dipandu memahami berbagai instrumen analitis penting, antara lain peramalan (*forecasting*), analisis *input-output*, analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*), pemrograman linier, serta pemodelan makroekonomi. Melalui pendekatan yang sistematis dan aplikatif, buku ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi utama bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merancang perencanaan pembangunan yang efektif, responsif, dan berkelanjutan.

Pendekatan dalam buku ini bersifat integratif dan multidisipliner, menggabungkan berbagai perspektif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perencanaan pembangunan ekonomi. Pendekatan teoritis-ekonomis digunakan untuk menggali landasan logis serta asumsi fundamental yang mendasari kebijakan perencanaan, sehingga pembaca mampu memahami rationale di balik setiap keputusan strategis. Sementara itu, pendekatan teknokratik menekankan penguasaan metode dan alat bantu kuantitatif yang esensial dalam proses perencanaan, mulai dari

peramalan hingga analisis ekonomi yang kompleks. Buku ini juga mengadopsi pendekatan empiris dengan merujuk pada studi kasus pembangunan baik di Indonesia maupun negara-negara lain, sehingga memperkaya wawasan melalui praktik nyata dan pembelajaran kontekstual. Tidak kalah penting, pendekatan normatif menjadi pijakan untuk menimbang aspek-aspek keadilan, keberlanjutan, serta etika dalam pembangunan, memastikan bahwa perencanaan tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam.

Melalui pendekatan multidisipliner ini, diharapkan pembaca tidak hanya memahami bagaimana merencanakan pembangunan secara teknis dan sistematis, tetapi juga mengerti mengapa rencana tersebut dibuat serta untuk siapa manfaatnya ditujukan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dapat dijalankan secara holistik, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Metodologi penulisan buku ini mengandalkan kajian literatur yang komprehensif serta sintesis konseptual dari berbagai sumber otoritatif di bidang ekonomi pembangunan dan kebijakan publik. Sumber-sumber yang digunakan meliputi:

1. Buku-buku klasik dan kontemporer yang menjadi rujukan utama, seperti karya Todaro & Smith serta Lin & Monga, yang membahas teori dan praktik pembangunan ekonomi secara mendalam.
2. Jurnal akademik nasional dan internasional yang relevan, untuk mengakomodasi perkembangan terbaru dalam riset dan diskursus akademik.
3. Dokumen resmi perencanaan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L), yang menjadi kerangka acuan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia.

4. Laporan dan publikasi dari lembaga internasional terkemuka seperti World Bank, IMF, UNDP, dan OECD, yang menyediakan data empiris, analisis kebijakan, serta panduan praktik terbaik global.

Pendekatan metodologis ini bertujuan memastikan bahwa buku ini tidak hanya berbasis teori, tetapi juga kontekstual dan aplikatif bagi pembaca yang ingin memahami dan mengimplementasikan perencanaan pembangunan secara efektif dan berkelanjutan.

Penyusunan buku ini dilakukan secara sistematis dengan struktur yang progresif, dimulai dari konsep dasar hingga aplikasi teknik serta studi kasus. Hal ini dirancang agar pembaca baik akademisi, mahasiswa, birokrat, maupun praktisi pembangunan dapat mengikuti alur pemikiran secara utuh dan aplikatif.

Selain itu, buku ini berupaya menyeimbangkan kedalaman teoritis dengan relevansi praktis, sehingga tidak hanya menjadi sumber pembelajaran yang komprehensif, tetapi juga referensi kebijakan yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dan pelaku pembangunan di lapangan.

BAB 2

KONSEP DASAR PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan ekonomi bukan sekadar soal pertumbuhan angka-angka statistik, melainkan tentang perubahan mendasar dalam kualitas hidup manusia. Di tengah tantangan ketimpangan, krisis lingkungan, dan transformasi teknologi, pemahaman yang kuat terhadap konsep pembangunan menjadi semakin penting. Bab ini akan mengulas landasan konseptual dari pembangunan ekonomi mulai dari definisi, tujuan, hingga indikator utama sebagai fondasi dalam merancang strategi yang tidak hanya menumbuhkan perekonomian, tetapi juga memastikan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat.

A. Definisi dan Tujuan Pembangunan Ekonomi

Definisi Pembangunan ekonomi tidak dapat disederhanakan hanya sebagai peningkatan angka-angka makroekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan nasional semata. Sebaliknya, pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses transformasi yang kompleks, multidimensional, dan berkelanjutan. Proses ini mencakup perubahan struktural yang mendalam dalam berbagai aspek sistem ekonomi, tatanan sosial, serta kelembagaan nasional, yang secara sinergis diarahkan untuk membangun masyarakat yang tidak hanya lebih makmur, tetapi juga inklusif,

berkeadilan, serta memiliki ketahanan yang kuat dalam menghadapi tantangan dan dinamika global yang terus berkembang. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya produksi barang dan jasa suatu negara, melainkan juga dari sejauh mana manfaat pembangunan tersebut dapat terdistribusi secara adil dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga mendorong peningkatan kualitas hidup yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Todaro dan Smith (2020), pembangunan ekonomi adalah *“a multidimensional process involving major changes in social structures, popular attitudes, and national institutions, as well as the acceleration of economic growth, the reduction of inequality, and the eradication of absolute poverty.”* Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembangunan sejati tidak hanya menuntut percepatan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga memerlukan transformasi sosial yang mendalam guna menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, pembangunan harus dipahami sebagai upaya holistik yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, politik, dan budaya secara terpadu, agar hasilnya dapat memberikan manfaat yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan ekonomi yang ideal harus mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dan pemerataan hasil-hasil pembangunan (*equity*). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun bersifat eksklusif justru berpotensi memperlebar jurang ketimpangan sosial-ekonomi, sementara pemerataan tanpa diiringi peningkatan produktivitas hanya akan menyebabkan stagnasi dan keterbatasan kemajuan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang menempatkan manusia

sebagai subjek utama (*people-centered development*), bukan sekadar objek statistik atau indikator makroekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pembangunan manusia (*human development*) yang diperkenalkan oleh UNDP dan diperluas oleh Amartya Sen (1999), di mana pembangunan dipahami sebagai proses memperluas kebebasan substantif yang dinikmati oleh individu dalam memilih dan menjalani kehidupan yang mereka anggap bermakna dan bernilai.

Dengan demikian, pembangunan ekonomi modern tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai proses pertumbuhan ekonomi yang bersifat linear dan kuantitatif. Sebaliknya, keberhasilan pembangunan kini sangat ditentukan oleh kemampuan suatu negara dalam menciptakan tatanan sosial-ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Tatanan ini harus mampu merespons secara efektif berbagai tantangan kompleks seperti ketimpangan yang melebar, kemiskinan yang berkepanjangan, degradasi lingkungan yang semakin parah, serta marginalisasi kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan modern menuntut sinergi kebijakan yang tidak hanya fokus pada peningkatan output ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas hidup dan keadilan sosial secara menyeluruh.

Tujuan utama pembangunan ekonomi mencerminkan pendekatan kesejahteraan yang bersifat komprehensif dan multidimensional. Tidak cukup hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan modern harus mengintegrasikan aspek-aspek sosial, kultural, dan kelembagaan dalam kerangka pembangunan manusia seutuhnya. *Tujuan pertama* adalah meningkatkan pendapatan per kapita secara berkelanjutan, yang secara konvensional dijadikan indikator makro dari kemajuan ekonomi. Namun, penting ditekankan bahwa peningkatan pendapatan harus

diiringi dengan keberlanjutan ekologis dan sosial agar manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

Kedua, pembangunan ekonomi ditujukan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial ekonomi tiga masalah struktural yang sering kali menjadi akar ketidakadilan dalam sistem sosial. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kesempatan tidak hanya menciptakan kesenjangan sosial, tetapi juga melemahkan stabilitas sosial-politik dan menghambat pertumbuhan yang inklusif. Oleh karena itu, pembangunan yang berkeadilan tidak hanya mengukur seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi juga seberapa banyak masyarakat yang turut serta dalam pertumbuhan tersebut dan memperoleh manfaat darinya (Stiglitz, Sen, & Fitoussi, 2009).

Ketiga, pembangunan ekonomi harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Ini mencakup akses universal terhadap pendidikan yang bermutu, layanan kesehatan yang adil dan terjangkau, serta infrastruktur dan pelayanan publik yang mendukung martabat dan produktivitas manusia. Dalam *Human Development Report* terbaru, UNDP (2023) menegaskan pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia yang tidak hanya mengembangkan kapasitas ekonomi, tetapi juga memperluas pilihan-pilihan hidup yang bermakna bagi setiap individu.

Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak bisa lagi dipahami secara sempit sebagai proyek pertumbuhan angka, melainkan sebagai proses sosial-ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan humanistik. Pembangunan harus menyasar transformasi struktur dan nilai yang membebaskan manusia dari berbagai bentuk kemiskinan, penindasan, dan ketidaksetaraan.

Lebih jauh dari sekadar pertumbuhan ekonomi dan perbaikan indikator material, pembangunan sejati harus mencakup dimensi non-material yang bersifat normatif, etik, dan humanistik. Pembangunan bukan hanya proyek ekonomi, melainkan juga sebuah gerakan moral yang menuntut pengakuan atas hak asasi manusia, partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik, serta keberpihakan terhadap keadilan sosial dan kelompok rentan. Dalam paradigma ini, pembangunan dipahami sebagai proses pemberdayaan yang memungkinkan individu dan komunitas menjadi subjek dalam menentukan arah hidup mereka sendiri, bukan semata objek dari kebijakan negara atau sistem pasar.

Amartya Sen (1999), dalam karya monumental nya *Development as Freedom*, secara tegas menyatakan bahwa pembangunan adalah proses ekspansi atas kebebasan substantif manusia. Ia menolak pendekatan pembangunan yang semata-mata terfokus pada akumulasi kekayaan atau pertumbuhan output ekonomi. Menurut nya, tujuan akhir pembangunan adalah memperluas kapabilitas manusia yaitu kemampuan nyata seseorang untuk memilih dan menjalani kehidupan yang mereka anggap bernilai. Dalam pandangan ini, indikator seperti pendapatan, pendidikan, atau kesehatan penting bukan karena nilainya secara intrinsik, tetapi karena mereka menjadi sarana untuk memperluas kebebasan individu dalam mengaktualisasikan potensi dirinya.

Dengan kata lain, pembangunan bukan sekadar proses untuk "memiliki lebih banyak" (*to have more*), melainkan juga tentang "menjadi lebih bebas" (*to be more*). Bebas dari kemiskinan, kelaparan, keterbelakangan, diskriminasi, dan kekerasan struktural. Kebebasan ini mencakup kebebasan politik, kesempatan ekonomi, jaminan sosial, transparansi institusional, serta perlindungan terhadap ketidakadilan. Maka, ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya

pada pertumbuhan ekonomi yang impresif, melainkan pada seberapa besar pembangunan itu menghormati martabat manusia dan memperluas ruang partisipasi serta kebebasan substantif setiap warga negara.

Pembangunan yang mengabaikan dimensi etik dan kemanusiaan pada akhirnya akan menciptakan kesenjangan sosial, alienasi, dan disintegrasi sosial. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan pembangunan demokrasi, penguatan institusi yang akuntabel, dan penghargaan terhadap keragaman serta hak-hak sipil.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif merupakan respons strategis terhadap tantangan global yang semakin kompleks dan multidimensi. Dalam era modern yang ditandai oleh ketimpangan sosial, krisis lingkungan, dan disrupsi teknologi, ukuran keberhasilan pembangunan tidak lagi cukup dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) semata, tetapi harus ditakar dari kemampuannya menciptakan keadilan sosial, memperluas akses dan kesempatan, serta memberdayakan seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh.

Prinsip *leaving no one behind*, sebagaimana digariskan dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menekankan bahwa pembangunan harus inklusif dan merata, menjangkau kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok miskin di daerah tertinggal. SDGs tidak hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi (Goal 8), tetapi juga pengurangan kesenjangan (Goal 10), pendidikan berkualitas (Goal 4), kesetaraan gender (Goal 5), dan pembangunan institusi yang adil dan transparan (Goal 16) (UN, 2015).

Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari dimensi sosial, ekologis, dan etis. Sebuah pembangunan dinyatakan berhasil bukan ketika segelintir orang menjadi sangat kaya, melainkan ketika setiap individu memiliki akses terhadap kesempatan hidup yang layak, terlindungi dari kerentanan, serta dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Inilah esensi pembangunan yang berkelanjutan: menghasilkan kemajuan ekonomi tanpa mengorbankan generasi mendatang dan tanpa meninggalkan siapapun di belakang.

B. Indikator dan Ukuran Pembangunan

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan sebuah proses yang kompleks dan multidimensional, yang melibatkan perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tidak tepat jika pembangunan hanya disederhanakan sebagai peningkatan angka-angka makroekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB) semata. Meskipun pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi suatu negara, hal ini belum tentu mencerminkan perbaikan nyata dalam kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, sebuah negara bisa saja mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun jika pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kecil kelompok masyarakat, maka ketimpangan sosial dan kemiskinan masih akan tetap menjadi persoalan utama.

Oleh karena itu, pengukuran pembangunan yang bermakna harus menggunakan indikator yang lebih komprehensif dan mampu menangkap berbagai dimensi kehidupan manusia secara utuh. Indikator tersebut tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, serta aspek lingkungan hidup yang berkaitan dengan keberlanjutan

sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim. Contohnya, Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index/ HDI*) yang dikembangkan oleh PBB tidak hanya mengukur pendapatan per kapita, tetapi juga memperhitungkan harapan hidup dan tingkat pendidikan, sehingga memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai kesejahteraan masyarakat.

Dengan pendekatan multidimensional ini, pembangunan ekonomi dapat diarahkan tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan angka semata, tetapi juga untuk menciptakan tatanan sosial-ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Pembangunan seperti ini akan memastikan bahwa manfaatnya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi yang akan datang. Dengan demikian, pembangunan ekonomi menjadi sebuah proses transformasi yang tidak hanya menguatkan kapasitas produksi nasional, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup manusia dalam arti seluas-luasnya.

Dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, sebagaimana diamanatkan dalam dokumen penting *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (United Nations, 2015), pengukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dengan indikator kuantitatif semata. Pendekatan evaluasi harus melibatkan aspek kualitatif yang mampu menangkap dimensi sosial, ekonomi, dan ekologis secara menyeluruh. Pendekatan ini esensial untuk memastikan bahwa proses pembangunan tidak hanya meningkatkan angka-angka statistik, tetapi juga benar-benar menciptakan keadilan sosial, memperluas inklusi ekonomi, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan demikian, pembangunan dapat memberikan manfaat

yang adil dan berkesinambungan, baik untuk generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.

Indikator-indikator tersebut mencerminkan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan yang komprehensif dan menyeluruh tidak hanya sekadar mengukur akumulasi kekayaan atau aset suatu bangsa, tetapi juga bagaimana kekayaan tersebut terdistribusi secara adil, siapa saja yang benar-benar memperoleh manfaatnya, serta bagaimana dampaknya terhadap kualitas hidup manusia dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan yang sejati harus mampu melampaui fokus pada pertumbuhan ekonomi yang hanya “berkembang ke atas” (*top-line growth*), dengan sekaligus menanamkan keadilan yang “berakar ke bawah” (*bottom-line justice*), serta menjunjung prinsip keberlanjutan dan orientasi jangka panjang yang inklusif.

1. Indikator dan Ukuran Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi tidak dapat direduksi hanya pada angka pertumbuhan ekonomi semata, karena pada hakikatnya pembangunan merupakan proses transformasi menyeluruh yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengukuran pembangunan harus menggunakan pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan indikator-indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan secara komprehensif, guna mencerminkan kemajuan yang sesungguhnya dan berkelanjutan.

Berikut ini beberapa indikator penting yang umum digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan:

a. Produk Domestik Bruto (PDB) per Kapita

Sebagai salah satu indikator klasik, PDB per kapita mengukur tingkat kemakmuran ekonomi dengan membagi total nilai output nasional terhadap jumlah penduduk, sehingga memberikan gambaran rata-rata pendapatan per individu.

Meski demikian, indikator ini memiliki keterbatasan karena tidak mampu mencerminkan aspek distribusi pendapatan, ketimpangan sosial, maupun kualitas hidup yang sesungguhnya dialami masyarakat (World Bank, 2023). Oleh karena itu, dalam praktiknya, PDB per kapita sering dikombinasikan dengan indikator lain yang lebih komprehensif untuk mendapatkan gambaran pembangunan yang lebih menyeluruh dan bermakna.

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM/*Human Development Index* – HDI)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), atau *Human Development Index* (HDI), yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), merupakan indikator penting yang menawarkan pendekatan alternatif dalam mengukur pembangunan. Berbeda dengan fokus tradisional pada output ekonomi semata, HDI menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dengan menilai tiga dimensi fundamental pembangunan manusia, yakni: umur panjang dan sehat yang diukur melalui harapan hidup saat lahir; pendidikan yang diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah; serta standar hidup layak yang diwakili oleh PDB per kapita dalam nilai *Purchasing Power Parity* (PPP). Pendekatan ini dipandang lebih transformatif dan manusiawi karena menilai keberhasilan pembangunan bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kapasitas individu dan peluang untuk menjalani kehidupan yang bermartabat dan produktif (UNDP, 2023).

c. Koefisien Gini

Koefisien Gini merupakan indikator yang digunakan secara luas untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat. Nilainya berkisar antara 0, yang mencerminkan kesetaraan sempurna di mana semua

individu menerima pendapatan yang sama, hingga 1, yang menandakan ketimpangan absolut di mana seluruh pendapatan hanya dikuasai oleh satu individu saja. Tingginya nilai koefisien Gini sering kali menjadi sinyal adanya masalah struktural dalam perekonomian, seperti ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan kerja yang adil. Ketimpangan pendapatan yang tinggi tidak hanya menghambat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan mengancam stabilitas pembangunan jangka panjang (World Inequality Report, 2022).

d. Indeks Kemiskinan Multidimensi (*Multidimensional Poverty Index – MPI*)

Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI) dikembangkan sebagai respons atas keterbatasan pengukuran kemiskinan yang hanya berbasis pendapatan. Kemiskinan sesungguhnya merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai aspek kehidupan, bukan sekadar kekurangan finansial. MPI mengukur tingkat kemiskinan dengan memperhatikan tiga dimensi utama: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Indeks ini menilai apakah sebuah rumah tangga mengalami deprivasi akses terhadap layanan dasar seperti listrik, air bersih, sanitasi, bahan bakar bersih untuk memasak, serta kondisi perumahan yang layak huni (Alkire & Santos, 2014). Dengan demikian, MPI menawarkan kerangka kerja yang lebih holistik dan terperinci dalam mengidentifikasi kelompok yang paling rentan, sehingga mendukung perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

e. Indeks Ketahanan Pangan dan Akses terhadap Layanan Dasar

Indeks Ketahanan Pangan dan Akses terhadap Layanan Dasar merupakan indikator penting yang merefleksikan kemampuan suatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, bergizi, dan stabil secara berkelanjutan. Indeks ini tidak hanya mengukur ketersediaan pangan, tetapi juga aksesibilitas masyarakat terhadap makanan yang sehat serta konsistensi pasokan pangan dalam jangka panjang. Selain itu, indeks ini juga mencakup dimensi kritis lain seperti akses terhadap layanan kesehatan, air bersih, dan infrastruktur dasar yang menjadi fondasi bagi kualitas hidup yang layak. Menurut FAO (2022), ketahanan pangan yang berkelanjutan merupakan prasyarat utama bagi stabilitas sosial dan kesehatan masyarakat, sekaligus menjadi basis fundamental bagi keberhasilan pembangunan jangka panjang yang inklusif dan resilien.

Penggunaan indikator-indikator pembangunan secara terpadu mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan ekonomi yang sempit menuju pendekatan pembangunan yang lebih komprehensif, berorientasi pada manusia dan keberlanjutan. Paradigma ini menekankan bahwa pembangunan sejati tidak cukup diukur dari capaian angka pertumbuhan ekonomi semata, melainkan harus mencerminkan peningkatan kualitas hidup yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks global, pendekatan multidimensi terhadap pengukuran pembangunan menjadi semakin relevan, terutama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan mampu mengatasi ketimpangan struktural, menjamin keadilan sosial, melindungi integritas lingkungan, dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat *Leaving No One Behind* yang menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), yang mengedepankan inklusivitas sebagai fondasi utama bagi masa depan yang adil dan berkelanjutan bagi semua.

C. Teori-Teori Pembangunan Ekonomi

Perkembangan teori pembangunan ekonomi merefleksikan dinamika perubahan paradigma global mengenai pendekatan terbaik untuk mencapai kesejahteraan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Teori-teori ini tidak hanya berfokus pada mekanisme dan proses pertumbuhan ekonomi, tetapi juga secara progresif mengintegrasikan dimensi sosial, politik, dan ekologis yang mempengaruhi hasil-hasil pembangunan. Evolusi teori pembangunan menunjukkan bahwa pembangunan bukanlah proses linier yang dapat diseragamkan, melainkan suatu fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh konteks historis, institusional, serta hubungan kekuasaan global. Dengan demikian, studi terhadap teori-teori pembangunan ekonomi menjadi penting tidak hanya untuk memahami bagaimana pertumbuhan dicapai, tetapi juga untuk menilai siapa yang memperoleh manfaat dari pembangunan tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Dari pendekatan klasik hingga pendekatan yang lebih transformatif dan berorientasi keberlanjutan, berikut ini adalah beberapa teori utama yang telah membentuk diskursus pembangunan ekonomi hingga saat ini:

1. Teori Klasik dan Neoklasik

Teori pembangunan klasik berakar pada pemikiran ekonom abad ke-18 dan ke-19 seperti Adam Smith dan David Ricardo, yang menjadi fondasi awal bagi pemahaman mengenai proses pertumbuhan ekonomi. Dalam karya magnum opus-nya *The*

Wealth of Nations (1776), Smith mengemukakan bahwa pembagian kerja (*division of labour*) dan peran mekanisme pasar yang berjalan secara alami merupakan faktor utama dalam meningkatkan produktivitas serta menciptakan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Smith memandang bahwa jika individu bebas mengejar kepentingan pribadinya dalam kerangka pasar yang kompetitif, maka akan terjadi *invisible hand* yang secara tidak langsung mendorong efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.

Melengkapi pemikiran tersebut, David Ricardo memperkenalkan konsep keunggulan komparatif (*comparative advantage*), yang menjelaskan bahwa setiap negara, meskipun tidak memiliki keunggulan absolut dalam produksi barang tertentu, tetap dapat memperoleh manfaat dari perdagangan internasional dengan mengkhususkan diri pada produksi barang yang relatif lebih efisien. Konsep ini memperkuat argumen bahwa integrasi ke dalam pasar global dan alokasi sumber daya yang efisien akan mempercepat proses pembangunan ekonomi.

Dalam kerangka paradigma klasik ini, pembangunan dipandang sebagai hasil logis dari penerapan prinsip-prinsip pasar bebas, liberalisasi ekonomi, dan spesialisasi produksi. Teori ini mengasumsikan bahwa intervensi negara sebaiknya diminimalisasi, karena distorsi terhadap mekanisme pasar dianggap dapat menghambat efisiensi alokasi sumber daya. Seperti dicatat oleh Blaug (1996), teori klasik meletakkan dasar rasional bagi pemikiran ekonomi liberal yang mendominasi kebijakan pembangunan pada era awal industrialisasi.

Teori neoklasik merupakan kelanjutan dari tradisi klasik, namun mengusung pendekatan yang lebih formal dan matematis dalam menjelaskan mekanisme pertumbuhan ekonomi. Teori ini berakar pada asumsi-asumsi dasar seperti

rasionalitas individu, efisiensi pasar, dan optimalisasi perilaku agen ekonomi. Dalam kerangka ini, pembangunan ekonomi dipandang sebagai hasil dari proses alokasi sumber daya yang efisien melalui mekanisme pasar, dengan individu-individu yang bertindak untuk memaksimalkan utilitas atau keuntungan.

Salah satu tonggak penting dalam tradisi neoklasik adalah model pertumbuhan ekonomi *Solow-Swan* (Solow, 1956), yang memperkenalkan fungsi produksi agregat sebagai alat analitis utama untuk menjelaskan pertumbuhan output dalam jangka panjang. Model ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tiga faktor utama: akumulasi modal fisik, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi yang bersifat eksogen. Dalam model Solow, teknologi memainkan peran kunci sebagai determinan utama pertumbuhan jangka panjang (*steady-state growth*), karena kontribusi modal dan tenaga kerja menunjukkan diminishing returns.

Model ini juga menekankan pentingnya tabungan dan investasi sebagai pendorong akumulasi modal, serta peran produktivitas total faktor (*total factor productivity* – TFP) yang mencerminkan kemajuan teknologi. Meskipun bersifat normatif dan bergantung pada asumsi keseimbangan jangka panjang, pendekatan neoklasik memberikan landasan penting bagi analisis pertumbuhan berbasis data kuantitatif dan perumusan kebijakan makroekonomi yang berorientasi pada efisiensi.

Namun demikian, teori ini kerap dikritik karena mengabaikan faktor-faktor kelembagaan, sejarah, serta ketimpangan struktural dalam masyarakat. Asumsinya mengenai pasar yang sempurna dan mobilitas faktor produksi sering kali tidak mencerminkan realitas negara berkembang,

sehingga penerapannya dalam konteks pembangunan memerlukan penyesuaian yang kontekstual.

2. Teori Dualisme dan Dual Sector Model (W. Arthur Lewis)

Model dualisme struktural yang diperkenalkan oleh W. Arthur Lewis (1954) menjadi tonggak penting dalam literatur pembangunan awal, khususnya dalam menjelaskan dinamika transisi ekonomi negara-negara berkembang. Dalam model ini, Lewis membagi perekonomian menjadi dua sektor utama: sektor tradisional (*rural-agricultural*) yang ditandai dengan penggunaan tenaga kerja secara padat karya, produktivitas rendah, dan struktur subsisten; serta sektor modern (*urban-industrial*) yang bersifat padat modal, berproduktivitas tinggi, dan terorganisasi secara kapitalistik.

Inti dari teori ini terletak pada gagasan bahwa pembangunan ekonomi dapat dipacu melalui aliran tenaga kerja dari sektor tradisional yang mengalami surplus tenaga kerja ke sektor modern yang sedang tumbuh. Selama sektor tradisional memiliki tenaga kerja berlebih (surplus labor), maka proses migrasi ini tidak akan meningkatkan upah secara signifikan, sehingga sektor modern dapat terus menyerap tenaga kerja dengan biaya relatif rendah. Dalam jangka panjang, pertumbuhan sektor modern akan mendorong industrialisasi, akumulasi modal, dan pada akhirnya, modernisasi ekonomi secara keseluruhan.

Model Lewis sangat relevan untuk konteks negara-negara berkembang, di mana dualisme ekonomi dan ketimpangan antara sektor pedesaan dan perkotaan sangat mencolok. Namun demikian, model ini juga mendapat kritik, terutama karena terlalu menyederhanakan realitas struktural di lapangan. Banyak negara berkembang justru mengalami stagnasi di sektor informal perkotaan yang tidak mampu

menyerap tenaga kerja secara produktif, menciptakan pengangguran terselubung atau bahkan absolut. Selain itu, proses migrasi dari desa ke kota tidak selalu disertai dengan peningkatan kesejahteraan, melainkan kadang memunculkan bentuk-bentuk baru eksklusi sosial dan marginalisasi.

Meskipun demikian, model dualisme struktural Lewis tetap menjadi kerangka analitis yang kuat dalam memahami dinamika transisi struktural dalam pembangunan ekonomi. Ia membuka ruang bagi pemikiran-pemikiran lanjut seperti model Harris-Todaro tentang migrasi dan ketenagakerjaan, serta menjadi landasan dalam formulasi kebijakan industrialisasi yang inklusif dan berbasis tenaga kerja.

3. Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*)

Sebagai respons terhadap keterbatasan teori pembangunan konvensional khususnya pendekatan klasik dan neoklasik dalam menjelaskan realitas kemiskinan yang sistemik dan berkelanjutan di negara-negara Global Selatan, lahirlah teori ketergantungan (*dependency theory*) pada dekade 1960-an dan 1970-an. Teori ini berakar dari kritik terhadap asumsi linearitas dan universalisme dalam proses pembangunan yang diasumsikan oleh model Barat, serta menawarkan kerangka analisis yang berorientasi struktural dan historis terhadap ketimpangan global.

Tokoh-tokoh utama dalam mazhab ini, seperti Andre Gunder Frank (1969) dan Paul Baran (1957), menyatakan bahwa keterbelakangan (*underdevelopment*) di negara-negara berkembang bukanlah kondisi pra-modern yang menanti modernisasi, melainkan hasil langsung dari proses historis eksploitasi yang berlangsung dalam sistem kapitalisme global. Dalam pandangan mereka, keterbelakangan merupakan “produk aktif” dari integrasi asimetris antara pusat (negara maju) dan pinggiran (negara berkembang), yang dimediasi

oleh mekanisme seperti perdagangan yang tidak setara (*unequal exchange*), arsitektur utang internasional, serta dominasi korporasi transnasional dan institusi keuangan global.

Teori ketergantungan menggarisbawahi bahwa pembangunan dan keterbelakangan bukanlah dua tahap dalam satu lintasan sejarah, melainkan dua kondisi yang saling bergantung dalam struktur dunia yang tidak setara. Negara-negara pinggiran dieksploitasi sebagai penyedia bahan mentah, tenaga kerja murah, dan pasar bagi produk industri pusat, sehingga industrialisasi domestik menjadi terhambat dan siklus ketergantungan pun terus berlanjut. Dengan demikian, teori ini tidak hanya mempersoalkan dimensi ekonomi, tetapi juga relasi kuasa, imperialisme ekonomi, dan kontrol ideologis dalam sistem global.

Kritik terhadap teori ketergantungan memang muncul, terutama dari kalangan yang menilai pendekatan ini terlalu deterministik dan mengabaikan peran agensi domestik serta variasi dalam pengalaman pembangunan negara-negara berkembang. Namun demikian, kontribusi utamanya tetap signifikan, khususnya dalam membuka ruang bagi wacana alternatif seperti ekonomi solidaritas, pembangunan berbasis lokal (*local development*), serta ekonomi-politik Global Selatan yang lebih mandiri dan berkeadilan.

Dengan demikian, teori ketergantungan telah membentuk landasan penting dalam studi pembangunan kritis dan terus memengaruhi diskursus kontemporer tentang keadilan global, ketimpangan struktural, dan kedaulatan ekonomi nasional.

4. Teori Pembangunan Berbasis Kapabilitas (*Capability Approach*)

Sebagai kritik terhadap pendekatan pembangunan yang terlalu berfokus pada pertumbuhan ekonomi agregat dan indikator makroekonomi semata, Amartya Sen (1999) memperkenalkan pendekatan berbasis kapabilitas (*capability approach*), yang menandai pergeseran paradigmatik dalam teori pembangunan kontemporer. Dalam karya monumental *Development as Freedom*, Sen menegaskan bahwa pembangunan sejati tidak semata-mata tercermin dari peningkatan pendapatan nasional atau produk domestik bruto (PDB), melainkan dari sejauh mana individu memiliki kebebasan substantif untuk menentukan dan menjalani kehidupan yang mereka anggap bernilai.

Dalam kerangka ini, pembangunan dipahami sebagai proses ekspansi kapabilitas manusia yaitu kemampuan nyata (bukan sekadar potensi formal) untuk mencapai fungsi-fungsi dasar seperti hidup sehat, memperoleh pendidikan yang layak, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, serta terbebas dari bentuk-bentuk penindasan, diskriminasi, dan kemiskinan struktural. Dengan demikian, pendekatan ini mengalihkan perhatian dari “benda-benda yang dimiliki” (*resources*) menuju “kehidupan yang dijalani” (*functionings*), dan menekankan pentingnya kebebasan sebagai tujuan sekaligus sarana pembangunan.

Pendekatan kapabilitas juga memperkenalkan dimensi etika ke dalam diskursus pembangunan dengan menempatkan martabat manusia, keadilan sosial, dan pilihan otonom sebagai landasan normatif. Sen menggarisbawahi bahwa keterbatasan dalam kapabilitas, seperti tidak adanya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, atau jaminan sosial, bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga bentuk deprivation kebebasan yang menghambat pembangunan manusia.

Kontribusi pemikiran Sen ini menjadi fondasi teoretis bagi pengembangan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*/HDI) oleh UNDP, yang mengukur pembangunan berdasarkan tiga dimensi utama: kesehatan (harapan hidup), pendidikan (rata-rata dan harapan lama sekolah), dan standar hidup (PDB per kapita berdasarkan PPP). Dengan menggunakan indikator-indikator ini, HDI menawarkan alternatif terhadap ukuran konvensional yang sempit, dan mendorong pengambilan kebijakan yang lebih berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan manusia secara menyeluruh (UNDP, 2023).

Dengan demikian, pendekatan kapabilitas tidak hanya memperluas ruang lingkup pembangunan, tetapi juga memberikan kerangka normatif dan operasional yang kuat untuk merancang kebijakan yang berpihak pada manusia sebagai pusat dari seluruh proses pembangunan.

5. Teori Ekologi dan Pembangunan Berkelanjutan

Meningkatnya krisis lingkungan global, ditandai oleh perubahan iklim, kerusakan ekosistem, dan kelangkaan sumber daya alam, telah melahirkan paradigma baru dalam diskursus pembangunan, yaitu teori pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Paradigma ini muncul sebagai respons kritis terhadap model pembangunan konvensional yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi eksponensial tanpa memperhitungkan batas ekologis planet bumi. Teori ini menekankan pentingnya keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu pendekatan integratif yang menolak dikotomi antara pembangunan dan konservasi.

Peringatan dini terhadap krisis ekologis secara sistematis dikemukakan dalam laporan legendaris *The Limits to Growth* oleh Meadows et al. (1972, diperbarui 2004), yang disusun

berdasarkan pemodelan sistem dinamika global oleh *Club of Rome*. Laporan tersebut menunjukkan bahwa jika pola produksi, konsumsi, dan pertumbuhan penduduk terus berlanjut tanpa pembatasan, maka sistem bumi akan mengalami tekanan yang mengarah pada keruntuhan ekosistem global. Hal ini menandakan perlunya pergeseran paradigma dari pembangunan berbasis eksploitasi menuju pembangunan yang memperhitungkan daya dukung lingkungan dan batas regeneratif sumber daya alam.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan nasional atau PDB, melainkan juga dari jejak ekologis, tingkat emisi karbon, kelestarian keanekaragaman hayati, serta akses terhadap sumber daya bagi generasi mendatang. Konsep-konsep seperti *ekonomi hijau (green economy)*, *ekonomi sirkular (circular economy)*, dan *pembangunan rendah karbon (low-carbon development)* telah menjadi elemen kunci dalam perumusan kebijakan pembangunan global maupun nasional (UNEP, 2011).

Pendekatan ini juga menggarisbawahi pentingnya keadilan lingkungan (*environmental justice*), di mana beban degradasi lingkungan sering kali lebih besar ditanggung oleh kelompok miskin dan rentan, yang memiliki kontribusi paling kecil terhadap krisis tersebut. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan tidak hanya merupakan agenda ekologis, tetapi juga moral dan sosial, yang mengaitkan kelangsungan hidup planet dengan tanggung jawab antar-generasi dan antargolongan.

Dengan semakin menguatnya bukti ilmiah tentang kerusakan lingkungan dan tekanan terhadap sistem bumi, pembangunan berkelanjutan kini tidak lagi menjadi pilihan, melainkan suatu keharusan normatif dan strategis dalam merancang masa depan umat manusia yang adil dan lestari.

Evolusi Pemikiran Pembangunan

Berbagai teori pembangunan ekonomi merefleksikan upaya intelektual dan praktis umat manusia dalam memahami serta mengarahkan proses transformasi sosial-ekonomi menuju tatanan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dari paradigma klasik yang menekankan mekanisme pasar dan efisiensi alokatif, hingga pendekatan kontemporer berbasis kapabilitas manusia dan keberlanjutan ekologis, masing-masing teori memberikan kontribusi penting dalam membongkar dimensi-dimensi kunci pembangunan. Alih-alih saling meniadakan, teori-teori tersebut justru dapat dilihat sebagai lensa konseptual yang saling melengkapi memberikan perspektif yang beragam namun saling bersinergi dalam menangkap kompleksitas realitas pembangunan.

Dalam konteks dunia yang semakin saling terhubung dan menghadapi tantangan multidimensi seperti krisis iklim, ketimpangan global, dan disrupsi teknologi, kebutuhan akan pendekatan pembangunan yang holistik menjadi sangat mendesak. Sintesis antara efisiensi ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan tidak lagi dapat ditunda jika pembangunan ingin tetap relevan dengan tuntutan zaman dan tanggung jawab antar-generasi. Oleh karena itu, masa depan pembangunan terletak pada kemampuan kita untuk merumuskan strategi yang integratif yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjamin bahwa manfaatnya tersebar secara adil dan tidak mengorbankan keberlanjutan bumi sebagai rumah bersama.

D. Keterkaitan antara Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Dalam wacana ekonomi kontemporer, istilah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi sering kali digunakan secara bergantian, namun secara konseptual keduanya memiliki cakupan makna yang berbeda meskipun saling berkaitan erat. Pertumbuhan ekonomi secara spesifik merujuk pada peningkatan kuantitatif output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu, yang umumnya diukur melalui indikator Produk Domestik Bruto (PDB). Indikator ini memberikan gambaran tentang kapasitas produksi dan ekspansi ekonomi secara makro.

Sebaliknya, pembangunan ekonomi memiliki dimensi yang jauh lebih luas dan komprehensif. Selain melibatkan pertumbuhan PDB sebagai salah satu aspek, pembangunan ekonomi juga menekankan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mencakup aspek pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta pemeliharaan keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak hanya mengukur “seberapa besar” ekonomi tumbuh, tetapi juga “seberapa baik” manfaat pertumbuhan tersebut dirasakan secara adil dan berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat (Todaro & Smith, 2020).

Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai prasyarat penting bagi terwujudnya pembangunan, namun tidak secara otomatis menjamin tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Sebuah negara mungkin mengalami laju pertumbuhan yang tinggi, namun jika manfaat dari pertumbuhan tersebut hanya terakumulasi pada kelompok tertentu saja, atau bahkan menimbulkan dampak

negatif terhadap lingkungan dan tatanan sosial, maka pembangunan yang terjadi akan bersifat timpang dan tidak adil (Sen, 1999).

Fenomena seperti *jobless growth* atau *growth without development* menggambarkan situasi di mana Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara meningkat signifikan, tetapi tidak diiringi oleh peningkatan kesejahteraan yang dirasakan secara merata oleh masyarakat luas. Kondisi ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi semata belum cukup untuk menjawab tantangan pembangunan yang sejati, sehingga diperlukan kebijakan yang mampu menjembatani pertumbuhan dengan pemerataan serta keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Sejalan dengan kritik terhadap paradigma pertumbuhan ekonomi konvensional, Stiglitz, Sen, dan Fitoussi (2009) dalam laporan *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress* menegaskan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) bukanlah ukuran yang memadai untuk menilai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Mereka berargumen bahwa pengukuran kinerja ekonomi harus diperluas dengan memasukkan dimensi kesejahteraan subjektif, distribusi pendapatan, keberlanjutan lingkungan, serta aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial-politik. Dengan pendekatan ini, pembangunan tidak hanya dilihat dari sisi kuantitatif berupa pertumbuhan output ekonomi, tetapi juga dari aspek kualitatif yang mencakup kesejahteraan, kesetaraan, dan keberlanjutan secara simultan.

Implikasinya bagi kebijakan pembangunan adalah perlunya pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan sistem indikator multidimensional yang komprehensif guna memantau kemajuan pembangunan. Hal ini juga menuntut perumusan kebijakan yang tidak hanya

mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi sekaligus memastikan distribusi manfaat yang adil, perlindungan lingkungan yang efektif, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini menegaskan pentingnya pembangunan inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan strategis dalam merespons tantangan sosial-ekonomi dan ekologis di era globalisasi.

Dalam konteks pembangunan ekonomi modern, konsep pembangunan tidak lagi sekadar diukur dari peningkatan kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara, melainkan dipahami sebagai proses transformasi struktural yang bersifat holistik dan multidimensional. Transformasi ini mencakup perubahan yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga sosial, politik, dan budaya. Pembangunan ekonomi yang sejati adalah proses yang mampu menciptakan kondisi di mana setiap individu tidak hanya hidup lebih sejahtera secara materiil, tetapi juga memiliki kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan yang bermakna, berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, serta mengembangkan potensi diri secara penuh dan berkelanjutan (UNDP, 2023).

Dengan demikian, pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai upaya memperluas kebebasan substantif bagi seluruh warga negara, yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga dan bermakna. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, di mana peningkatan kualitas hidup tidak hanya terukur melalui indikator makroekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan juga melalui dimensi kesejahteraan sosial, inklusi, keadilan, dan keberlanjutan ekologis. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi yang ideal adalah pembangunan yang mampu mengintegrasikan aspek-aspek tersebut secara simultan,

sehingga menghasilkan masyarakat yang tidak hanya lebih makmur, tetapi juga lebih adil, inklusif, dan resilien dalam menghadapi tantangan global yang dinamis.

BAB 3

PERENCANAAN EKONOMI: DEFINISI, TUJUAN DAN FUNGSI

Dalam dinamika pembangunan nasional, perencanaan ekonomi memegang peranan yang sangat sentral sebagai instrumen strategis yang esensial untuk mengarahkan proses pertumbuhan dan pembangunan secara sistematis, terukur, dan berkeadilan. Perencanaan ekonomi bukan sekadar rangkaian prosedur administratif atau teknis belaka, melainkan merupakan manifestasi konkret dari visi dan cita-cita jangka panjang sebuah bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensi meliputi aspek ekonomi, sosial, maupun ekologis yang semakin kompleks dan dinamis.

Di era globalisasi yang ditandai oleh ketidakpastian tinggi, perubahan iklim yang mengancam keberlanjutan planet, serta revolusi teknologi digital yang mendisrupsi berbagai sektor, perencanaan ekonomi menjadi semakin relevan dan penting. Melalui perencanaan yang matang dan berbasis data, suatu negara dapat memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya yang terbatas, mengantisipasi risiko-risiko sistemik, serta merumuskan kebijakan yang inklusif dan adaptif. Dengan demikian, perencanaan ekonomi berfungsi tidak hanya sebagai alat pengendali pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai kerangka kerja untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), yang menuntut

keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup.

Pada akhirnya, perencanaan ekonomi yang efektif mampu mengintegrasikan berbagai dimensi pembangunan secara harmonis sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak hanya mengakselerasi kemajuan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekologis bangsa dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang.

Perencanaan ekonomi juga berfungsi sebagai wahana penting untuk menjembatani dan mengkoordinasikan peran serta antara negara, sektor swasta, serta masyarakat sipil dalam menciptakan sinergi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan yang rasional, berbasis data empiris, serta didukung oleh proyeksi dan analisis mendalam, pemerintah dapat merumuskan arah kebijakan yang strategis, sekaligus mengantisipasi potensi risiko dan memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dalam dinamika ekonomi global maupun domestik.

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai definisi, tujuan, fungsi, jenis, dan evolusi perencanaan ekonomi menjadi sangat krusial sebagai fondasi untuk menilai efektivitas dan relevansi kebijakan pembangunan. Hal ini terutama penting bagi negara-negara berkembang yang masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang kompleks, seperti kemiskinan, ketimpangan, keterbatasan sumber daya, dan kerentanan terhadap guncangan eksternal. Dengan landasan pemahaman yang kuat, perencanaan ekonomi dapat dijadikan instrumen yang adaptif dan responsif dalam merancang strategi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan semata, tetapi juga pada pemerataan manfaat dan keberlanjutan jangka panjang.

Bab ini akan menguraikan secara komprehensif konsep-konsep dasar dalam perencanaan ekonomi, mencakup berbagai pendekatan teoritis maupun aplikatif yang telah berkembang dan mengalami evolusi sepanjang sejarah. Dengan pendekatan yang sistematis dan integratif, bab ini bertujuan memberikan landasan pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme, tujuan, serta metodologi perencanaan ekonomi dalam konteks pembangunan nasional dan global yang dinamis.

A. Pengertian Perencanaan Ekonomi

Perencanaan ekonomi merupakan suatu proses yang sistematis dan rasional, dijalankan oleh negara melalui berbagai institusi ekonomi yang berwenang, untuk menetapkan arah, tujuan, serta strategi pembangunan dalam berbagai jangka waktu baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Inti dari perencanaan ini adalah upaya negara tidak sekadar merespons dinamika ekonomi yang berlangsung secara spontan, melainkan juga melakukan intervensi aktif yang terukur dan terencana guna mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih merata dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, perencanaan ekonomi meliputi perumusan dan implementasi kebijakan, program, serta mekanisme pengalokasian sumber daya secara efektif, yang secara kolektif diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas makroekonomi, keadilan sosial, serta kemandirian ekonomi nasional.

Meier dan Rauch (2005) mendefinisikan perencanaan ekonomi sebagai *“a deliberate government attempt to coordinate economic decision making over the long run and to influence, direct, and in some cases even control the level and growth of a nation’s principal economic variables.”*

Definisi ini menegaskan bahwa perencanaan ekonomi merupakan upaya sadar dan terorganisir oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, sekaligus mempengaruhi, mengarahkan, bahkan dalam beberapa kasus mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi utama suatu negara. Dengan demikian, perencanaan ekonomi berperan sebagai kerangka koordinasi kolektif yang esensial dalam menghadapi ketidakpastian pasar serta kompleksitas tantangan pembangunan, guna memastikan tercapainya tujuan nasional secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks negara berkembang, perencanaan ekonomi memiliki peranan yang sangat strategis sebagai instrumen kebijakan untuk mengatasi berbagai distorsi pasar yang kerap kali menghambat kemajuan ekonomi. Selain itu, perencanaan juga berfungsi memperkuat infrastruktur ekonomi, memperkecil kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan (Todaro & Smith, 2020). Negara-negara seperti India, Tiongkok, dan Korea Selatan menjadi contoh nyata bagaimana perencanaan ekonomi yang terstruktur dan konsisten dapat mendorong transformasi ekonomi yang signifikan, mengubah struktur ekonomi tradisional menuju sektor industri dan jasa yang lebih maju, serta memperkuat posisi mereka dalam perekonomian global (Sen, 1999; Lin, 2012). Lebih jauh, perencanaan ekonomi saat ini tidak hanya fokus pada pertumbuhan dan pemerataan, tetapi juga mengintegrasikan dimensi keberlanjutan lingkungan dan inklusi sosial dalam setiap tahap proses pembangunan. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan yang diusung oleh Agenda 2030 Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan sebagai fondasi untuk mewujudkan kesejahteraan

yang lestari bagi generasi sekarang dan yang akan datang (UN, 2015).

Dengan demikian, perencanaan ekonomi tidak dapat dipandang semata sebagai aktivitas teknokratis yang terfokus hanya pada aspek teknis dan administratif. Ia sejatinya merupakan sebuah proses politik-ekonomi yang kompleks, yang mengintegrasikan visi strategis jangka panjang bangsa dengan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Proses ini juga menuntut pertimbangan mendalam terkait nilai-nilai etika, keadilan sosial, serta prinsip keberlanjutan, agar kebijakan dan program yang dirumuskan mampu menjawab tantangan masa kini tanpa mengorbankan kesejahteraan generasi mendatang. Dengan demikian, perencanaan ekonomi merupakan wahana penting untuk menegaskan tata kelola pembangunan yang demokratis, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

B. Tujuan dan Fungsi Perencanaan Ekonomi

Perencanaan ekonomi memegang peran sentral dalam membangun fondasi struktur pembangunan yang tidak semata-mata berfokus pada peningkatan angka-angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga secara holistik mencerminkan aspirasi masyarakat akan keadilan sosial, kesejahteraan yang merata, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam kerangka ini, tujuan perencanaan ekonomi melampaui sekadar ekspansi output nasional; ia juga merangkul dimensi sosial yang menitikberatkan pada pengurangan ketimpangan dan peningkatan kualitas hidup, dimensi spasial yang mengupayakan pemerataan pembangunan antar wilayah, serta dimensi ekologis yang menjaga kelestarian sumber daya alam demi generasi

mendatang. Pendekatan ini mengarahkan pembangunan pada visi jangka panjang yang menyeluruh dan berkelanjutan, sebagaimana diuraikan oleh Todaro dan Smith (2020), sehingga perencanaan ekonomi menjadi instrumen strategis yang integral dalam mewujudkan kemajuan bangsa secara inklusif dan bertanggung jawab.

Secara umum, perencanaan ekonomi memiliki tujuan utama untuk mengarahkan dan mengelola proses pembangunan agar berjalan secara terkoordinasi, efisien, dan selaras dengan kepentingan publik serta nilai-nilai strategis nasional. Melalui perencanaan yang sistematis, negara berupaya memastikan bahwa berbagai kebijakan, program, dan alokasi sumber daya dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Beberapa tujuan dan fungsi utama dari perencanaan ekonomi meliputi:

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat merupakan salah satu tujuan utama perencanaan ekonomi. Upaya ini diwujudkan melalui penciptaan lapangan kerja yang produktif, peningkatan pendapatan riil, serta perluasan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan demikian, perencanaan ekonomi berfungsi sebagai alat untuk mengatasi masalah pengangguran tersembunyi (*underemployment*) dan jebakan kemiskinan (*poverty trap*) yang kerap menjadi tantangan utama bagi negara-negara berkembang (Meier & Rauch, 2005).
2. Mengurangi ketimpangan wilayah dan sosial menjadi salah satu fungsi penting perencanaan ekonomi. Ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan antara wilayah maupun antar kelompok sosial dapat menimbulkan disintegrasi ekonomi dan sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Oleh karena

itu, perencanaan ekonomi berperan sebagai alat korektif dengan merumuskan kebijakan afirmatif dan strategi pembangunan regional yang inklusif, guna memastikan pemerataan pembangunan dan memperkuat kohesi sosial (UNDP, 2023).

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya merupakan salah satu tujuan utama perencanaan ekonomi. Dalam kondisi sumber daya yang terbatas, perencanaan berfungsi untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat dialokasikan secara optimal, tepat sasaran, dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Dengan demikian, perencanaan membantu meminimalkan pemborosan dan ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya, sekaligus mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang memberikan dampak terbesar terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *opportunity cost*, yang menekankan pentingnya memilih alternatif terbaik dari berbagai opsi yang tersedia, serta konsep *resource optimization* yang menjadi fondasi dalam studi ekonomi pembangunan (Lin, 2012).
4. Mensinergikan sektor-sektor ekonomi secara terintegrasi merupakan fungsi krusial dari perencanaan ekonomi untuk menghindari pembangunan yang terfragmentasi dan tidak terarah. Tanpa adanya perencanaan yang matang, berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, industri, dan jasa cenderung berkembang secara terpisah dan tidak terkoordinasi, yang pada akhirnya dapat menimbulkan inefisiensi dan duplikasi usaha. Perencanaan berperan sebagai mekanisme koordinasi yang mengarahkan setiap sektor agar berkontribusi secara sinergis dalam kerangka pembangunan nasional yang harmonis. Hal ini memungkinkan terciptanya hubungan

yang saling menguatkan antar sektor, misalnya dengan mengoptimalkan rantai nilai dari produksi hingga distribusi, serta memperkuat integrasi pasar domestik dan internasional. Pendekatan ini juga mendukung diversifikasi ekonomi yang berkelanjutan, serta memperkuat daya saing nasional dalam menghadapi tantangan globalisasi (Rodrik, 2007).

5. Mengatasi kegagalan pasar dan eksternalitas negatif adalah salah satu fungsi vital perencanaan ekonomi, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Pasar bebas sering kali gagal dalam menyediakan barang dan jasa yang memiliki nilai sosial tinggi karena sifatnya yang tidak selalu menguntungkan secara finansial bagi pelaku pasar. Misalnya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan dapat menghasilkan manfaat jangka panjang yang luas bagi masyarakat, namun tidak selalu memberikan insentif ekonomi langsung bagi penyedia swasta. Selain itu, pasar sering mengabaikan dampak eksternal negatif seperti polusi, kerusakan lingkungan, dan kemiskinan, yang jika tidak diintervensi dapat menimbulkan biaya sosial besar. Dalam konteks ini, perencanaan ekonomi memungkinkan negara untuk mengambil peran aktif melalui kebijakan dan program yang menyediakan barang publik, memperbaiki distribusi sumber daya, serta menginternalisasi eksternalitas tersebut agar tercipta hasil sosial yang lebih optimal dan berkelanjutan (Stiglitz, 2000).
6. Mengantisipasi dinamika global dan disrupsi masa depan merupakan salah satu fungsi penting perencanaan ekonomi di era modern yang ditandai oleh globalisasi yang semakin dalam dan revolusi teknologi yang berlangsung dengan cepat. Dalam kondisi seperti ini,

perubahan ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat terjadi secara tiba-tiba dan berskala luas, sehingga menimbulkan risiko serta peluang baru yang harus dihadapi oleh negara. Perencanaan ekonomi memberikan kerangka strategis yang memungkinkan pemerintah untuk merancang kebijakan dan program yang adaptif terhadap perubahan tersebut, serta mampu memanfaatkan inovasi teknologi secara optimal. Selain itu, perencanaan juga berperan dalam membangun ketahanan ekonomi nasional dengan mengidentifikasi potensi disrupsi dan merumuskan langkah-langkah mitigasi, baik dalam konteks krisis ekonomi global, perubahan iklim, maupun transformasi digital. Dengan demikian, strategi pembangunan yang terencana secara baik menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, keberlanjutan, dan daya saing suatu negara di tengah ketidakpastian dan kompleksitas tantangan global (World Bank, 2023).

Dengan demikian, perencanaan ekonomi tidak semata-mata merupakan suatu alat teknokratik yang bersifat administratif atau mekanis, melainkan sebuah proses yang sarat dengan makna politik, sosial, dan nilai-nilai etika yang mendalam. Perencanaan ekonomi mencerminkan visi kolektif sebuah bangsa dalam merancang arah pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menitikberatkan pada penciptaan keadilan sosial, pemerataan kesempatan, dan peningkatan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat. Melalui perencanaan yang inklusif dan partisipatif, negara berupaya mengintegrasikan kepentingan berbagai kelompok sosial serta mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya. Oleh karena itu, perencanaan ekonomi menjadi cerminan dari identitas dan aspirasi nasional dalam menghadapi tantangan global sekaligus membangun masa depan yang berdaya saing tinggi

sekaligus berkeadilan sosial, yang mampu menjawab kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kesejahteraan generasi mendatang.

C. Jenis dan Model Perencanaan Ekonomi

Perencanaan ekonomi tidak bersifat seragam atau homogen di seluruh negara, melainkan hadir dalam beragam bentuk dan pendekatan yang sangat dipengaruhi oleh karakteristik sistem ekonomi masing-masing, kapasitas kelembagaan pemerintah, serta kondisi politik dan sosial yang berlaku di suatu negara. Variasi ini mencerminkan kompleksitas dan keragaman dinamika pembangunan yang terjadi di berbagai konteks nasional. Ada negara yang menerapkan perencanaan yang sangat terpusat dan komprehensif, dengan kontrol negara yang kuat terhadap arah ekonomi, sementara negara lain mengadopsi pendekatan perencanaan yang lebih fleksibel dan desentralisasi, menyesuaikan dengan peran pasar dan sektor swasta yang lebih dominan. Selain itu, perbedaan kapasitas institusional seperti kemampuan teknis, sumber daya manusia, dan sistem birokrasi juga turut membentuk efektivitas serta jenis perencanaan yang dapat dijalankan. Kondisi politik, mulai dari stabilitas pemerintahan hingga keberagaman kepentingan sosial, turut mempengaruhi proses perencanaan dan implementasinya. Oleh karena itu, keragaman bentuk perencanaan ekonomi tersebut tidak hanya menandakan adanya perbedaan strategi dan prioritas, tetapi juga memperlihatkan bagaimana negara-negara berusaha mengelola proses transformasi ekonomi secara sistematis dan terarah, sesuai dengan konteks dan tantangan yang mereka hadapi.

1. Perencanaan Imperatif vs. Indikatif

Salah satu klasifikasi utama dalam perencanaan ekonomi adalah pembedaan antara perencanaan imperatif dan perencanaan indikatif, yang masing-masing memiliki karakteristik dan peran berbeda dalam mengarahkan pembangunan ekonomi suatu negara.

Perencanaan imperatif, yang juga dikenal sebagai perencanaan dirigisme, bersifat otoritatif dan mengutamakan kontrol penuh oleh negara atas perekonomian. Dalam model ini, pemerintah secara langsung menentukan alokasi sumber daya, menetapkan target produksi, serta mengatur distribusi output secara terpusat. Negara mengambil peran dominan dalam seluruh aspek kegiatan ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Pendekatan ini biasa ditemui pada sistem ekonomi terpusat atau sosialis, seperti yang pernah diterapkan di bekas Uni Soviet, Tiongkok sebelum reformasi ekonomi tahun 1978, serta Korea Utara. Dalam sistem imperatif, mekanisme pasar hampir sepenuhnya dikesampingkan dan digantikan oleh perencanaan negara sebagai instrumen utama untuk mencapai tujuan pembangunan. Model ini memiliki kelebihan dalam memastikan alokasi sumber daya yang terarah, namun juga sering menghadapi masalah inefisiensi, birokrasi yang berlebihan, serta keterbatasan dalam respons terhadap dinamika pasar (Kornai, 1992).

Sebaliknya, perencanaan indikatif bersifat lebih fleksibel dan tidak memaksa, melainkan berfungsi sebagai panduan atau sinyal strategis yang diberikan oleh pemerintah kepada sektor publik maupun swasta. Perencanaan ini berperan dalam menetapkan kerangka umum dan prioritas pembangunan tanpa mengabaikan mekanisme pasar yang tetap menjadi penggerak utama dalam perekonomian. Model indikatif ini banyak diterapkan di negara-negara dengan

sistem ekonomi campuran dan demokratis, seperti Prancis dan Jepang pasca Perang Dunia II. Pemerintah dalam model ini lebih berfokus pada peran koordinasi, penyediaan informasi, dan kebijakan insentif untuk mengarahkan investasi dan aktivitas ekonomi agar sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, tanpa melakukan intervensi yang bersifat memaksa. Pendekatan ini dinilai lebih adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan lebih menghargai kebebasan serta inisiatif sektor swasta dalam proses pembangunan (Samuelson & Nordhaus, 2010).

2. Perencanaan Sentralisasi vs. Desentralisasi

Perencanaan ekonomi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat pengambilan keputusan dan otoritas yang memegang kendali dalam proses perencanaan tersebut, yaitu perencanaan sentralistik dan perencanaan desentralistik.

Perencanaan sentralistik menempatkan otoritas utama pada pemerintah pusat dalam menetapkan kebijakan, prioritas, dan strategi pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam model ini, keputusan-keputusan strategis dan alokasi sumber daya difokuskan di tingkat pusat, sehingga memudahkan terwujudnya konsistensi kebijakan dan integrasi program pembangunan antar sektor serta wilayah. Pendekatan ini dapat memberikan arah pembangunan yang jelas dan terkoordinasi secara nasional, terutama dalam kondisi darurat atau pembangunan skala besar yang memerlukan sinergi nasional. Namun, perencanaan sentralistik kerap menghadapi kendala terkait fleksibilitas dalam merespons kebutuhan dan dinamika lokal. Karena keputusan diambil secara *top-down*, kemampuan adaptasi terhadap kondisi spesifik daerah sering terbatas, yang dapat menyebabkan ketidakcocokan antara kebijakan pusat dengan realitas di lapangan serta mengurangi partisipasi dan pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat setempat (Smoke, 2003).

Sebaliknya, perencanaan desentralistik memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah atau unit pemerintahan lokal untuk menyusun rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan prioritas wilayah masing-masing. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks negara berkembang yang memiliki keragaman sosial, budaya, dan geografis yang signifikan, serta sistem politik yang mendorong otonomi daerah, seperti Indonesia. Desentralisasi perencanaan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih partisipatif, responsif terhadap aspirasi masyarakat lokal, dan adaptif terhadap tantangan serta peluang spesifik di tingkat daerah. Model ini berpotensi meningkatkan efektivitas dan relevansi program pembangunan dengan mendorong inovasi dan pengelolaan sumber daya secara lebih tepat sasaran. Namun, tantangan yang muncul meliputi kapasitas administratif pemerintah daerah, kesenjangan antar daerah, serta kebutuhan koordinasi yang efektif antara pusat dan daerah untuk memastikan keselarasan visi dan tujuan pembangunan nasional (Smoke, 2003).

3. Perencanaan Berdasarkan Jangka Waktu: Jangka Panjang, Menengah, dan Pendek

Perencanaan ekonomi juga dapat dikategorikan berdasarkan horizon waktu, yang mencerminkan kedalaman visi dan tingkat operasionalisasi dari kebijakan pembangunan. Klasifikasi ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan secara berkelanjutan, terukur, dan terkoordinasi lintas waktu.

Pertama, perencanaan jangka panjang mencakup rentang waktu 25 hingga 50 tahun dan bersifat visioner serta normatif. Perencanaan ini berfungsi sebagai kerangka besar yang menggambarkan arah transformasi struktural jangka panjang, seperti pergeseran dari ekonomi berbasis sumber daya alam ke ekonomi berbasis inovasi, atau pencapaian

target-target besar seperti net zero emissions, ketahanan pangan nasional, dan kesejahteraan berkelanjutan. Visi dalam perencanaan jangka panjang dirumuskan untuk membentuk konsensus nasional atas cita-cita kolektif suatu bangsa, yang kemudian dijabarkan secara bertahap melalui rencana menengah dan pendek.

Kedua, perencanaan jangka menengah, biasanya mencakup periode 5 hingga 10 tahun, memiliki karakter strategis. Di Indonesia, bentuk konkret dari perencanaan ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang disusun setiap lima tahun dan selaras dengan masa pemerintahan presiden terpilih. RPJMN memuat prioritas nasional, arah kebijakan sektoral dan regional, serta indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program pembangunan. Rencana ini menjadi jembatan antara visi jangka panjang dengan pelaksanaan jangka pendek, sekaligus memastikan konsistensi arah pembangunan antar periode pemerintahan.

Ketiga, perencanaan jangka pendek berfokus pada implementasi tahunan dan bersifat operasional. Contohnya adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). RKP menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta memuat program prioritas, kegiatan pembangunan, dan target-target tahunan yang harus dicapai oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Rencana jangka pendek sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan strategis dapat diimplementasikan secara konkret di lapangan, serta dapat dievaluasi melalui indikator yang terukur (Bappenas, 2021).

Dengan adanya tiga tingkat horizon waktu dalam perencanaan ekonomi, diharapkan terdapat kesinambungan antara visi jangka panjang, strategi menengah, dan aksi jangka

pendek. Integrasi antar tingkatan ini menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika zaman.

4. Model Ekonometrik dan Input-Output

Dalam menyusun perencanaan ekonomi yang efektif dan berbasis bukti (*evidence-based policy*), berbagai model kuantitatif dan analitis digunakan sebagai alat bantu utama untuk merumuskan kebijakan, memperkirakan dampaknya, serta mengevaluasi berbagai skenario pembangunan. Model-model ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk mensimulasikan dinamika ekonomi yang kompleks secara sistematis, sehingga perencanaan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga didukung oleh analisis yang rasional dan terukur.

Pertama, model ekonometrik merupakan pendekatan yang memadukan teori ekonomi dengan teknik statistik, khususnya regresi, untuk mengkuantifikasi hubungan antar variabel ekonomi seperti konsumsi, investasi, inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan. Dengan menggunakan data historis, model ini mampu membuat proyeksi jangka pendek maupun menengah atas perkembangan ekonomi, serta mengevaluasi dampak potensial dari suatu intervensi kebijakan. Model ekonometrik banyak digunakan dalam penyusunan proyeksi makro ekonomi nasional dan regional, serta dalam analisis policy impact assessment.

Kedua, model input-output, yang diperkenalkan oleh Wassily Leontief, menjadi alat penting dalam menganalisis keterkaitan struktural antar sektor dalam perekonomian. Model ini memetakan bagaimana output dari satu sektor menjadi input bagi sektor lain, sehingga dapat digunakan untuk menghitung dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan permintaan atau kebijakan tertentu terhadap

keseluruhan sistem ekonomi. Misalnya, peningkatan investasi di sektor infrastruktur dapat dihitung dampaknya terhadap sektor konstruksi, manufaktur, jasa keuangan, dan tenaga kerja. Model ini sangat berguna dalam perencanaan sektoral, analisis dampak industri, serta estimasi nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja.

Ketiga, model dua-gap (*two-gap model*) yang dikembangkan oleh Hollis Chenery dan Alan Strout (1966), digunakan untuk mengidentifikasi kendala utama dalam pembiayaan pembangunan di negara berkembang. Model ini berfokus pada dua kesenjangan utama: saving-investment gap (kesenjangan antara tabungan domestik dan kebutuhan investasi) dan foreign exchange gap (kesenjangan antara devisa yang dibutuhkan untuk impor dan devisa yang tersedia). Dengan menganalisis kedua kesenjangan ini, model dua-gap membantu negara-negara berkembang merumuskan strategi pembiayaan pembangunan, baik melalui mobilisasi sumber daya domestik maupun melalui bantuan luar negeri dan investasi asing langsung.

Model-model kuantitatif ini tidak hanya memberikan dasar empiris dalam pengambilan keputusan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan. Dengan memadukan model ekonometrik, input-output, dan dua-gap, perencana dapat mengintegrasikan perspektif makroekonomi, sektoral, dan fiskal dalam satu kerangka kerja yang komprehensif dan dinamis.

Model-model ini tidak hanya mendukung objektivitas dalam proses perencanaan, tetapi juga memperkuat kapasitas prediktif dan responsif pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Dengan pendekatan berbasis data dan simulasi skenario, pengambil kebijakan dapat mengantisipasi konsekuensi yang mungkin timbul dari berbagai alternatif kebijakan—baik dalam aspek pertumbuhan, distribusi,

maupun keberlanjutan. Misalnya, melalui model input-output, dapat diestimasi dampak kebijakan subsidi energi terhadap sektor industri dan rumah tangga; sementara model ekonometrik memungkinkan analisis sensitivitas terhadap perubahan suku bunga atau harga komoditas global. Dengan demikian, model-model perencanaan ini menjadi alat penting dalam membangun perencanaan ekonomi yang adaptif, *evidence-based*, dan akuntabel.

D. Sejarah dan Evolusi Perencanaan Ekonomi

Perencanaan ekonomi sebagai suatu pendekatan sistematis dalam mengelola pembangunan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari evolusi historis yang panjang dan kompleks. Perkembangannya mencerminkan respons negara terhadap berbagai tantangan struktural, seperti ketimpangan sosial, keterbelakangan ekonomi, dan kegagalan pasar, yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mekanisme pasar bebas. Selain itu, perubahan paradigma dalam teori pembangunan dari pertumbuhan ekonomi semata menuju keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan manusia telah turut membentuk arah dan metode perencanaan ekonomi. Dalam konteks ini, perencanaan menjadi wadah artikulasi kepentingan jangka panjang sebuah bangsa, yang disesuaikan dengan perubahan konstelasi politik global, arsitektur ekonomi internasional, serta transformasi sosial domestik.

Era Pra-Modern dan Pemikiran Awal. Cikal bakal perencanaan ekonomi sebenarnya sudah dapat ditelusuri jauh sebelum munculnya teori-teori ekonomi modern. Dalam peradaban kuno seperti Mesir, Babilonia, dan Kekaisaran Romawi, negara memainkan peran sentral dalam mengatur kehidupan ekonomi masyarakat, meskipun belum secara

sistematis atau berbasis pada pendekatan ilmiah. Di Mesir Kuno, misalnya, negara mengorganisir irigasi Sungai Nil, mengelola lumbung pangan, serta mengatur pembagian hasil pertanian untuk menjamin kestabilan sosial dan politik. Begitu pula di Kekaisaran Romawi, sistem logistik dan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan aquaducts dikelola secara terpusat guna mendukung perdagangan dan mobilisasi militer. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa gagasan tentang pengelolaan ekonomi oleh otoritas pusat telah dikenal sejak awal, walaupun belum disebut sebagai “perencanaan ekonomi” dalam pengertian modern.

Pemikiran awal tentang pentingnya peran negara dalam ekonomi juga mendapat tempat dalam tradisi merkantilisme yang berkembang antara abad ke-16 hingga ke-18 di Eropa. Para pemikir merkantilis seperti Jean-Baptiste Colbert di Prancis mengadvokasi intervensi aktif negara dalam perdagangan, manufaktur, dan akumulasi cadangan emas. Mereka percaya bahwa kekayaan suatu negara diukur dari surplus perdagangan dan kepemilikan logam mulia, sehingga kebijakan ekonomi diarahkan untuk memaksimalkan ekspor dan meminimalkan impor melalui tarif protektif, subsidi industri, serta regulasi ketat atas perdagangan luar negeri. Dalam kerangka inilah negara mulai diposisikan sebagai aktor ekonomi yang memiliki kewenangan untuk merancang kebijakan demi kepentingan nasional.

Karl Polanyi (1944) dalam karyanya *The Great Transformation* menyatakan bahwa sebelum munculnya pasar bebas sebagai institusi dominan dalam kapitalisme modern, ekonomi selalu tertanam (*embedded*) dalam tatanan sosial dan politik yang lebih luas. Dengan demikian, perencanaan ekonomi di era pra-modern sesungguhnya merupakan refleksi dari logika integratif antara ekonomi, kekuasaan, dan struktur sosial yang menjamin kohesi masyarakat.

Perencanaan Ekonomi Modern: Dari Sosialisme ke Pasca-Perang Dunia. Perencanaan ekonomi dalam bentuk modern mulai mengambil bentuk yang lebih sistematis dan terstruktur pada awal abad ke-20, bertepatan dengan meningkatnya kompleksitas ekonomi industri dan kebutuhan akan intervensi negara dalam mengatur arah pembangunan. Krisis ekonomi, perubahan politik, serta keterbatasan mekanisme pasar mendorong munculnya pendekatan terencana sebagai respons terhadap ketidakstabilan dan ketimpangan yang dihasilkan oleh sistem *laissez-faire*.

Salah satu tonggak utama dalam sejarah perencanaan ekonomi modern adalah penerapan perencanaan imperatif oleh Uni Soviet di bawah kepemimpinan Joseph Stalin. Dimulai dengan *Five-Year Plan* pertama pada tahun 1928, Uni Soviet memperkenalkan sistem ekonomi yang sepenuhnya dikendalikan negara di mana target produksi, distribusi sumber daya, dan investasi sektor-sektor strategis ditentukan secara terpusat oleh biro perencanaan seperti Gosplan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengindustrialisasi ekonomi Soviet secara cepat, memobilisasi sumber daya secara kolektif, serta menegakkan kontrol politik dan ekonomi atas seluruh wilayah negara. Model ini menjadi inspirasi bagi banyak negara sosialis lainnya, seperti Tiongkok, Korea Utara, dan Kuba, yang juga mengadopsi model perencanaan terpusat sebagai instrumen utama pembangunan nasional (Kornai, 1992).

Namun, pendekatan imperatif tersebut tidak luput dari kritik. Keterbatasan dalam fleksibilitas, inefisiensi dalam alokasi sumber daya, serta absennya sinyal harga pasar menyebabkan banyak kegagalan dalam sistem perencanaan terpusat. Meskipun berhasil memobilisasi sumber daya untuk proyek-proyek besar seperti industrialisasi berat dan pertahanan militer, model ini sering kali mengorbankan

efisiensi mikroekonomi, kualitas barang, serta kesejahteraan konsumen.

Pasca Perang Dunia II, perencanaan ekonomi juga diadopsi oleh negara-negara kapitalis, namun dalam bentuk yang lebih fleksibel dan berbasis pasar. Negara-negara Eropa Barat seperti Prancis, Belanda, dan Jepang memperkenalkan perencanaan indikatif untuk mendorong rekonstruksi ekonomi pasca perang. Di Prancis, misalnya, perencanaan ekonomi dilakukan melalui *Commissariat général du Plan* yang berfungsi sebagai institusi perencana jangka menengah, bekerja sama dengan sektor swasta dan serikat buruh untuk menentukan arah pembangunan. Jepang, melalui MITI (*Ministry of International Trade and Industry*), juga menerapkan perencanaan strategis untuk mendorong pertumbuhan industri melalui dukungan teknologi, subsidi ekspor, dan seleksi industri prioritas.

Sementara itu, di Amerika Serikat, meskipun perencanaan tidak diterapkan secara menyeluruh, intervensi negara dalam bentuk New Deal pada masa Depresi Besar dan *military-industrial planning* selama Perang Dunia II menunjukkan bahwa bahkan dalam sistem ekonomi pasar, peran negara tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.

Dengan demikian, era ini menandai pluralisasi pendekatan perencanaan: dari model imperatif sosialis hingga model indikatif dan teknokratik di negara-negara kapitalis, yang keduanya lahir dari kebutuhan untuk mengarahkan pembangunan dalam konteks krisis dan perubahan struktural.

Perencanaan *Ekonomi Pasca Perang Dunia II: Bangkitnya Negara Pembangun*. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, dunia memasuki fase baru yang ditandai oleh rekonstruksi ekonomi besar-besaran, dekolonisasi, dan

munculnya negara-negara baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dalam konteks ini, perencanaan ekonomi menjadi instrumen strategis untuk memulihkan infrastruktur yang hancur akibat perang, membangun kapasitas produksi, dan mewujudkan kedaulatan ekonomi di negara-negara yang baru merdeka.

Negara-negara Barat seperti Prancis, Belanda, dan Jepang mengadopsi sistem *indicative planning* suatu bentuk perencanaan yang tidak bersifat mengikat, namun berfungsi sebagai panduan arah kebijakan jangka menengah dan panjang. Prancis menjadi pelopor dalam pendekatan ini dengan mendirikan *Commissariat Général du Plan* pada tahun 1946, yang bertugas menyusun rencana pembangunan nasional lima tahunan secara kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan serikat pekerja. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan ekonomi, sekaligus menjaga koordinasi lintas sektor yang diperlukan untuk pembangunan pasca-konflik (Samuelson & Nordhaus, 2010). Jepang juga menerapkan perencanaan strategis melalui lembaga seperti MITI (*Ministry of International Trade and Industry*), yang memainkan peran kunci dalam industrialisasi cepat dan transformasi menjadi kekuatan ekonomi dunia.

Di sisi lain, negara-negara berkembang seperti India, Indonesia, dan Ghana mengadopsi perencanaan ekonomi sebagai alat utama untuk mengejar ketertinggalan struktural akibat kolonialisme. India, di bawah kepemimpinan Jawaharlal Nehru, memperkenalkan *Five-Year Plans* sejak tahun 1951, yang dirancang oleh Planning Commission India. Rencana ini mencerminkan komitmen terhadap sosialisme demokratis, di mana negara memainkan peran utama dalam sektor-sektor strategis seperti industri berat, infrastruktur, dan pendidikan, dengan tetap membuka ruang bagi pasar

dalam aktivitas ekonomi non-prioritas. Pendekatan serupa diterapkan di Indonesia melalui *Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)* yang dimulai pada era Orde Baru.

Perencanaan pada masa ini bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada modernisasi, nation-building, dan redistribusi. Bank Dunia dan lembaga-lembaga Bretton Woods pada awalnya mendukung pendekatan ini melalui berbagai program bantuan dan pinjaman untuk pembangunan infrastruktur dan penguatan institusi.

Namun demikian, mulai tahun 1970-an, pendekatan perencanaan tradisional mulai menghadapi tantangan baru, seperti stagnasi ekonomi, krisis utang, dan keterbatasan efisiensi birokrasi. Ini mendorong munculnya kritik terhadap peran negara yang terlalu dominan dan membuka jalan bagi reformasi neoliberal di banyak negara berkembang, yang kemudian menggeser fokus dari perencanaan sentral ke kebijakan pasar terbuka dan deregulasi.

Perencanaan Ekonomi di Negara Berkembang: Strategi Pembangunan dan Pencarian Jalan Tengah. Pada era dekolonisasi yang berlangsung antara tahun 1950-an hingga 1970-an, perencanaan ekonomi memainkan peran sentral dalam agenda pembangunan negara-negara berkembang. Negara-negara yang baru merdeka menghadapi tantangan besar berupa ketertinggalan struktural, kemiskinan massal, rendahnya kapasitas produksi, dan ketergantungan tinggi terhadap ekspor komoditas primer. Dalam situasi ini, perencanaan ekonomi dipandang sebagai alat strategis untuk mempercepat industrialisasi, memperkuat kedaulatan ekonomi, serta mengoreksi kegagalan pasar yang telah diwariskan oleh kolonialisme (Todaro & Smith, 2020).

Negara-negara seperti India, Indonesia, Mesir dan Tanzania mengadopsi rencana pembangunan lima tahunan (*Five-Year Plans*) yang dirancang untuk mengarahkan investasi publik ke sektor-sektor prioritas seperti industri dasar, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. India, misalnya, di bawah pengaruh ekonom seperti Mahalanobis, memprioritaskan pembangunan industri berat dan perencanaan berbasis model matematis untuk mengubah struktur ekonomi agraris menjadi ekonomi industri. Indonesia menerapkan *Repelita* (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang menjadi fondasi kebijakan pembangunan Orde Baru, dengan fokus pada stabilisasi ekonomi, swasembada pangan, dan pembangunan infrastruktur nasional.

Perencanaan dalam konteks negara berkembang bukan hanya tentang alokasi sumber daya, tetapi juga tentang nation-building membentuk identitas nasional, membangun legitimasi politik, dan menciptakan aparatur birokrasi modern. Dalam banyak kasus, negara memainkan peran sebagai pelaku ekonomi utama karena lemahnya sektor swasta domestik dan keterbatasan pasar dalam menyediakan barang publik secara merata. Oleh karena itu, perencanaan sering dilihat sebagai sarana untuk mencapai keadilan distributif dan mobilisasi sumber daya nasional dalam kerangka yang lebih egaliter.

Namun, efektivitas perencanaan di negara berkembang tidak selalu berhasil seperti yang diharapkan. Banyak rencana pembangunan yang mengalami kegagalan karena lemahnya kapasitas institusional, kurangnya partisipasi masyarakat, korupsi, serta ketergantungan pada bantuan luar negeri. Selain itu, pendekatan yang terlalu top-down dan birokratis kerap mengabaikan dinamika lokal dan kebutuhan masyarakat akar rumput, sehingga hasil pembangunan tidak merata. Krisis utang pada dekade 1980-an dan tekanan dari lembaga

keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia juga mendorong banyak negara berkembang untuk meninggalkan model perencanaan sentralistik dan beralih ke pendekatan pasar yang lebih liberal.

Meskipun demikian, warisan perencanaan ekonomi tetap menjadi bagian penting dalam kerangka pembangunan di banyak negara berkembang. Kini, perencanaan lebih bersifat adaptif dan partisipatif, mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, tata kelola yang baik, dan pendekatan berbasis data dalam perumusan kebijakan nasional dan regional.

Namun, memasuki dekade 1980-an, efektivitas perencanaan ekonomi mulai dipertanyakan secara luas, terutama di negara-negara berkembang yang mengalami krisis ekonomi akut. Gelombang stagflasi global, lonjakan harga minyak, dan kenaikan suku bunga internasional menyebabkan beban utang luar negeri meningkat drastis. Banyak negara berkembang terjebak dalam krisis neraca pembayaran yang kronis, yang memicu intervensi dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Sebagai respons terhadap krisis tersebut, muncul paradigma baru dalam kebijakan pembangunan global yang dikenal sebagai Washington Consensus. Paradigma ini menekankan pentingnya liberalisasi perdagangan dan keuangan, deregulasi ekonomi, privatisasi perusahaan negara, serta pengurangan intervensi pemerintah dalam aktivitas ekonomi. Dalam kerangka ini, Structural Adjustment Programs (SAPs) diperkenalkan sebagai syarat bantuan internasional, yang secara langsung mengikis peran negara dalam proses perencanaan dan pengendalian ekonomi.

SAPs mendorong negara-negara berkembang untuk memangkas anggaran publik, menurunkan subsidi sosial, dan membuka ekonomi domestik terhadap investasi asing. Implikasi kebijakan ini sangat luas: banyak program pembangunan jangka panjang yang dirancang melalui mekanisme perencanaan terpaksa dihentikan atau direstrukturisasi. Perencanaan negara dianggap terlalu birokratis, tidak fleksibel, dan tidak mampu merespons dinamika pasar secara efisien. Dalam logika neoliberal, mekanisme pasar dianggap sebagai alat alokasi sumber daya yang lebih unggul daripada perencanaan negara yang sentralistik.

Meski demikian, dampak dari SAPs tidak selalu positif. Sejumlah studi menunjukkan bahwa penyesuaian struktural seringkali mengorbankan sektor sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, serta memperdalam ketimpangan sosial dan regional. Banyak negara mengalami penurunan standar hidup dan melemahnya kapasitas negara dalam menyediakan pelayanan publik (Stiglitz, 2002). Selain itu, ketergantungan terhadap utang luar negeri dan volatilitas pasar global justru meningkat, membuat negara-negara berkembang semakin rentan terhadap krisis ekonomi eksternal.

Dengan demikian, dekade 1980-an menandai titik balik dalam sejarah perencanaan ekonomi dari peran negara yang dominan menuju penekanan pada mekanisme pasar dan pengurangan kontrol negara. Namun kegagalan pendekatan penyesuaian struktural dalam menjawab masalah kemiskinan, ketimpangan, dan keberlanjutan kemudian melahirkan kritik baru dan membuka jalan bagi reformulasi perencanaan dalam bentuk yang lebih partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan pada dekade-dekade berikutnya.

Era Globalisasi dan Perencanaan Berbasis Good Governance: Menuju Model Partisipatif dan Berkelanjutan.

Memasuki abad ke-21, perencanaan ekonomi mengalami transformasi paradigma yang signifikan, ditandai dengan menguatnya prinsip-prinsip *good governance* sebagai fondasi utama dalam proses perumusan kebijakan publik. Perencanaan tidak lagi dipahami sebagai proses teknokratis yang terpusat dan tertutup, melainkan sebagai upaya kolektif yang melibatkan beragam aktor dan kepentingan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan inklusif. Transformasi ini dipicu oleh dua faktor utama: pertama, kegagalan pendekatan pembangunan yang eksklusif dan top-down di masa lalu, dan kedua, tuntutan era globalisasi yang menuntut respons kebijakan yang cepat, adaptif, dan berbasis bukti.

Pendekatan *good governance* dalam perencanaan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap perencanaan mulai dari identifikasi masalah, perumusan tujuan, penentuan prioritas, hingga pemantauan dan evaluasi. Hal ini juga mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan negara untuk mengelola proses perencanaan secara profesional, bebas dari korupsi, dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Perencanaan menjadi instrumen demokratis untuk menyelaraskan aspirasi rakyat dengan arah kebijakan negara, sekaligus menciptakan *ownership* atas proses pembangunan di tingkat lokal maupun nasional.

Di tingkat internasional, berbagai lembaga seperti UNDP, OECD, dan World Bank mulai mempromosikan *results-based planning*, *evidence-based policy*, serta integrasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) ke dalam kerangka perencanaan nasional. Hal ini mendorong negara-negara untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan, inklusi sosial, dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai satu kesatuan strategi pembangunan.

Di Indonesia, transisi menuju perencanaan partisipatif dan desentralistik tercermin dalam sistem *Musyawarah Perencanaan Pembangunan* (Musrenbang), yang menjadi forum utama bagi warga, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah untuk berinteraksi dalam menyusun rencana pembangunan. Melalui Musrenbang, pendekatan *bottom-up* menjadi bagian integral dari sistem perencanaan nasional, yang kemudian diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang oleh pemerintah pusat. Desentralisasi fiskal dan kewenangan pembangunan daerah juga menjadi katalis bagi munculnya inovasi kebijakan lokal yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, dalam era globalisasi dan demokratisasi, perencanaan ekonomi tidak lagi hanya tentang efisiensi teknis, tetapi juga tentang legitimasi politik, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis. Evolusi ini mencerminkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pembangunan sebagai proses multidimensional yang melibatkan keterlibatan aktif semua pihak dalam merancang masa depan bersama.

Selain itu, perkembangan isu-isu global yang semakin kompleks dan saling terkait seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial-ekonomi, serta revolusi digital telah secara signifikan mempengaruhi arah dan isi perencanaan ekonomi kontemporer. Tantangan perubahan iklim, misalnya, menuntut integrasi prinsip keberlanjutan ekologis dalam setiap kebijakan pembangunan untuk memitigasi dampak kerusakan lingkungan dan memastikan kelangsungan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Ketimpangan, baik antarwilayah maupun antar kelompok sosial, memicu perlunya perencanaan yang lebih berorientasi pada keadilan sosial, dengan fokus pada distribusi pendapatan yang merata dan peningkatan akses layanan dasar bagi kelompok marginal.

Transformasi digital, di sisi lain, membuka peluang sekaligus tantangan baru bagi pembangunan ekonomi. Digitalisasi memberikan potensi untuk mempercepat inovasi, memperluas akses pasar, dan meningkatkan efisiensi sektor publik dan swasta. Namun, hal ini juga mengharuskan perencanaan yang adaptif dalam menghadapi disrupsi pasar tenaga kerja, perubahan pola konsumsi, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang relevan dengan teknologi baru.

Dengan demikian, perencanaan ekonomi modern tidak lagi dapat hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi kuantitatif semata. Pendekatan kontemporer harus mampu mengintegrasikan dimensi keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, dan peningkatan kualitas hidup secara holistik dan seimbang. Stiglitz, Sen dan Fitoussi (2009) menegaskan bahwa pengukuran keberhasilan pembangunan harus melampaui Produk Domestik Bruto (PDB) dan mencakup indikator-indikator yang merefleksikan kesejahteraan manusia secara menyeluruh, termasuk kesejahteraan subjektif, distribusi pendapatan, dan kondisi sosial yang memadai. Oleh karena itu, perencanaan ekonomi masa kini dan masa depan harus dirancang dengan pendekatan multidimensional dan inklusif, yang menjawab tantangan dan aspirasi masyarakat dalam konteks dinamika global yang terus berubah.

BAB 4

TEKNIK DAN INSTRUMEN PERENCANAAN

Perencanaan ekonomi yang efektif memerlukan dukungan metodologis dan instrumen teknis yang dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan, mengevaluasi dampak, serta mengoptimalkan alokasi sumber daya. Dalam konteks modern yang ditandai dengan kompleksitas interaksi antar sektor dan ketidakpastian global, teknik perencanaan tidak bisa hanya bergantung pada asumsi-asumsi normatif, tetapi harus dilandasi pada analisis kuantitatif yang sistematis dan berbasis data.

Perencanaan ekonomi yang efektif tidak dapat dilepaskan dari penggunaan teknik analisis dan instrumen yang tepat. Dalam dunia yang semakin kompleks dan dinamis, pengambilan keputusan berbasis data dan model ilmiah menjadi kunci untuk merancang strategi pembangunan yang rasional, terukur, dan adaptif. Teknik-teknik perencanaan tidak hanya membantu dalam menetapkan arah dan tujuan, tetapi juga menyediakan alat evaluatif yang memungkinkan pembuat kebijakan mengantisipasi perubahan serta mengoptimalkan sumber daya yang terbatas. Berikut adalah lima teknik dan instrumen penting dalam perencanaan ekonomi.

Bab ini mengulas berbagai teknik dan instrumen perencanaan ekonomi yang digunakan oleh perencana dan pembuat kebijakan, mulai dari metode peramalan ekonomi untuk memprediksi arah trend jangka pendek maupun

panjang, hingga model matematis seperti *linear programming* dan *input-output analysis* yang digunakan dalam simulasi kebijakan dan perhitungan dampak antar sektor. Selain itu, pendekatan analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*) dan model makroekonomi juga menjadi perangkat penting dalam menilai efisiensi dan efektivitas intervensi pemerintah.

Dengan memahami teknik dan instrumen ini, perencana ekonomi dapat membuat keputusan yang lebih rasional, terukur, dan berdampak luas dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

A. Teknik Peramalan (*Forecasting*)

Dalam dunia perencanaan ekonomi yang sarat ketidakpastian, teknik peramalan (*forecasting*) menjadi alat krusial untuk menavigasi masa depan dengan dasar yang rasional dan ilmiah. Forecasting merupakan proses sistematis untuk memprediksi kejadian atau tren ekonomi di masa mendatang dengan mengandalkan data historis serta model analitis, baik statistik maupun ekonometrik. Tujuan utamanya bukan semata menebak masa depan, melainkan mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Dalam praktiknya, peramalan mencakup identifikasi pola tren (*trend*), fluktuasi musiman (*seasonality*), siklus bisnis (*cycles*), dan variasi acak, serta mempertimbangkan faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah, dinamika geopolitik, disrupsi teknologi, dan krisis global. Oleh karena itu, forecasting bukan hanya sebuah kegiatan teknis, melainkan juga seni dalam menginterpretasi dinamika masa lalu untuk menyusun strategi masa depan yang adaptif.

Menurut Makridakis, Wheelwright, dan Hyndman (2019), peramalan yang akurat dan andal memerlukan

pemahaman mendalam tentang data, metode statistik, serta konteks ekonomi yang melatarbelakangi. Mereka menekankan pentingnya pendekatan kuantitatif yang bersanding dengan intuisi kebijakan. Sementara itu, Hyndman dan Athanasopoulos (2021) menegaskan bahwa:

“Forecasting is not about predicting the future but about reducing uncertainty in decision-making.”

Dalam konteks pembangunan nasional, forecasting digunakan untuk memperkirakan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat inflasi dan pengangguran, harga komoditas, kebutuhan energi, hingga proyeksi permintaan sektor-sektor prioritas seperti industri, pertanian, dan pendidikan. Oleh karena itu, teknik ini sangat penting bagi para perencana pembangunan, ekonom, dan pengambil kebijakan dalam merancang kebijakan fiskal, menetapkan target APBN, serta mempersiapkan strategi menghadapi tantangan ekonomi jangka menengah dan panjang.

Lebih dari itu, teknik forecasting juga dapat digunakan dalam skenario ekonomi alternatif (*what-if analysis*) guna mengantisipasi berbagai kemungkinan perubahan global, seperti dampak perubahan iklim, digitalisasi, atau konflik geopolitik. Dalam hal ini, peramalan menjadi bagian dari proses *adaptive planning* yang menempatkan fleksibilitas dan ketangguhan (*resilience*) sebagai pilar perencanaan masa depan.

B. Analisis *Input-Output*

Analisis *Input-Output* merupakan salah satu instrumen penting dalam perencanaan ekonomi modern yang memungkinkan pemahaman menyeluruh tentang struktur dan keterkaitan antar sektor dalam suatu perekonomian. Diperkenalkan oleh ekonom pemenang Nobel, Wassily

Leontief pada tahun 1936, metode ini mengungkap bagaimana output dari suatu sektor ekonomi digunakan sebagai input oleh sektor lainnya, menciptakan jejaring interdependensi yang kompleks namun sistematis dalam suatu sistem ekonomi.

Metode ini menyusun data dalam bentuk matriks input-output, yang merepresentasikan aliran barang dan jasa antar sektor, baik dalam kegiatan produksi maupun konsumsi antar industri. Dengan pendekatan kuantitatif ini, para perencana dan pembuat kebijakan dapat menilai dampak dari perubahan permintaan akhir terhadap seluruh sistem ekonomi, serta mengidentifikasi sektor mana yang memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) tertinggi terhadap pertumbuhan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, analisis input-output menjadi alat yang sangat penting dan banyak digunakan oleh para perencana dan pembuat kebijakan. Metode ini memungkinkan pemahaman yang mendalam mengenai keterkaitan antar sektor ekonomi, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang struktur perekonomian suatu negara.

Salah satu fungsi utama analisis input-output adalah untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan nasional. Dengan mengetahui sektor-sektor yang memiliki pengaruh besar terhadap kegiatan ekonomi secara keseluruhan, perencana dapat memprioritaskan alokasi sumber daya dan investasi secara lebih efektif dan efisien.

Selain itu, analisis ini juga sangat berguna dalam menilai efek pengganda (*multiplier effect*) yang terjadi dalam perekonomian. Efek pengganda ini tidak hanya mencakup peningkatan output atau produk, tetapi juga berimplikasi pada peningkatan pendapatan masyarakat dan terciptanya

kesempatan kerja baru. Informasi ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan inklusif dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Lebih jauh lagi, analisis input-output membantu dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral dan regional yang lebih terintegrasi dan komprehensif. Misalnya, dalam merancang kebijakan fiskal seperti subsidi atau investasi publik, model ini dapat digunakan untuk memproyeksikan dampak langsung maupun tidak langsungnya terhadap seluruh perekonomian, termasuk sektor-sektor yang saling terkait. Dengan demikian, analisis *input-output* menyediakan dasar yang kuat bagi perencanaan yang berbasis bukti (*evidence-based planning*) sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan memberikan hasil yang maksimal.

Sebagaimana dinyatakan oleh Miller dan Blair (2009), yang menulis salah satu literatur paling otoritatif dalam bidang ini, *“Input-output models are powerful tools for understanding the interdependencies in an economy and guiding policy decisions.”* Pernyataan ini menegaskan pentingnya model *input-output* sebagai instrumen analitis yang mampu mengungkap keterkaitan antar sektor dalam perekonomian secara rinci. Dengan demikian, model ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami struktur ekonomi, tetapi juga menjadi dasar yang kuat bagi perumusan kebijakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam era globalisasi dan kompleksitas ekonomi saat ini, analisis input-output menjadi semakin penting untuk merancang kebijakan ekonomi yang berbasis bukti dan terukur. Sebagaimana ditegaskan oleh Miller dan Blair (2009), model input-output adalah alat yang sangat ampuh untuk memahami saling ketergantungan antar sektor dalam

perekonomian dan menjadi panduan penting dalam pengambilan keputusan kebijakan. Misalnya, dalam merespons perubahan struktur industri akibat revolusi digital atau transisi menuju ekonomi hijau, metode ini dapat digunakan untuk menilai dampak ekonomi lintas sektor dan lintas wilayah, sekaligus merancang strategi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Lebih dari sekadar alat teknis, analisis input-output mencerminkan semangat integratif dalam perencanaan ekonomi bahwa setiap kebijakan yang menyentuh satu sektor pasti membawa implikasi luas bagi sektor-sektor lain, serta bahwa keberhasilan pembangunan hanya dapat diraih melalui pemahaman menyeluruh terhadap keterkaitan sistemik tersebut. Pendekatan ini menegaskan bahwa perekonomian adalah sebuah jaringan yang saling terkait, di mana perubahan pada satu bagian akan berdampak berantai, sehingga perencanaan harus dilakukan dengan perspektif holistik dan koordinasi lintas sektor.

C. Analisis Biaya-Manfaat (*Cost-Benefit Analysis*, CBA)

Dalam dunia perencanaan ekonomi, pengambilan keputusan tidak bisa dilepaskan dari evaluasi yang sistematis terhadap dampak suatu kebijakan atau proyek pembangunan. Salah satu teknik evaluatif paling klasik dan fundamental yang digunakan adalah *Cost-Benefit Analysis* (CBA). Teknik ini bertujuan untuk membandingkan secara kuantitatif antara manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan dari suatu proyek atau intervensi kebijakan. Hasil dari analisis ini menjadi dasar penting untuk menentukan apakah suatu kebijakan layak dilaksanakan atau tidak.

Sebagaimana dijelaskan oleh Boardman et al. (2018), CBA harus melibatkan pertimbangan terhadap seluruh jenis

manfaat dan biaya baik yang langsung maupun tidak langsung, serta yang jangka pendek maupun jangka panjang. Lebih dari sekadar perhitungan finansial, CBA juga mencakup nilai-nilai sosial dan lingkungan, yang sering kali sulit diukur namun sangat krusial dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Cost-Benefit Analysis (CBA) biasanya dilakukan melalui langkah-langkah analitis berikut:

1. Identifikasi proyek dan alternatifnya
Tahap awal meliputi pendefinisian proyek yang akan dianalisis serta berbagai alternatif pelaksanaannya, termasuk opsi tanpa melakukan proyek sama sekali (*status quo*).
2. Pengukuran biaya dan manfaat dalam satuan moneter
Seluruh biaya dan manfaat yang berkaitan dengan proyek diukur dan dinilai dalam satuan uang untuk memudahkan perbandingan, mencakup biaya investasi, operasional, pemeliharaan, serta manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.
3. Diskonto nilai sekarang (*Net Present Value*)
Menghitung nilai kini dari seluruh arus biaya dan manfaat yang terjadi di masa depan dengan menggunakan tingkat diskonto tertentu agar dapat membandingkan nilai waktu uang secara akurat.
4. Evaluasi kriteria kelayakan
Melakukan penilaian menggunakan indikator utama seperti rasio manfaat-biaya (*Benefit-Cost Ratio*), nilai kini bersih (*Net Present Value*/NPV), dan tingkat pengembalian internal (*Internal Rate of Return*/IRR) untuk menentukan apakah proyek layak dilaksanakan.
5. Analisis sensitivitas
Menguji ketahanan hasil analisis terhadap perubahan asumsi dan variabel kunci, seperti tingkat diskonto,

estimasi biaya, dan manfaat, untuk mengantisipasi ketidakpastian dan risiko yang mungkin muncul.

Dalam praktiknya, CBA menjadi alat yang sangat penting terutama di negara berkembang, di mana keterbatasan fiskal mengharuskan pengambilan keputusan yang efisien dan berdampak luas. Proyek-proyek infrastruktur publik seperti jalan, bendungan, atau sistem air bersih, serta program di sektor kesehatan dan pendidikan, sering kali harus melewati analisis CBA guna memastikan bahwa dana publik digunakan secara optimal untuk menghasilkan manfaat sosial yang besar.

Menurut Mishan dan Quah (2007), salah satu keunggulan CBA adalah kemampuannya dalam menyediakan kerangka rasional untuk mengkaji “nilai sosial” dari setiap pilihan kebijakan. Mereka menyatakan: *“Cost-benefit analysis provides a rational framework to assess the social worth of policy choices.”*

Namun demikian, CBA tidak lepas dari kritik. Salah satunya adalah kesulitan dalam mengkuantifikasi manfaat non-ekonomi, seperti keadilan sosial, kebahagiaan masyarakat, atau pelestarian budaya. Oleh karena itu, pendekatan modern terhadap CBA sering kali menyarankan integrasi antara analisis kuantitatif dan pertimbangan kualitatif, serta partisipasi publik dalam menilai manfaat yang tidak terhitung dalam angka.

Dengan demikian, CBA tidak hanya menjadi alat perhitungan teknokratis, melainkan juga cerminan dari upaya moral dan intelektual dalam memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi membawa nilai dan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

D. Pemrograman Linier dan Optimasi

Dalam dunia ekonomi pembangunan yang sarat dengan keterbatasan sumber daya baik tenaga kerja, modal, waktu, maupun bahan baku Pemrograman Linier (*Linear Programming/LP*) hadir sebagai salah satu instrumen analitis paling penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang efisien dan berbasis bukti. LP adalah teknik optimasi matematis yang bertujuan menemukan kombinasi terbaik dari sejumlah variabel keputusan, dengan mempertimbangkan berbagai kendala (*constraints*), guna memaksimalkan hasil atau meminimalkan biaya (Hillier & Lieberman, 2021).

Model Linear Programming (LP) secara umum terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu:

1. Fungsi Objektif (*Objective Function*)
Fungsi ini menggambarkan tujuan utama dari permasalahan yang ingin diselesaikan, misalnya memaksimalkan keuntungan, meminimalkan biaya, atau memaksimalkan efisiensi. Fungsi objektif biasanya ditulis dalam bentuk persamaan linear yang melibatkan variabel keputusan.
2. Variabel Keputusan (*Decision Variables*)
Variabel-variabel ini merupakan elemen yang dapat diatur atau dipilih oleh pengambil keputusan untuk mencapai tujuan dalam fungsi objektif. Contohnya, jumlah produk yang akan diproduksi, alokasi sumber daya, atau jumlah tenaga kerja yang digunakan.
3. Kendala (*Constraints*)
Kendala adalah batasan-batasan yang membatasi ruang solusi variabel keputusan. Kendala-kendala ini berupa persamaan atau pertidaksamaan linear yang merefleksikan keterbatasan sumber daya, kapasitas

produksi, anggaran, waktu, dan aturan lain yang harus dipenuhi dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam perencanaan pembangunan nasional, model *Linear Programming* (LP) memiliki peran strategis yang signifikan dalam membantu pengambilan keputusan yang optimal, khususnya dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan kebutuhan untuk mencapai efisiensi maksimum. Beberapa aplikasi LP yang umum dalam konteks pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Optimasi Produksi Nasional

LP digunakan untuk menentukan kombinasi produksi terbaik dari berbagai sektor ekonomi yang dapat memberikan nilai tambah maksimum. Dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, dan teknologi, model ini membantu memaksimalkan output atau keuntungan nasional secara efisien.

2. Penjadwalan dan Distribusi Logistik

Dalam situasi pembangunan yang memerlukan distribusi barang atau bantuan, seperti pengiriman pangan, bahan bakar, obat-obatan, dan alat kesehatan ke wilayah terpencil, LP membantu merancang jadwal dan rute distribusi yang optimal. Hal ini memastikan pemanfaatan armada transportasi dan sumber daya logistik secara efektif serta meminimalkan biaya dan waktu pengiriman.

3. Perencanaan Investasi Publik

Pemerintah menggunakan LP untuk mengalokasikan anggaran pembangunan pada berbagai sektor dan proyek yang memberikan dampak sosial dan ekonomi terbesar. Dengan batasan anggaran dan prioritas pembangunan, LP membantu merumuskan strategi investasi yang efisien dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional,

termasuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan infrastruktur.

Pendekatan LP tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan, tetapi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya pembangunan.

Kekuatan utama dari pendekatan LP terletak pada kemampuannya untuk mengurai persoalan pembangunan yang kompleks dan multidimensi ke dalam kerangka model matematis yang terstruktur dan sistematis. Ini memungkinkan perumus kebijakan untuk menjalankan simulasi, evaluasi skenario (*what-if analysis*), serta merumuskan strategi yang responsif dan terukur (Taha, 2017).

Hillier dan Lieberman (2021) menegaskan bahwa: *“The power of linear programming lies in its ability to model complex real-world decision problems in a mathematical form that is solvable by systematic procedures.”*

Namun, penting untuk disadari bahwa model LP memiliki keterbatasan. Asumsi dasar seperti linearitas hubungan antar variabel dan determinisme lingkungan sering kali tidak sejalan dengan kenyataan yang dinamis dan penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, muncul pengembangan metode lanjutan seperti Integer Programming, Non-Linear Programming, hingga Stochastic Programming untuk merespons kebutuhan perencanaan dalam konteks yang lebih kompleks dan tidak pasti.

Dengan pendekatan optimasi yang kuat, LP telah menjadi bagian penting dalam toolkit perencana modern, mendukung proses pengambilan keputusan yang tidak hanya efisien, tetapi juga adaptif terhadap keterbatasan dan tantangan nyata yang dihadapi dalam pembangunan berkelanjutan.

E. Model Makroekonomi dalam Perencanaan

Dalam lanskap pembangunan nasional yang kompleks dan terus berubah, model makroekonomi berfungsi sebagai alat strategis untuk memahami, mensimulasikan, dan memproyeksikan interaksi antar sektor dalam perekonomian secara menyeluruh. Model ini mengintegrasikan variabel-variabel utama seperti konsumsi rumah tangga, investasi swasta, pengeluaran pemerintah, ekspor-impor, inflasi, tingkat suku bunga, serta kebijakan fiskal dan moneter dalam suatu kerangka analisis yang sistematis (Blanchard & Johnson, 2017).

Tujuan utama dari penerapan model makroekonomi adalah untuk memberikan landasan kuantitatif dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Melalui simulasi berbasis data, model ini membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial seperti:

1. Bagaimana dampak kenaikan belanja infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja?
2. Apa konsekuensi kebijakan subsidi terhadap inflasi dan neraca perdagangan?
3. Sejauh mana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi investasi dan permintaan agregat?

Salah satu pendekatan yang menonjol dalam perencanaan ekonomi kontemporer adalah *Computable General Equilibrium* (CGE). CGE merupakan model berbasis data empiris yang merepresentasikan keterkaitan antar sektor dalam suatu perekonomian dan menganalisis dampak dari perubahan kebijakan atau kejadian eksternal terhadap keseimbangan umum ekonomi. Model ini sangat berguna dalam menilai redistribusi pendapatan, efek lingkungan, atau

konsekuensi dari integrasi ekonomi regional (Dixon & Jorgenson, 2013).

Selain itu, model *Dynamic Stochastic General Equilibrium* (DSGE) digunakan secara luas oleh bank sentral dan institusi internasional seperti IMF dan OECD. DSGE menyertakan elemen waktu (dinamika), ketidakpastian (*stochastic*), serta perilaku agen ekonomi yang rasional. Model ini ideal untuk memproyeksikan efek kebijakan moneter dan fiskal dalam jangka menengah dan panjang, termasuk respons ekonomi terhadap guncangan global, seperti krisis keuangan atau pandemi (Smets & Wouters, 2007).

Seiring berkembangnya teknologi dan ketersediaan data besar (*big data*), model makroekonomi menjadi semakin presisi dan adaptif. Pendekatan berbasis evidence-based planning kini menjadi norma dalam tata kelola ekonomi modern yakni perencanaan yang didasarkan pada analisis kuantitatif yang solid dan relevan dengan konteks aktual.

Sebagaimana dinyatakan oleh Blanchard & Johnson (2017): *“Macroeconomic models are essential for organizing our thoughts, testing our hypotheses, and grounding our policies in structured reasoning and empirical data.”*

Dengan memanfaatkan kekuatan model ini, perencanaan pembangunan dapat merancang kebijakan yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan mewujudkan tujuan pembangunan bukan hanya sebagai visi, tetapi sebagai realitas yang dapat diukur dan dicapai.

BAB 5

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL

“Tidak ada bangsa yang maju secara kebetulan di balik setiap kemajuan, ada rencana besar yang dipikirkan, dirancang, dan dijalankan dengan visi jangka panjang.”

Bab ini membawa pembaca menyelami jantung strategi pembangunan suatu negara: bagaimana visi masa depan dijabarkan menjadi kebijakan konkret melalui perencanaan nasional yang sistematis. Di tengah tantangan global, ketimpangan domestik, dan tekanan ekologis, Indonesia membutuhkan perencanaan pembangunan yang tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui lembaga-lembaga kunci dan dokumen strategis seperti RPJPN dan RPJMN, kita akan menelusuri bagaimana negara merumuskan masa depannya dari atas meja rencana hingga ke lapangan pembangunan.

A. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional merupakan proses sistematis, terencana, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh negara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh, baik dalam aspek ekonomi, sosial, lingkungan, maupun kelembagaan. Dalam konteks Indonesia, pembangunan nasional tidak hanya dimaknai sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup

dimensi keadilan sosial, tata kelola pemerintahan yang baik, pelestarian lingkungan hidup, serta penguatan ketahanan nasional. Hal ini mencerminkan paradigma pembangunan yang holistik dan transformatif, sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan berbagai dokumen perencanaan jangka panjang (Bappenas, 2020).

Strategi pembangunan nasional Indonesia dirancang berdasarkan visi jangka panjang negara, yakni “*Indonesia Emas 2045*”, yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju dengan ekonomi besar dan masyarakat sejahtera pada satu abad kemerdekaannya. Visi ini dijabarkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang menetapkan prioritas sektoral, lintas wilayah, dan lintas isu berdasarkan dinamika global dan domestik (Bappenas, 2023).

Beberapa prinsip strategis utama yang mendasari kebijakan pembangunan nasional Indonesia meliputi:

1. Pertumbuhan inklusif dan berkeadilan, mengacu pada proses pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada ekspansi *output* nasional, tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan tersebut tersebar secara merata di seluruh lapisan masyarakat dan wilayah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antardaerah, menanggulangi kemiskinan secara struktural, serta memberdayakan kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin melalui strategi yang bersifat *pro-poor* dan *pro-growth* (Todaro & Smith, 2020).
2. Pembangunan berkelanjutan, merupakan pendekatan yang menekankan integrasi dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap tahapan perumusan dan

implementasi kebijakan publik. Prinsip ini selaras dengan Agenda 2030 dan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang telah diadopsi secara resmi oleh Indonesia sebagai kerangka pembangunan jangka panjang yang inklusif dan berwawasan lingkungan (UNDP Indonesia, 2022).

3. Ketahanan ekonomi. Dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional, ketahanan ekonomi menjadi salah satu pilar utama yang harus diwujudkan secara sistematis. Ketahanan ini mencakup kemampuan negara untuk menghadapi dan merespons berbagai gejolak eksternal, baik berupa krisis keuangan global, disrupsi rantai pasok, hingga perubahan iklim. Untuk itu, strategi yang diterapkan meliputi diversifikasi sektor-sektor produktif guna mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu, penguatan basis industri nasional agar mampu bersaing secara global, serta pencapaian kemandirian dalam penyediaan pangan dan energi sebagai kebutuhan dasar strategis. Tak kalah penting, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga menjadi prasyarat untuk menjaga daya dukung lingkungan dalam jangka panjang. Keseluruhan pendekatan ini merefleksikan arah pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang tangguh dan resilien (World Bank, 2021).
4. Peningkatan daya saing dan inovasi. Peningkatan daya saing dan inovasi menjadi elemen krusial dalam perencanaan pembangunan modern yang berorientasi pada nilai tambah dan keberlanjutan jangka panjang. Strategi ini menitikberatkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan yang merata dan relevan dengan kebutuhan zaman,

pengembangan kapasitas riset dan teknologi, serta pembentukan ekosistem inovasi yang mendukung kreativitas dan kewirausahaan. Selain itu, akselerasi transformasi digital menjadi kunci dalam mendorong efisiensi, transparansi, dan produktivitas di berbagai sektor ekonomi. Dukungan terhadap sektor ekonomi kreatif juga dipandang strategis untuk membuka peluang kerja baru dan memperluas basis ekonomi nasional yang berbasis pengetahuan. Seluruh upaya ini bertujuan untuk meningkatkan posisi daya saing Indonesia dalam lanskap ekonomi global yang semakin kompetitif dan dinamis (WEF, 2023).

Pemerintah Indonesia juga menetapkan *green economy* dan *net-zero emission* sebagai orientasi jangka panjang, dengan mengintegrasikan kebijakan pembangunan rendah karbon (*Low Carbon Development Initiative/LCDI*) ke dalam dokumen perencanaan nasional. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pembangunan nasional Indonesia bukan hanya bertujuan mengejar indikator pertumbuhan, tetapi juga menjamin keberlanjutan lintas generasi (Bappenas & WRI Indonesia, 2021).

Strategi pembangunan nasional Indonesia bersifat dinamis dan adaptif, mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, perubahan iklim, ketidakpastian geopolitik, serta dinamika sosial-ekonomi global. Oleh karena itu, proses perencanaan tidak bersifat top-down semata, tetapi juga mengakomodasi pendekatan partisipatif, inklusif, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*), guna memastikan relevansi dan efektivitas kebijakan pembangunan dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang (Dabla-Norris et al., 2020).

B. Lembaga dan Proses Penyusunan Rencana Pembangunan

Perencanaan pembangunan nasional merupakan tulang punggung pengelolaan kebijakan publik yang sistematis dan terstruktur dalam mencapai tujuan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang. Di Indonesia, sistem perencanaan pembangunan nasional diatur secara hukum melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-undang ini menjadi fondasi normatif bagi penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah.

SPPN menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus dilaksanakan secara terpadu, terbuka, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan. Perencanaan juga harus menggabungkan pendekatan *top-down* dan *bottom-up* secara simultan, untuk memastikan sinergi antara arahan strategis nasional dan kebutuhan nyata di tingkat akar rumput (Bappenas, 2020).

Lembaga-Lembaga Terkait dalam Penyusunan Rencana Pembangunan:

1. **Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)**
Sebagai institusi teknokratis utama dalam perencanaan, Bappenas memiliki mandat strategis dalam menyusun dan mengkoordinasikan rancangan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), serta RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tahunan. Selain itu, Bappenas bertugas menyelaraskan perencanaan lintas sektor dan wilayah, mengintegrasikan kebijakan nasional

dengan komitmen global (seperti SDGs), serta memfasilitasi proses evaluasi kebijakan (Bappenas, 2023).

2. Kementerian/Lembaga (K/L)
Setiap kementerian dan lembaga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merujuk pada RPJMN. Renstra ini menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sektoral, serta dasar penyusunan Rencana Kerja K/L (Renja-K/L) dan penganggaran berbasis kinerja.
3. Pemerintah Daerah
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pemerintah daerah menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang wajib selaras dengan RPJMN. Perencanaan di tingkat daerah juga diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan yang menjadi acuan penyusunan APBD.
4. *DPR dan DPRD*
Lembaga legislatif memiliki fungsi dalam pembahasan dan pengesahan rencana pembangunan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan dan penggunaan anggaran. Hal ini merupakan perwujudan prinsip check and balance dalam tata kelola pembangunan (Law No. 17/2003 tentang Keuangan Negara).

Proses Penyusunan Rencana Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan dalam beberapa tahapan utama, sebagai berikut:

1. *Perumusan arah dan tujuan nasional* merupakan pondasi utama dalam perencanaan pembangunan, yang berfungsi sebagai kompas strategis bagi seluruh kebijakan dan program pemerintah. Arah ini umumnya disusun berdasarkan visi dan misi Presiden terpilih, yang mencerminkan mandat politik dari rakyat serta tekad

untuk membawa bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Selain itu, arah pembangunan nasional juga diselaraskan dengan aspirasi pembangunan jangka panjang bangsa, seperti yang tertuang dalam dokumen visi Indonesia 2045 atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan merumuskan arah dan tujuan secara jelas, perencanaan pembangunan dapat memiliki orientasi yang kohesif, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan pedoman bagi koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam mencapai cita-cita nasional.

2. *Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)* merupakan langkah strategis dalam menetapkan visi pembangunan nasional dengan cakupan waktu 20 tahun. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi perumusan rencana pembangunan jangka menengah dan pendek, sekaligus menjadi kerangka makro yang menjabarkan arah kebijakan nasional lintas dekade. RPJPN menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan strategis yang bersifat menyeluruh dan berjangka panjang, mencakup dimensi ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks ini, RPJPN tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen konsensus nasional yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat, tantangan global, dan dinamika domestik dalam suatu peta jalan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
3. *Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)* dilakukan setiap lima tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJMN mengoperasionalkan visi dan arah strategis jangka panjang ke dalam agenda pembangunan prioritas, indikator kinerja utama, serta

program-program sektoral dan lintas sektor. Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah selama masa jabatan Presiden, sekaligus menjadi instrumen koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. RPJMN juga mencerminkan respons terhadap tantangan pembangunan terkini dan komitmen terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional dan global, seperti Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan demikian, RPJMN berfungsi sebagai jembatan strategis antara visi jangka panjang dan pelaksanaan pembangunan yang terukur, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi.

4. *Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)* dilakukan setiap tahun sebagai dokumen perencanaan tahunan nasional yang menjabarkan secara teknis agenda dan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RKP menjadi landasan utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta memuat program, kegiatan, dan kebutuhan pendanaan untuk mencapai target pembangunan dalam satu tahun fiskal. Proses penyusunan RKP dilakukan secara partisipatif melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), guna memastikan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah, serta keterlibatan pemangku kepentingan. Dengan demikian, RKP berperan penting dalam menjamin kesinambungan, konsistensi, dan akuntabilitas kebijakan pembangunan nasional secara tahunan.
5. *Penyelarasan perencanaan sektoral dan daerah* merupakan proses kunci dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk memastikan

integrasi antara prioritas pembangunan nasional, sektoral, dan kewilayahan. Proses ini dilaksanakan melalui mekanisme *Musyawarah Perencanaan Pembangunan* (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Musrenbang berfungsi sebagai forum partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil, guna merumuskan dan menyepakati usulan program serta kegiatan pembangunan yang relevan dengan kebutuhan lokal dan konsisten dengan arah kebijakan nasional. Dengan demikian, Musrenbang menjadi instrumen penting dalam mewujudkan perencanaan yang inklusif, responsif, dan sinkron antara pusat dan daerah.

6. *Monitoring dan evaluasi berkelanjutan* merupakan proses sistematis yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengukur capaian indikator pembangunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Proses ini berfungsi untuk mengidentifikasi kemajuan, kendala, serta dampak pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar penting untuk merekomendasikan perbaikan kebijakan, penyesuaian strategi, dan optimalisasi implementasi demi pencapaian tujuan pembangunan secara efektif dan efisien (OECD, 2020).

Perencanaan pembangunan bukan hanya domain pemerintah semata, melainkan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, dan kelompok rentan melalui forum konsultasi publik dan *stakeholder engagement*. Keterlibatan multipihak ini memperkuat legitimasi sosial dan relevansi kebijakan, sekaligus mendorong terciptanya *good governance*

dan pembangunan yang berbasis kebutuhan nyata masyarakat (UNDP, 2022).

Dengan demikian, sistem dan proses perencanaan pembangunan nasional Indonesia mencerminkan upaya kolektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pembangunan yang terstruktur, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika zaman.

C. Studi Kasus: Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJP & RPJM)

Untuk memahami secara konkret bagaimana strategi pembangunan nasional dijalankan, penting menelaah implementasi perencanaan jangka panjang dan menengah dalam bentuk dokumen resmi negara. Studi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) memberikan gambaran holistik mengenai konsistensi, arah kebijakan, dan respons negara terhadap tantangan yang dinamis sepanjang waktu.

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025

RPJPN 2005–2025 merupakan peta jalan pembangunan jangka panjang Indonesia selama dua dekade. Dokumen ini disusun sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuan utamanya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, dengan menekankan prinsip pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, dan penguatan jati diri bangsa (Bappenas, 2005).

RPJPN ini membagi proses pembangunan nasional ke dalam empat tahap RPJMN lima tahunan:

- a. *RPJMN I (2005–2009)*: Pemulihan dan penguatan fondasi demokrasi serta stabilitas ekonomi pasca krisis multidimensi 1998. *RPJMN I (2005–2009)* difokuskan pada pemulihan dan penguatan fondasi demokrasi serta stabilitas ekonomi nasional pasca krisis multidimensi yang melanda Indonesia sejak 1998. Prioritas utama dalam periode ini adalah memperkokoh tata kelola pemerintahan, memperbaiki kondisi makroekonomi, serta membangun kembali kepercayaan publik dan investor untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
- b. *RPJMN II (2010–2014)*: Percepatan pembangunan infrastruktur dan institusi menuju kemandirian nasional. *RPJMN II (2010–2014)* berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur fisik dan penguatan institusi sebagai fondasi utama untuk mencapai kemandirian nasional. Dalam periode ini, pemerintah menitikberatkan pembangunan jalan, pelabuhan, energi, serta fasilitas publik lainnya yang strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Selain itu, reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global.
- c. *RPJMN III (2015–2019)*: Penguatan daya saing dan pemerataan hasil pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan. *RPJMN III (2015–2019)* menitikberatkan pada penguatan daya saing nasional sekaligus memastikan pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Fokus utama periode ini adalah

meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, memperkuat sektor industri strategis, serta mendorong inovasi dan teknologi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama dengan memperluas akses terhadap layanan sosial dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, serta mengurangi kesenjangan antar daerah dan kelompok sosial. Program-program yang dilaksanakan bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

- d. *RPJMN IV (2020–2024)*: Peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi, dan penguatan ketahanan nasional. RPJMN IV (2020–2024) berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan dan daya saing nasional di era globalisasi. Transformasi ekonomi diarahkan pada diversifikasi sektor produktif, pengembangan ekonomi digital, serta peningkatan nilai tambah industri melalui inovasi dan teknologi. Selain itu, penguatan ketahanan nasional menjadi aspek krusial yang mencakup ketahanan pangan, energi, serta sistem kesehatan, terutama di tengah tantangan pandemi COVID-19 dan ketidakpastian ekonomi global. Perencanaan ini menekankan sinergi antar sektor dan wilayah, serta inklusivitas sosial sebagai kunci dalam membangun Indonesia yang lebih tangguh dan berdaya saing.

RPJPN memang berfungsi tidak hanya sebagai visi jangka panjang, tetapi juga sebagai kerangka kerja yang mengintegrasikan arah kebijakan sektoral dan indikator

makro yang terukur. Hal ini memungkinkan evaluasi perkembangan pembangunan secara berkelanjutan dan komprehensif sepanjang waktu, sehingga setiap tahap pembangunan dapat disesuaikan untuk mencapai tujuan nasional secara efektif (Bappenas, 2020).

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024

RPJMN 2020–2024 merupakan tahapan akhir dari RPJPN 2005–2025. Dokumen ini disusun berdasarkan visi Presiden Joko Widodo yaitu *“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*, yang kemudian dijabarkan dalam tujuh agenda pembangunan prioritas nasional:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Fokus pada peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, dan keterampilan agar tenaga kerja Indonesia lebih kompeten dan adaptif menghadapi perkembangan teknologi dan pasar global.
- b. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan
Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur fisik dan digital di seluruh wilayah Indonesia, untuk mendukung konektivitas, produktivitas, dan akses layanan dasar.
- c. Penyederhanaan regulasi dan debirokratisasi
Mengurangi birokrasi yang rumit dan regulasi yang berbelit untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
- d. Reformasi birokrasi dan tata kelola
Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas aparatur pemerintahan, dengan fokus pada transparansi, anti-korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

- e. Transformasi ekonomi menuju industri berbasis nilai tambah
Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan industri manufaktur dan jasa bernilai tambah tinggi, serta memperkuat ekosistem inovasi dan kewirausahaan.
- f. Penguatan ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat
Mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat inklusi sosial agar pembangunan berdampak luas dan adil.
- g. Pemantapan stabilitas keamanan dan pertahanan negara
Memperkuat kapasitas pertahanan dan keamanan nasional untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan investasi.

Dokumen ini juga memperkuat integrasi antara perencanaan nasional dan global, dengan mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam setiap sasaran strategis. Penekanan khusus diberikan pada respons terhadap pandemi COVID-19, melalui kebijakan pemulihan ekonomi nasional, penguatan sistem kesehatan, dan digitalisasi pelayanan publik. Dengan demikian, RPJMN tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap tantangan kontemporer (UNDP, 2021).

Perencanaan pembangunan nasional merupakan proses intelektual, politis, dan teknokratis yang tidak semata bersifat administratif, tetapi sarat dengan makna strategis bagi keberlanjutan bangsa. Melalui pendekatan jangka panjang dan menengah yang sistematis seperti RPJP dan RPJM, negara dapat memastikan kesinambungan arah pembangunan lintas rezim pemerintahan, sekaligus merespons tantangan-tantangan baru secara adaptif.

Kekuatan perencanaan tidak hanya terletak pada keakuratan proyeksi dan indikatornya, tetapi juga pada kualitas partisipasi, integritas lembaga perencana, serta kemampuan implementasi kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, kemampuan memahami, menelaah, dan mengkritisi dokumen perencanaan menjadi kompetensi yang vital bagi para akademisi, birokrat, dan warga negara yang berkomitmen pada masa depan Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB 6

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Pembangunan nasional yang efektif dan berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari kemajuan yang merata di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah yang selama ini berada di pinggiran arus pertumbuhan ekonomi nasional. Ketimpangan antar wilayah bukan hanya tantangan teknis, melainkan juga persoalan keadilan sosial dan integrasi nasional. Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi daerah memperoleh urgensinya sebagai strategi fundamental untuk memperkuat struktur ekonomi nasional dari bawah dengan menjadikan daerah bukan sekadar penerima kebijakan, tetapi motor penggerak pertumbuhan yang berbasis pada kekuatan dan keunikan lokal.

Lebih dari sekadar instrumen ekonomi, pembangunan daerah merupakan jalan menuju terciptanya keadilan spasial dan inklusi ekonomi, di mana setiap wilayah memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi. Dengan memberdayakan potensi lokal, pembangunan ekonomi daerah juga menjadi wadah subur bagi lahirnya inovasi yang kontekstual, kemandirian ekonomi yang berakar dan penguatan identitas sosial budaya sebagai bagian dari daya saing nasional.

Dalam era otonomi daerah, perencanaan pembangunan ekonomi tidak lagi berpola sentralistik. Sebaliknya, ia menempatkan desentralisasi kewenangan, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan potensi unggulan lokal sebagai

pilar utama dalam formulasi kebijakan. Peran pemerintah daerah kini dituntut untuk lebih proaktif, inovatif, dan kolaboratif dalam merancang strategi pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Oleh karena itu, memahami prinsip-prinsip dasar, pendekatan-pendekatan strategis, serta dinamika kelembagaan dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi langkah yang tak terelakkan. Hal ini penting bukan hanya untuk memastikan pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif, tetapi juga untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan secara manfaat. Hanya dengan pendekatan semacam inilah, cita-cita Indonesia maju yang berakar pada kekuatan daerah dapat benar-benar terwujud.

A. Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan fondasi strategis bagi terwujudnya pembangunan nasional yang adil, merata, dan berkelanjutan. Ia bukan sekadar proses teknokratis dalam menyusun dokumen administratif, tetapi sebuah upaya kolektif yang mencerminkan visi bersama tentang masa depan wilayah dibangun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat serta potensi lokal yang autentik dan berdaya saing. Di dalamnya terkandung harapan untuk menjadikan setiap daerah sebagai aktor pembangunan yang mampu mengangkat martabat sosial-ekonomi masyarakatnya secara mandiri dan berkelanjutan.

Lebih jauh, perencanaan daerah haruslah berpijak pada prinsip-prinsip partisipatif, integratif, transparan, responsif, dan akuntabel. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa pembangunan bukanlah monopoli pemerintah semata, melainkan hasil dari proses dialog, kerja sama, dan

kepercayaan antara seluruh elemen bangsa—rakyat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Dalam kerangka inilah, perencanaan menjadi alat transformasi yang tidak hanya menata ruang dan anggaran, tetapi juga menata harapan, relasi sosial, dan arah perubahan yang dikehendaki bersama.

Dengan demikian, membangun daerah tidak cukup dengan pendekatan birokratis yang terpusat, melainkan menuntut sebuah tata kelola pembangunan yang berorientasi pada solusi lokal, berbasis data dan aspirasi, serta mampu menghadirkan inovasi kebijakan yang menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Di sinilah letak esensi dari perencanaan pembangunan daerah sebagai jembatan menuju pembangunan nasional yang lebih berkeadilan dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam praktiknya, berbagai pendekatan perencanaan digunakan secara sinergis dan saling melengkapi guna memastikan bahwa proses pembangunan tidak hanya relevan dengan kebutuhan dan tantangan lokal yang kompleks, tetapi juga tetap sejalan dengan visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Pendekatan ini mencerminkan pentingnya keseimbangan antara kebijakan makro yang terstruktur dan fleksibilitas mikro yang adaptif terhadap dinamika wilayah.

Dengan menggabungkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan strategis, perencanaan pembangunan menjadi sebuah proses dinamis yang mampu merespons keragaman konteks lokal, sekaligus menjaga konsistensi terhadap kerangka pembangunan jangka panjang nasional. Sinergi antara pihak antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa perencanaan tidak hanya bersifat normatif di atas kertas, tetapi juga aplikatif dan berdampak nyata di lapangan.

Di antara pendekatan yang lazim diterapkan adalah:

a. *Pendekatan teknokratis*

Pendekatan teknokratis merupakan salah satu pilar utama dalam perencanaan pembangunan modern, di mana setiap keputusan dan kebijakan didasarkan pada data empirik, riset ilmiah, serta proyeksi rasional yang terukur. Pendekatan ini menempatkan kebijakan publik dalam kerangka evidence-based policy, yaitu kebijakan yang disusun dan dijalankan berdasarkan bukti, bukan sekadar asumsi atau tekanan politis sesaat. Seperti dijelaskan oleh Rasyid (2020), pendekatan teknokratis menjadikan proses perencanaan sebagai aktivitas analitis yang mengandalkan instrumen ilmiah dan prediksi jangka panjang untuk menghasilkan kebijakan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

b. *Pendekatan partisipatif*

Pendekatan partisipatif menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses perencanaan pembangunan, bukan sekadar objek dari kebijakan. Pendekatan ini mengedepankan keterlibatan aktif warga dalam berbagai tahap perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan prioritas, hingga penyusunan rencana aksi. Melalui partisipasi yang bermakna, perencanaan menjadi lebih inklusif, mencerminkan kebutuhan riil di lapangan, serta memiliki legitimasi sosial yang kuat karena disusun berdasarkan aspirasi dan pengalaman langsung masyarakat. Saragih (2019) menekankan bahwa partisipasi publik yang otentik tidak hanya memperkuat akuntabilitas kebijakan, tetapi juga membangun rasa memiliki (*sense of ownership*) yang penting dalam keberhasilan implementasi pembangunan di tingkat lokal.

c. *Pendekatan politis*

Pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan bertumpu pada visi, misi, dan agenda strategis kepala daerah terpilih yang memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui proses demokrasi. Meskipun kerap dianggap sarat dengan muatan kepentingan politik, pendekatan ini memiliki nilai penting dalam memastikan adanya arah kepemimpinan yang visioner, konsistensi kebijakan, serta dorongan kuat untuk pencapaian hasil nyata (*result-oriented*). Kepemimpinan politik yang berpihak pada kepentingan publik dapat menjadi katalisator perubahan, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan mendorong implementasi program yang selaras dengan aspirasi konstituen. Dalam konteks ini, pendekatan politis yang sehat bukanlah hambatan bagi teknokrasi dan partisipasi, melainkan penggerak utama yang menyatukan visi pembangunan dengan legitimasi politik (Wicaksono, 2021).

d. *Pendekatan top-down dan bottom-up*

Pendekatan *top-down* dan *bottom-up* merupakan dua arus utama dalam perencanaan pembangunan yang idealnya tidak dipertentangkan, tetapi disinergikan secara harmonis. Sinergi ini diwujudkan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017, yang menjadi forum strategis untuk menjembatani komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, terjadi dialog konstruktif antara aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput (*bottom-up*) dengan kebijakan makro dan arahan strategis dari pemerintah pusat (*top-down*). Pendekatan kombinatorik ini memungkinkan perencanaan yang tidak hanya teknokratis dan terarah, tetapi juga kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Dengan demikian, kebijakan

yang dihasilkan memiliki akar sosial yang kuat, sekaligus tetap berada dalam koridor rencana pembangunan jangka menengah dan panjang nasional. Integrasi dua pendekatan ini juga menjadi cerminan dari tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, inklusif, dan demokratis.

Tujuan utama dari penerapan berbagai pendekatan dalam perencanaan pembangunan baik teknokratis, partisipatif, politis, maupun integratif antara top-down dan bottom-up adalah untuk menciptakan sinergi yang produktif antara kebutuhan riil masyarakat, arah kebijakan daerah, dan strategi pembangunan nasional. Sinergi ini diharapkan mampu menghasilkan rencana pembangunan yang tidak hanya relevan dan kontekstual, tetapi juga memiliki daya guna tinggi dalam menjawab tantangan serta memaksimalkan potensi di setiap wilayah.

Dalam kerangka tersebut, perencanaan pembangunan daerah tidak lagi semata-mata dipahami sebagai instrumen teknis administratif, melainkan sebagai wahana strategis untuk membangun harapan kolektif, memperkuat kohesi sosial antar aktor pembangunan, serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap proses pembangunan itu sendiri. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan inklusif, perencanaan menjadi kunci untuk menghadirkan pembangunan yang lebih berkeadilan, berorientasi jangka panjang, dan berkelanjutan baik secara ekonomi, sosial, maupun ekologis.

B. Peran Pemerintah Daerah dan Otonomi

Dalam kerangka desentralisasi fiskal dan administratif, era otonomi daerah menandai sebuah perubahan paradigma mendasar dalam pembangunan ekonomi Indonesia dari pendekatan yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi

model pembangunan yang menekankan pada pemberdayaan daerah sebagai motor utama pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Transformasi ini tidak hanya berdampak pada tata kelola pemerintahan, tetapi juga mengubah cara pandang terhadap peran daerah dalam mendesain masa depan pembangunan yang lebih kontekstual dan berakar pada kekuatan lokal.

Payung hukum utama dari desentralisasi ini adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam bingkai otonomi yang bertanggung jawab. Kewenangan ini mencakup berbagai sektor strategis seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, dan tata ruang, yang harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan karakteristik lokal masing-masing wilayah. Hal ini menciptakan ruang bagi munculnya inovasi daerah, peningkatan efektivitas pelayanan publik, serta penguatan kapasitas lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, otonomi daerah tidak hanya menjadi kerangka kelembagaan, tetapi juga menjadi wahana strategis dalam membangun kemandirian fiskal, demokratisasi pembangunan, dan keseimbangan regional. Ketika dikelola secara bijak, otonomi dapat menjembatani disparitas antar wilayah dan memperkuat fondasi pembangunan nasional dari bawah, sejalan dengan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbasis pada keberagaman dan keadilan sosial.

Peran pemerintah daerah dalam kerangka otonomi tidak lagi terbatas pada fungsi administratif semata, melainkan telah berkembang menjadi peran strategis dan transformatif dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dan manusia secara efisien, adil, dan berkelanjutan, sambil memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan mencerminkan kebutuhan lokal dan mampu menjawab tantangan global.

Lebih dari itu, pemerintah daerah dituntut untuk menyusun kebijakan ekonomi yang adaptif, berbasis pada data dan potensi wilayah, serta mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pertumbuhan usaha lokal maupun nasional. Dalam hal ini, pemerintah daerah juga memegang peran penting dalam menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang responsif, transparan, dan berorientasi pada hasil (*output-based governance*), yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas demokrasi lokal. Widodo (2021) menekankan bahwa keberhasilan daerah tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan dalam mengelola pembangunan secara inovatif dan akuntabel.

Lebih dari sekadar pelaksana kebijakan, pemerintah daerah menjadi aktor kunci yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui beberapa langkah penting. Pertama, pemerintah daerah bertugas menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif dengan cara menyederhanakan regulasi yang berbelit, membangun infrastruktur dasar yang memadai, serta menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Langkah ini sangat vital untuk menarik investor, mempercepat aktivitas ekonomi, dan membuka lapangan kerja baru di wilayahnya.

Kedua, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal. Hal ini dapat diwujudkan melalui kolaborasi sinergis dengan sektor pendidikan, industri, dan lembaga pelatihan,

yang secara bersama-sama menyiapkan sumber daya manusia yang terampil, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan mampu bersaing di pasar kerja yang terus berubah.

Ketiga, pemerintah daerah juga berperan aktif dalam memfasilitasi pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi. Sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi rakyat dan penggerak utama roda ekonomi lokal, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pemerataan kesejahteraan. Dukungan berupa akses permodalan, pelatihan, pemasaran, dan inovasi produk menjadi prioritas agar UMKM dan koperasi mampu tumbuh kuat dan berkelanjutan.

Dengan mengambil peran-peran strategis tersebut, pemerintah daerah bukan hanya sebagai penyelenggara administratif, tetapi juga sebagai penggerak utama transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berbagai inovasi kebijakan yang lahir dari pemerintah daerah seperti pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan industri terpadu, serta sentra produksi unggulan daerah yang berbasis pada klaster pertanian dan perikanan menjadi bukti konkret bagaimana otonomi daerah dapat difungsikan sebagai instrumen strategis untuk mengakselerasi pembangunan yang berlandaskan keunggulan lokal (World Bank, 2020; Bappenas, 2022). Inisiatif-inisiatif tersebut tidak hanya memperkuat basis ekonomi daerah, tetapi juga memperlihatkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber daya secara inovatif dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, otonomi daerah melampaui sekadar pemindahan kewenangan dari pusat ke daerah. Lebih jauh, otonomi mendorong lahirnya lokalitas yang cerdas (*smart locality*) suatu konsep pembangunan yang memadukan

teknologi, inovasi, dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang dinamis dan adaptif. Selain itu, otonomi juga memperkuat peran kepemimpinan inovatif di tingkat lokal, yang mampu merumuskan dan mengimplementasikan strategi pembangunan yang kontekstual dan responsif terhadap tantangan global maupun kebutuhan masyarakat setempat.

Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan perannya dengan etika kepemimpinan publik yang kuat, kompetensi teknokratik yang mumpuni, serta komitmen yang teguh terhadap pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepemimpinan yang berintegritas dan profesional menjadi fondasi utama untuk mengelola sumber daya daerah secara efektif dan berkelanjutan.

Di tengah dinamika era modern yang ditandai dengan kompetisi sekaligus kolaborasi antardaerah, kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi muncul sebagai modal utama dalam menatap masa depan. Daerah yang mampu menggabungkan daya inovasi dengan inklusivitas sosial tidak hanya akan tumbuh menjadi wilayah yang maju dan mandiri, tetapi juga mampu bersaing secara kompetitif di tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penerapan teknologi dan pendekatan kreatif menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

C. Potensi Lokal dan Penguatan Ekonomi Wilayah

Pembangunan ekonomi wilayah yang berkelanjutan menuntut penerapan pendekatan yang berbasis pada potensi lokal sebagai fondasi utama. Konsep ini menekankan pentingnya mengidentifikasi dan menggali kekuatan unik serta sumber daya khas yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang bersifat sumber daya alam, budaya, sosial, maupun modal manusia. Potensi-potensi tersebut, jika dikelola dengan strategi yang tepat dan berkelanjutan, mampu menjadi pilar utama dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah, memperkuat daya saing wilayah di tingkat nasional maupun internasional, serta menciptakan kesejahteraan yang inklusif dan berkeadilan.

Pengelolaan potensi lokal secara optimal juga berarti memadukan antara inovasi, partisipasi masyarakat, dan kebijakan yang kontekstual, sehingga pembangunan ekonomi tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan kuantitatif semata, tetapi juga memperhatikan aspek kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, pendekatan berbasis potensi lokal menjadi strategi krusial dalam mewujudkan wilayah yang resilien dan adaptif menghadapi berbagai tantangan global serta mampu berkontribusi secara signifikan pada pembangunan nasional.

1. Konsep Potensi Lokal dan Ekonomi Wilayah

Potensi lokal merupakan keseluruhan sumber daya dan kekuatan yang melekat pada suatu wilayah, yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sebagaimana dijelaskan oleh Adisasmita (2006), potensi lokal terdiri dari tiga komponen utama, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kelembagaan lokal. Ketiga elemen ini tidak berdiri sendiri, melainkan harus dikelola secara sinergis dan

harmonis agar dapat menjadi modal dasar yang kuat dalam mendorong pembangunan ekonomi wilayah. Pengelolaan yang terintegrasi dari ketiga komponen tersebut akan menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan, membuka jalan bagi terciptanya daerah yang mandiri, kompetitif, dan berdaya saing di kancah nasional maupun global.

Di sisi lain, ekonomi wilayah merupakan cabang ilmu ekonomi yang secara khusus mempelajari dinamika pertumbuhan ekonomi dalam ruang geografis tertentu. Menurut Tarigan (2005), kajian ekonomi wilayah tidak hanya terfokus pada aktivitas ekonomi yang tersebar di wilayah tersebut, tetapi juga melibatkan analisis mengenai distribusi aktivitas ekonomi serta pengembangan daya saing regional. Dengan pemahaman ini, ekonomi wilayah menjadi landasan penting untuk merancang strategi pembangunan yang mampu memaksimalkan potensi lokal secara optimal. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi daerah, tetapi juga mendorong terwujudnya pemerataan kesejahteraan di berbagai lapisan masyarakat dan wilayah, sehingga pembangunan ekonomi menjadi inklusif dan berkeadilan.

2. Strategi Penguatan Ekonomi Wilayah Berbasis Potensi Lokal

a. Pemetaan Potensi Wilayah

Langkah awal yang krusial dalam memperkuat ekonomi wilayah adalah melakukan pemetaan potensi lokal secara komprehensif dan sistematis. Proses ini mencakup identifikasi mendalam terhadap sektor-sektor unggulan yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan, seperti sektor agrikultur, pariwisata, perikanan, kerajinan tangan, maupun industri kreatif. Dengan pemetaan yang tepat,

daerah dapat mengenali kekuatan spesifiknya serta merumuskan strategi pembangunan yang lebih terarah dan efektif.

Sebagai contoh empiris, Husna, Noor, dan Rozikin (2013) dalam penelitian mereka di Kabupaten Gresik berhasil mengidentifikasi sejumlah sektor strategis yang dapat menjadi tulang punggung penguatan daya saing ekonomi lokal. Temuan ini menegaskan bahwa pemetaan potensi ekonomi lokal bukan sekadar langkah administratif, melainkan fondasi penting yang memungkinkan daerah memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

b. Pemberdayaan UMKM dan Kewirausahaan Lokal

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting dalam perekonomian daerah, yang berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung pemerataan kesejahteraan. Penguatan sektor UMKM dapat dilakukan melalui berbagai upaya strategis, seperti pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan kapasitas dan kreativitas pelaku usaha, digitalisasi proses bisnis untuk memperluas akses pasar, pemberian akses permodalan yang mudah dan terjangkau, serta pendampingan usaha secara berkelanjutan guna memastikan pertumbuhan yang stabil.

Penelitian oleh Suyatno dan Suryani (2022) menunjukkan bahwa pengembangan UMKM yang berbasis potensi lokal di Desa Girikerto, Sleman berhasil mendorong percepatan perekonomian desa secara signifikan. Model pengembangan ini mengintegrasikan kearifan lokal dengan inovasi modern, sehingga UMKM tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga mampu

meningkatkan kualitas produk dan daya saing di pasar yang lebih luas. Hal ini menegaskan bahwa penguatan UMKM merupakan strategi krusial dalam memperkokoh ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

c. **Infrastruktur dan Teknologi**

Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, serta jaringan internet memegang peranan krusial dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal secara menyeluruh. Infrastruktur yang memadai tidak hanya mempermudah aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka peluang baru bagi aktivitas ekonomi dan investasi di daerah. Sebagai contoh, di Desa Serang, Purbalingga, penguatan sektor pariwisata berhasil dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dasar yang terpadu, sekaligus pemanfaatan teknologi digital untuk promosi wisata secara efektif. Menurut Huda (2020), langkah ini membawa dampak positif langsung berupa peningkatan pendapatan masyarakat setempat serta pengembangan ekosistem ekonomi lokal yang lebih dinamis dan inklusif.

d. **Keterlibatan Masyarakat dan Lembaga Lokal**

Pelibatan aktif masyarakat dan lembaga lokal dalam proses pembangunan ekonomi merupakan kunci untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memberdayakan masyarakat secara nyata, tidak hanya tercipta rasa memiliki yang kuat terhadap program-program pembangunan, tetapi juga terbangun kohesi sosial yang memperkokoh solidaritas komunitas. Kondisi ini pada gilirannya meningkatkan ketahanan ekonomi lokal dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan eksternal, seperti fluktuasi pasar, bencana alam, atau dinamika sosial-politik.

Pendekatan partisipatif ini memastikan bahwa pembangunan tidak hanya tumbuh dari atas ke bawah, tetapi tumbuh dari akar rumput dengan dukungan dan aspirasi masyarakat yang terlibat secara aktif.

3. Studi Kasus Inspiratif

Kabupaten Gresik telah menunjukkan keberhasilan dalam penguatan ekonomi wilayah melalui pendekatan pengembangan berbasis data yang sistematis dan terukur. Dengan melakukan pemetaan dan analisis potensi secara mendalam, pemerintah daerah mampu mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang memiliki daya saing tinggi, seperti industri pengolahan dan pertanian modern. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengambilan kebijakan, tetapi juga memperkuat kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya secara optimal, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Desa Girikerto, Sleman merupakan contoh inspiratif dari bagaimana pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berbasis potensi lokal dapat menjadi katalisator peningkatan ekonomi masyarakat secara nyata. Dalam studi yang dilakukan oleh Suyatno dan Suryani (2022), terungkap bahwa berbagai UMKM yang bergerak di bidang olahan makanan tradisional, batik, dan produk herbal lokal telah berhasil memperkuat fondasi ekonomi desa. Melalui pendekatan terpadu berupa pelatihan kewirausahaan, akses terhadap pembiayaan, serta pendampingan usaha secara berkelanjutan, produk-produk lokal tersebut tidak hanya mengalami peningkatan dari segi kualitas dan kuantitas, tetapi juga mampu menembus pasar yang lebih luas, baik di tingkat regional maupun nasional. Hal ini tidak hanya membuka peluang ekonomi baru, tetapi juga meningkatkan rasa bangga dan percaya diri masyarakat terhadap kearifan lokal yang

mereka miliki, sehingga memperkuat identitas ekonomi sekaligus sosial budaya desa.

Desa Serang, Purbalingga merupakan contoh keberhasilan pembangunan ekonomi lokal melalui pendekatan wisata berbasis komunitas yang inklusif dan berkelanjutan. Seperti dicatat oleh Huda (2020), inisiatif ini dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa, yang secara aktif mengintegrasikan potensi alam pegunungan dan keunikan budaya lokal ke dalam destinasi wisata yang menarik dan autentik. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung, tetapi juga mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan warisan budaya. Dengan memperkuat kapasitas kelembagaan lokal, serta memanfaatkan teknologi digital dalam promosi wisata, Desa Serang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang bertumpu pada kekuatan lokal dan semangat gotong royong mampu menghasilkan model pembangunan yang tangguh, partisipatif, dan berorientasi jangka panjang.

4. Tantangan dan Solusi

Tantangan	Solusi
Akses modal terbatas	Skema pembiayaan inklusif (KUR, BUMDes, koperasi produktif)
Kapasitas SDM rendah	Pelatihan vokasional, inkubator bisnis desa, transfer teknologi
Akses pasar dan pemasaran terbatas	Digitalisasi UMKM, <i>e-commerce</i> , kemitraan dagang dengan pelaku usaha besar
Infrastruktur belum memadai	Investasi publik dan swasta, kolaborasi multi-level pemerintah

Dengan menempatkan potensi lokal sebagai pijakan utama, penguatan ekonomi wilayah menjadi fondasi strategis bagi terwujudnya pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berbasis kekuatan internal masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap wilayah memiliki sumber daya unik yang, apabila dikelola secara tepat, dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan resilien. Melalui tahapan strategis seperti pemetaan potensi secara komprehensif, penguatan sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat, penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas dan produktivitas, serta pelibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses pembangunan, potensi lokal mampu bertransformasi menjadi keunggulan kompetitif wilayah.

Lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi dalam angka, pembangunan berbasis potensi lokal membawa dampak transformatif meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat identitas dan kearifan lokal, serta membangun rasa percaya diri kolektif dalam menatap masa depan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi daerah bukan hanya tentang mengejar pertumbuhan, tetapi tentang mewujudkan kesejahteraan yang berpihak pada rakyat, dari, oleh, dan untuk wilayah itu sendiri.

D. Studi Kasus: Perencanaan Daerah Tertinggal dan Perdesaan

Perencanaan pembangunan daerah tertinggal dan perdesaan merupakan komponen krusial dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Wilayah-wilayah ini umumnya menghadapi berbagai keterbatasan struktural, mulai dari rendahnya akses terhadap infrastruktur dasar, kualitas pendidikan dan layanan kesehatan yang masih tertinggal, hingga minimnya kapasitas ekonomi dan daya saing

masyarakat lokal. Tantangan-tantangan tersebut menjadikan pendekatan pembangunan yang biasa tidak lagi memadai; diperlukan intervensi yang bersifat transformatif, adaptif, dan berakar pada kondisi riil lapangan.

Menurut Bappenas (2020), strategi pembangunan daerah tertinggal harus bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal, penguatan kelembagaan desa, dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, serta akademisi. Pendekatan ini menegaskan pentingnya menjadikan desa bukan sekadar objek dari kebijakan pembangunan, tetapi subjek aktif yang memiliki kapasitas untuk merancang, mengelola, dan mengarahkan sendiri proses pembangunan sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan aspirasi lokal.

Dengan demikian, desa memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, asalkan diberi ruang, dukungan, dan kepercayaan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Transformasi seperti ini tidak hanya akan mempercepat pengurangan kesenjangan antarwilayah, tetapi juga akan melahirkan model pembangunan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berbasis pada kekuatan rakyat.

1. Perencanaan Daerah Tertinggal: Pendekatan dan Tantangan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT, 2021) menegaskan bahwa pembangunan daerah tertinggal harus dijalankan dengan mengedepankan prinsip integrasi lintas sektor, partisipasi masyarakat yang aktif, serta keberlanjutan jangka panjang. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menempatkan desa tidak hanya sebagai satuan administratif,

tetapi sebagai entitas pemerintahan lokal yang memiliki kewenangan penuh dalam mengelola potensi dan merencanakan pembangunan berdasarkan kondisi serta aspirasi masyarakatnya sendiri.

Namun demikian, tantangan besar masih membayangi pembangunan daerah tertinggal. Di banyak wilayah, masih terjadi ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, layanan dasar, dan informasi. Selain itu, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, baik dalam hal pendidikan, keterampilan, maupun manajerial, serta minimnya infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan jaringan komunikasi, menjadi hambatan utama dalam mempercepat kemajuan wilayah-wilayah ini.

Dalam konteks ini, perencanaan pembangunan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan seragam, melainkan harus disesuaikan secara cermat dengan karakteristik sosial, geografis, budaya, dan ekonomi lokal. Seperti dijelaskan oleh Kusumastuti dan Mulyani (2021), strategi pembangunan yang efektif di daerah tertinggal adalah yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika komunitas setempat, mengutamakan dialog sosial, dan memanfaatkan kearifan lokal sebagai basis inovasi.

Dengan merancang pembangunan dari bawah (bottom-up) dan memberdayakan desa sebagai aktor utama, Indonesia tidak hanya akan mempersempit ketimpangan regional, tetapi juga menciptakan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berdaya tahan terhadap perubahan zaman.

a. Studi Kasus 1: Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wilayah yang sebelumnya dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Namun, melalui pengelolaan Dana

Desa yang terarah dan berbasis kebutuhan lokal, SBD menunjukkan transformasi positif dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu pendekatan yang menonjol adalah program padat karya tunai, di mana masyarakat dilibatkan langsung dalam pembangunan sarana dasar seperti jalan desa, embung, dan fasilitas air bersih. Program ini tidak hanya mempercepat penyediaan infrastruktur vital, tetapi juga memberikan pendapatan langsung bagi warga, yang pada akhirnya meningkatkan daya beli dan kesejahteraan rumah tangga (Kusumastuti & Mulyani, 2021).

Lebih dari sekadar pembangunan fisik, SBD juga berhasil memanfaatkan potensi budaya sebagai bagian dari strategi ekonomi lokal. Salah satu inisiatif unggulan adalah pengembangan kerajinan tenun tradisional, yang dilakukan melalui pelatihan dan pembentukan kelompok usaha yang melibatkan perempuan desa. Marlina (2022) mencatat bahwa upaya ini bukan hanya menghidupkan kembali warisan budaya yang sempat terpinggirkan, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi perempuan secara nyata. Kegiatan menenun yang sebelumnya bersifat subsisten kini berkembang menjadi ekonomi kreatif yang menghasilkan nilai tambah, memperkuat posisi perempuan dalam keluarga dan komunitas, serta membuka akses ke pasar yang lebih luas.

Pengalaman Sumba Barat Daya menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang partisipatif, dukungan kebijakan yang tepat, dan pemanfaatan potensi lokal yang terintegrasi, desa dapat menjadi pusat pertumbuhan baru yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga identitas budaya dan memperkuat struktur sosial masyarakatnya.

b. Studi Kasus 2: Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

Desa Ponggok, yang terletak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, merupakan salah satu contoh paling inspiratif dari transformasi desa tertinggal menjadi desa mandiri berbasis potensi lokal. Awalnya dikenal sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dan keterbatasan infrastruktur, Ponggok kini menjelma menjadi simbol keberhasilan pembangunan desa berbasis ekowisata dan ekonomi lokal. Kunci utama keberhasilan ini adalah pengelolaan sumber daya lokal secara strategis dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan potensi alam berupa Umbul Ponggok, sebuah mata air alami yang disulap menjadi objek wisata air unggulan dengan daya tarik unik.

Transformasi ini tidak terlepas dari peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Tirta Mandiri”, yang dikelola secara profesional dan akuntabel oleh warga desa sendiri. Irawan (2018) menegaskan bahwa keberadaan BUMDes tersebut menjadi lokomotif penggerak ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja lokal, serta menjadi sumber pendapatan asli desa yang signifikan.

Lebih lanjut, Nugroho (2020) menyoroti pentingnya kepemimpinan lokal yang inovatif, serta partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh proses perencanaan dan pengelolaan wisata desa. Sinergi antara pemerintah desa, warga, dan pelaku usaha lokal menciptakan ekosistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan manfaat.

Kini, pendapatan Desa Ponggok mencapai miliaran rupiah per tahun, yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti subsidi pendidikan, layanan kesehatan, hingga dukungan bagi petani lokal. Dengan

kemampuan fiskal yang dimiliki secara mandiri, Ponggok menunjukkan bahwa desa dapat menjadi entitas yang kuat, inovatif, dan berdaya saing tinggi jika dikelola dengan visi, integritas, dan kolaborasi.

Keberhasilan Ponggok menjadi pelajaran penting bahwa pembangunan desa berbasis potensi lokal bukan hanya mungkin, tetapi bisa menjadi pilar utama pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

c. Studi Kasus 3: Kampung Yoboi, Kabupaten Jayapura, Papua

Kampung Yoboi, yang terletak di tepi Danau Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, merupakan contoh nyata bagaimana pembangunan berbasis kearifan lokal mampu menjadi strategi efektif dalam mengatasi keterisolasian wilayah tertinggal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kampung ini dikenal luas sebagai kampung terapung penuh warna, yang memadukan keindahan alam, budaya lokal, dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan destinasi wisata berbasis komunitas.

Menurut Mandosir (2021), keberhasilan Kampung Yoboi tidak terlepas dari inisiatif warga yang memanfaatkan letak geografis kampung yang berada di atas air untuk mengembangkan konsep ekowisata dan wisata budaya. Rumah-rumah kayu yang dicat warna-warni dan jembatan apung yang membelah permukiman menjadi ikon yang menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Keunikan visual dan narasi budaya yang kuat menjadi daya tarik utama, sekaligus membangun identitas desa yang khas dan autentik.

Selain aspek estetika dan wisata, masyarakat Kampung Yoboi juga menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan dan budaya lokal dapat berjalan seiring dengan pembangunan

ekonomi. Warga tetap mempertahankan pola hidup tradisional yang selaras dengan alam, seperti penggunaan perahu untuk mobilitas, pengelolaan ikan air tawar secara tradisional, dan praktik pertanian lokal di lahan rawa.

Inisiatif pembangunan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor wisata dan ekonomi kreatif, tetapi juga memperkuat rasa bangga dan kepemilikan terhadap warisan budaya Papua. Dalam konteks ini, Kampung Yoboi menjadi representasi dari pembangunan yang tidak mengorbankan identitas lokal, tetapi justru menjadikannya sebagai aset utama untuk transformasi sosial-ekonomi.

2. Pembelajaran dan Rekomendasi Strategis

Pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan harus berpijak pada kekuatan khas wilayah masing-masing atau berbasis potensi lokal. Pendekatan ini menekankan pentingnya mengenali dan mengoptimalkan sumber daya unik yang dimiliki setiap daerah baik sumber daya alam, manusia, maupun budaya lokal sebagai fondasi utama pembangunan (Bappenas, 2020). Selain itu, penguatan kelembagaan desa menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong kemandirian ekonomi. Seperti yang ditunjukkan oleh keberhasilan BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok, kelembagaan yang dikelola secara profesional dan berorientasi pada kebutuhan warga terbukti mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa (Irawan, 2018).

Tak kalah penting, kepemimpinan lokal yang inovatif dan partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen krusial dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Pengalaman dari Desa Ponggok dan Kampung Yoboi menunjukkan bagaimana peran tokoh lokal dapat menjadi penggerak perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan,

ketika didukung oleh masyarakat yang terlibat aktif dalam proses pembangunan (Nugroho, 2020; Mandosir, 2021).

Akhirnya, pendekatan yang terintegrasi dan inklusif harus menjadi prinsip dalam perencanaan pembangunan daerah, di mana semua kelompok masyarakat termasuk perempuan dan kelompok rentan dilibatkan secara aktif. Partisipasi ini bukan hanya memperkuat legitimasi pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (Marlina, 2022). Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menjadi agenda struktural, tetapi juga gerakan kolektif untuk memperkuat kedaulatan lokal dan keadilan sosial.

Dari ketiga studi kasus yang telah diuraikan Desa Ponggok di Klaten, Kampung Yoboi di Jayapura, dan Kabupaten Sumba Barat Daya di NTT dapat ditarik benang merah bahwa keberhasilan perencanaan pembangunan di daerah tertinggal dan perdesaan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dibangun di atas fondasi elemen-elemen strategis yang saling mendukung. Pertama, pembangunan yang berhasil selalu berbasis pada potensi lokal, yakni kekuatan khas yang dimiliki oleh masing-masing wilayah, baik dalam bentuk sumber daya alam, budaya, maupun kearifan lokal (Bappenas, 2020). Potensi ini menjadi titik tolak dalam merancang strategi pembangunan yang relevan dan berkelanjutan.

Kedua, terdapat penguatan kelembagaan desa yang memainkan peran sentral dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan BUMDes “Tirta Mandiri” di Ponggok menjadi contoh nyata bagaimana kelembagaan yang kuat dapat menjadi lokomotif bagi pertumbuhan ekonomi desa (Irawan, 2018). Ketiga, faktor kepemimpinan lokal yang inovatif dan partisipasi masyarakat yang aktif terbukti menjadi pendorong utama dalam

menciptakan perubahan yang berdampak luas. Peran tokoh lokal di Yoboi dan Ponggok, yang mampu menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan, memperlihatkan pentingnya modal sosial dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian desa (Nugroho, 2020; Mandosir, 2021).

Keempat, pendekatan yang digunakan dalam perencanaan harus bersifat terintegrasi dan inklusif, melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan, dalam setiap tahapan proses pembangunan. Inklusivitas ini tidak hanya memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara adil dan merata (Marlina, 2022). Dengan mengintegrasikan keempat elemen ini, pembangunan daerah tertinggal dan pedesaan dapat menjadi wahana nyata dalam mewujudkan keadilan sosial, kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah tertinggal dan pedesaan harus berpijak pada pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik lokal, potensi wilayah, serta kebutuhan nyata masyarakat. Tidak cukup hanya dengan pendekatan administratif atau program *top-down*, tetapi harus hadir strategi yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial, budaya, dan ekonomi lokal. Studi kasus dari Sumba Barat Daya, Ponggok dan Yoboi memberikan bukti empiris bahwa kepemimpinan lokal yang visioner, kelembagaan desa yang tangguh, serta pemanfaatan budaya sebagai basis ekonomi dapat mendorong transformasi nyata di desa-desa yang semula terpinggirkan.

Ketiga contoh tersebut menunjukkan bahwa desa bukanlah objek pasif pembangunan, melainkan subjek aktif yang mampu merancang, mengelola, dan mewujudkan masa

depannya sendiri. Ketika desa diberikan ruang, kepercayaan, dan dukungan yang memadai, maka inovasi dan kemandirian akan tumbuh secara organik dari dalam. Inilah arah baru pembangunan perdesaan: berbasis potensi lokal, inklusif, dan berkelanjutan, serta mencerminkan semangat gotong royong dan kearifan lokal yang menjadi kekuatan sejati bangsa Indonesia.

BAB 7

PERENCANAAN BERBASIS PARTISIPASI DAN INKLUSI

Pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan menuntut pendekatan perencanaan yang tidak hanya efisien secara teknokratik, tetapi juga inklusif secara sosial. Dalam hal ini, perencanaan berbasis partisipasi dan inklusi menjadi kunci untuk menjamin keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan mulai dari identifikasi kebutuhan, perumusan program, hingga evaluasi pelaksanaan. Dengan melibatkan aktor lokal, kelompok rentan, serta mitra non-pemerintah, proses perencanaan menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi riil di lapangan. Friedmann (1992) menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan esensi dari demokratisasi pembangunan yang mampu memperkuat keadilan sosial dan keberlanjutan jangka panjang.

A. Pendekatan *Bottom-Up* dan *Top-Down*

Dalam praktik perencanaan pembangunan, terdapat dua pendekatan dominan yang sering diterapkan, yakni pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* menitikberatkan inisiatif dan pengambilan keputusan yang berasal dari pemerintah pusat atau otoritas formal ke tingkat daerah. Pendekatan ini memiliki keunggulan dalam hal mobilisasi sumber daya secara besar-besaran serta penyusunan kebijakan makro yang terintegrasi dan konsisten

secara nasional. Namun demikian, pendekatan ini kerap menghadapi kritik karena cenderung mengabaikan konteks lokal yang unik serta kebutuhan spesifik masyarakat di tingkat akar rumput, sehingga potensi ketidaksesuaian dan kurangnya legitimasi sosial dalam pelaksanaan kebijakan menjadi tantangan yang nyata (Agrawal, 2005).

Sebaliknya, pendekatan *bottom-up* menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses perencanaan pembangunan, di mana mereka secara langsung menentukan prioritas dan solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Chambers (1997) menekankan bahwa pendekatan ini membuka ruang partisipasi yang luas bagi warga, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap keberhasilan program pembangunan. Selain itu, pendekatan *bottom-up* memungkinkan terciptanya solusi yang lebih adaptif dan kontekstual, karena berasal langsung dari pengalaman dan kearifan lokal masyarakat setempat.

Namun, agar perencanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, kedua pendekatan tersebut idealnya dipadukan dalam suatu simbiosis yang saling melengkapi. Healey (1997) menggarisbawahi bahwa integrasi antara inisiatif warga yang aktif dan fasilitasi dari pemerintah akan menghasilkan kebijakan yang tidak hanya berakar kuat pada kebutuhan lokal, tetapi juga memiliki dukungan dan sumber daya dari negara. Dengan demikian, sinergi antara *top-down* dan *bottom-up* menjadikan perencanaan pembangunan sebagai proses yang dinamis, inklusif, dan responsif terhadap kompleksitas tantangan pembangunan di berbagai tingkatan.

B. Peran Masyarakat Sipil dan Sektor Swasta

Perencanaan pembangunan yang partisipatif tidak hanya melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat umum, tetapi juga mengikutsertakan organisasi masyarakat sipil (OMS) serta sektor swasta. OMS sering kali berfungsi sebagai jembatan penting yang menghubungkan antara negara dan warga, terutama dalam memperjuangkan hak-hak kelompok marginal yang selama ini kerap terpinggirkan dalam proses pembangunan formal. Menurut Edwards dan Hulme (1996), OMS memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kritis di masyarakat, memfasilitasi dialog publik yang konstruktif, serta menjaga agar proses pengambilan keputusan pembangunan berlangsung dengan transparan dan akuntabel. Dengan keterlibatan OMS, perencanaan pembangunan dapat menjadi lebih inklusif, responsif, dan mampu mencerminkan aspirasi seluruh lapisan masyarakat, sehingga menghasilkan kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sementara itu, sektor swasta memainkan peran strategis sebagai mitra pembangunan yang mampu menghadirkan investasi, inovasi teknologi, serta akses jaringan pasar yang luas. Dengan pengelolaan yang berlandaskan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), keterlibatan sektor swasta tidak hanya dapat mempercepat laju pembangunan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat keberlanjutan program-program sosial yang berdampak langsung pada masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Porter dan Kramer (2011), kolaborasi yang sinergis antara sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya menciptakan nilai bersama yang mampu mendorong pertumbuhan inklusif serta memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan.

Namun demikian, tercapainya sinergi yang efektif antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan sektor swasta sangat bergantung pada adanya tata kelola kolaboratif yang kokoh serta mekanisme akuntabilitas publik yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana ditegaskan oleh Ansell dan Gash (2008), kolaborasi lintas sektor hanya akan berhasil jika didukung oleh struktur yang memungkinkan dialog terbuka, pembagian peran yang jelas, serta sistem pengawasan yang memastikan setiap aktor menjalankan tanggung jawabnya secara konsisten dan berintegritas.

C. Perencanaan Responsif Gender dan Inklusif Sosial

Salah satu dimensi krusial dalam perencanaan pembangunan yang inklusif adalah kemampuan untuk merespons secara sensitif terhadap isu gender dan keragaman sosial. Pendekatan perencanaan yang bersifat netral gender kerap kali mengabaikan realitas bahwa perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok rentan lainnya menghadapi berbagai hambatan struktural yang membatasi akses mereka terhadap hak-hak dasar dan kesempatan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan yang efektif harus mengintegrasikan perspektif gender dan inklusi sosial secara sistematis agar dapat menjamin keadilan dan kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Moser (1993), responsivitas gender dalam perencanaan pembangunan berarti pengakuan terhadap perbedaan kebutuhan, peran, dan pengalaman antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menuntut penyusunan intervensi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sensitif terhadap dinamika sosial yang berpotensi memperkecil kesenjangan gender. Misalnya, dalam penyediaan infrastruktur air bersih di

desa, perencanaan tidak cukup hanya memperhatikan aspek teknis seperti kapasitas dan kualitas air, tetapi juga harus mempertimbangkan jarak tempuh dan waktu yang dibutuhkan perempuan yang selama ini menjadi pihak utama yang mengakses sumber daya tersebut sehingga intervensi tersebut benar-benar meningkatkan kualitas hidup dan meringankan beban kerja mereka.

Inklusi sosial dalam perencanaan pembangunan harus melibatkan keterlibatan aktif kelompok disabilitas dan minoritas dalam setiap forum pengambilan keputusan. Cornwall (2008) menegaskan bahwa sekadar kehadiran fisik tidaklah cukup untuk dikatakan sebagai partisipasi. Partisipasi yang sejati harus memberi ruang bagi kelompok-kelompok tersebut untuk menyuarakan pendapatnya, berperan dalam mempengaruhi keputusan, serta memastikan mereka memperoleh manfaat yang setara dari hasil pembangunan.

Perencanaan pembangunan yang efektif harus mengintegrasikan prinsip partisipasi dan inklusi sebagai pondasi utama dalam prosesnya. Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan beragam kelompok, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Sinergi antara pendekatan *bottom-up* yang berasal dari aspirasi masyarakat dan pendekatan *top-down* yang bersumber dari kebijakan pemerintah pusat menjadi kunci dalam menghasilkan perencanaan yang kontekstual dan berkelanjutan.

Selain itu, tata kelola kolaboratif dan mekanisme akuntabilitas publik yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak dapat berkontribusi secara efektif dan keputusan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan membuka ruang dialog, berbagi kekuasaan,

serta mengakui keragaman kebutuhan masyarakat, perencanaan berbasis partisipasi dan inklusi tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah serta menumbuhkan kepercayaan publik.

Ke depan, model perencanaan yang sinergis dan inklusif ini diharapkan dapat menjadi pondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

BAB 8

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Pembiayaan pembangunan merupakan komponen krusial dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional maupun daerah. Ketersediaan dana yang memadai dan pengelolaan yang transparan serta berkelanjutan menjadi landasan penting agar perencanaan pembangunan dapat diimplementasikan secara efektif. Menurut Todaro dan Smith (2015), ketersediaan sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi selain modal manusia dan kelembagaan yang kuat.

Dalam era pembangunan modern, kebutuhan akan diversifikasi sumber pembiayaan menjadi sangat penting untuk menjamin keberlanjutan dan fleksibilitas pendanaan. Sinergi antara berbagai pelaku termasuk negara, sektor swasta, dan lembaga keuangan harus terus diperkuat agar pembiayaan pembangunan dapat menjawab dinamika global dan lokal secara adaptif. Kerangka pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan ini bukan hanya memperhatikan aspek kuantitas dana, tetapi juga kualitas pengelolaan dan akuntabilitas, sehingga investasi yang dilakukan dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang optimal bagi masyarakat luas.

A. Sumber Pembiayaan: APBN/APBD, Investasi, dan Pinjaman

Sumber utama pembiayaan pembangunan di Indonesia berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang menjadi instrumen fundamental dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Kedua anggaran ini tidak hanya mencerminkan kemampuan fiskal negara, tetapi juga menjadi wujud nyata dari arah kebijakan strategis pemerintah dalam membangun fondasi sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang kokoh dan berkelanjutan.

Melalui mekanisme penganggaran tersebut, pemerintah mengalokasikan dana ke berbagai sektor prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, serta perbaikan sistem layanan kesehatan. Pendanaan yang terencana dan terukur ini menjadi penopang utama dalam mewujudkan transformasi struktural di berbagai bidang kehidupan nasional.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2023), alokasi belanja modal dalam APBN untuk sektor infrastruktur mencapai lebih dari Rp400 triliun per tahun. Angka ini bukan sekadar statistik fiskal, melainkan bukti konkret dari komitmen pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas antar wilayah, dan memastikan akses masyarakat terhadap layanan dasar yang layak dan berkualitas.

Investasi yang masif di sektor-sektor vital ini menunjukkan bahwa pembangunan bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang menciptakan keadilan sosial dan memperkuat daya saing bangsa. Dalam konteks inilah, peran APBN dan APBD menjadi sangat

strategis: sebagai motor penggerak kemajuan nasional sekaligus instrumen pemerataan hasil pembangunan agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara adil dan merata.

Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan pembangunan di Indonesia juga ditopang oleh investasi sektor swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Peran investasi swasta menjadi semakin krusial dalam konteks pembangunan nasional, karena tidak hanya menyediakan tambahan sumber daya finansial, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas produksi, serta memperluas basis ekonomi di tingkat lokal dan nasional.

Investasi swasta berkontribusi secara signifikan terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah yang memiliki potensi unggulan namun belum sepenuhnya tergarap. Dengan kehadiran sektor swasta, pemerintah dapat memperkuat sinergi pembangunan melalui skema kemitraan publik-swasta (*Public-Private Partnership/PPP*) yang mampu mempercepat realisasi berbagai proyek strategis nasional.

Menurut Porter (1990), daya tarik investasi swasta sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing. Hal ini mencakup stabilitas hukum dan politik, kepastian regulasi, ketersediaan infrastruktur yang memadai, serta kebijakan fiskal dan insentif yang mendukung produktivitas pelaku usaha. Dalam kerangka ini, peran negara bukan sekadar sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan enabler yang membuka ruang bagi pertumbuhan investasi produktif yang berkelanjutan.

Dengan demikian, investasi swasta bukan hanya pelengkap, tetapi mitra strategis dalam pembangunan nasional. Keberhasilannya sangat bergantung pada kolaborasi yang harmonis antara sektor publik dan swasta, yang didasari pada kepercayaan, transparansi, dan visi bersama untuk membangun Indonesia yang inklusif, berdaya saing, dan tangguh menghadapi tantangan global.

Sumber pembiayaan pembangunan yang juga semakin sering dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia adalah pinjaman dan hibah, baik yang berasal dari lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan *Asian Development Bank*, maupun dari institusi bilateral negara mitra. Instrumen pembiayaan ini memainkan peran penting dalam melengkapi sumber-sumber domestik, khususnya dalam menutup defisit anggaran dan mendanai proyek-proyek strategis yang memiliki dampak besar terhadap pembangunan jangka panjang.

Pinjaman dan hibah internasional tidak hanya membawa dukungan finansial, tetapi juga kerap disertai dengan transfer pengetahuan teknis, praktik manajemen terbaik, serta penguatan kelembagaan yang dapat memperkuat kapasitas nasional dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam banyak kasus, bantuan semacam ini turut berkontribusi terhadap akselerasi program prioritas pemerintah di sektor-sektor seperti energi terbarukan, pendidikan, reformasi birokrasi, dan pembangunan berkelanjutan.

Namun demikian, sebagaimana ditekankan oleh Stiglitz (2000), pemanfaatan pinjaman publik harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan keberlanjutan fiskal. Beban utang yang tidak terkontrol berisiko menekan kapasitas fiskal negara di masa depan dan membebani generasi mendatang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan

jangka pendek dan stabilitas ekonomi jangka panjang, termasuk melalui peningkatan efisiensi penggunaan dana pinjaman dan penguatan mekanisme monitoring serta evaluasi proyek.

Dengan manajemen yang bijak dan transparan, pinjaman dan hibah dapat menjadi katalisator penting bagi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan membuka akses terhadap kesempatan ekonomi yang lebih luas sekaligus mempercepat kemajuan menuju Indonesia yang lebih maju, tangguh, dan berkelanjutan.

B. Peran Lembaga Keuangan Nasional dan Internasional

Lembaga keuangan memegang peranan krusial dalam mendukung pembangunan nasional melalui penyediaan likuiditas dan pembiayaan jangka panjang. Keberadaan lembaga-lembaga ini tidak hanya penting dari sisi pendanaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjembatani kebutuhan pembangunan dengan sumber daya keuangan yang tersedia, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Di tingkat domestik, sejumlah institusi memainkan peran sentral dalam pembiayaan pembangunan. Bank Pembangunan Daerah (BPD), misalnya, menjadi motor penggerak perekonomian lokal dengan mendanai proyek-proyek infrastruktur dan sektor produktif di wilayah kerjanya. PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), sebagai badan usaha milik negara di bawah Kementerian Keuangan, dirancang khusus untuk mendukung pembiayaan infrastruktur nasional melalui skema pembiayaan inovatif, termasuk kemitraan pemerintah dan swasta (PPP). Sementara itu, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) berfokus pada pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang

menjadi tulang punggung ekonomi rakyat dan penggerak pembangunan berbasis komunitas.

Menurut Darmawan dan Riyanto (2021), BPD memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan infrastruktur dan pengembangan UMKM yang bersifat lokal. Peran ini sangat penting dalam memperkuat daya saing daerah, memperluas akses keuangan, serta menciptakan ekosistem pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Keberadaan BPD yang dekat dengan dinamika lokal memungkinkan pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan dan potensi wilayah, sehingga penyaluran pembiayaan menjadi lebih tepat sasaran dan berdampak nyata.

Dengan memperkuat peran lembaga keuangan nasional dan daerah, Indonesia dapat membangun sistem pembiayaan pembangunan yang tangguh, responsif, dan berkelanjutan. Sinergi antara kebijakan fiskal, lembaga keuangan, dan pelaku pembangunan lainnya akan menjadi kunci dalam mewujudkan transformasi struktural menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Di tingkat internasional, berbagai lembaga keuangan multilateral memainkan peran yang sangat strategis dalam mendukung agenda pembangunan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Lembaga-lembaga seperti Bank Dunia, *Asian Development Bank* (ADB), dan *Islamic Development Bank* (IsDB) tidak hanya menyediakan akses terhadap pendanaan bersuku bunga rendah, tetapi juga memberikan dukungan teknis, analisis kebijakan, dan pendampingan dalam perencanaan serta pelaksanaan proyek-proyek pembangunan berskala besar.

Fokus utama pembiayaan dari lembaga-lembaga ini umumnya diarahkan pada isu-isu pembangunan yang mendesak dan berdampak luas, seperti pengentasan

kemiskinan, adaptasi terhadap perubahan iklim, peningkatan ketahanan infrastruktur, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dalam konteks ini, dukungan internasional menjadi semakin penting mengingat tantangan pembangunan yang bersifat lintas sektoral dan kompleks, serta kebutuhan akan pembiayaan yang melampaui kapasitas fiskal nasional.

Menurut Sachs (2015), kolaborasi dengan lembaga keuangan internasional membawa nilai tambah yang signifikan. Selain menyediakan pembiayaan jangka panjang dengan skema yang lebih ringan, kerja sama ini juga memperkuat kapasitas institusi lokal melalui transfer pengetahuan, pelatihan teknis, serta penerapan praktik-praktik terbaik global yang telah terbukti berhasil di berbagai negara. Hal ini menciptakan peluang untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik dan memperkuat tata kelola pembangunan.

Dengan menjalin kemitraan yang kuat dan strategis bersama lembaga-lembaga keuangan internasional, Indonesia dapat mengakselerasi agenda transformasi nasionalnya secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Kolaborasi ini bukan sekadar transaksi finansial, melainkan bentuk solidaritas global yang berperan penting dalam menciptakan masa depan yang lebih inklusif, resilien, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Namun demikian, ketergantungan yang berlebihan pada lembaga keuangan internasional perlu diantisipasi dan diimbangi melalui penguatan kapasitas pembiayaan domestik. Kemandirian fiskal menjadi elemen krusial dalam menjaga stabilitas pembangunan nasional dan memastikan keberlanjutan program-program strategis, tanpa terlalu bergantung pada dinamika eksternal yang kerap kali tidak dapat diprediksi.

Penguatan sumber pembiayaan domestik dapat dilakukan melalui optimalisasi penerimaan negara, reformasi sistem perpajakan, peningkatan efisiensi belanja, serta pemberdayaan lembaga keuangan lokal. Selain itu, instrumen pembiayaan inovatif seperti obligasi daerah, sukuk hijau, dan dana abadi (*sovereign wealth fund*) dapat menjadi alternatif strategis untuk memperluas basis pembiayaan yang berkelanjutan dan adaptif.

Lebih dari sekadar persoalan teknis fiskal, penting pula untuk memastikan bahwa setiap proyek yang didanai baik dari sumber internasional maupun domestik dirancang dengan prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Proyek-proyek tersebut harus mampu menjawab kebutuhan nyata, memperkuat kapasitas lokal, serta memberikan nilai tambah yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dengan demikian, keseimbangan antara kemitraan global dan kemandirian nasional merupakan kunci dalam menciptakan ekosistem pembiayaan pembangunan yang resilien, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang rakyat Indonesia.

C. Strategi Pembiayaan yang Berkelanjutan

Keberlanjutan dalam pembiayaan pembangunan merujuk pada kemampuan suatu negara baik pemerintah maupun masyarakatnya untuk mendukung program-program pembangunan secara konsisten tanpa menimbulkan beban fiskal yang berlebihan bagi generasi mendatang. Konsep ini tidak hanya mencakup kecukupan sumber daya finansial, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab antar generasi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial jangka panjang.

Salah satu pendekatan strategis yang semakin mendapat perhatian dalam mewujudkan pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan adalah *blended finance*. Menurut OECD (2018), *blended finance* merupakan skema pembiayaan yang menggabungkan dana publik seperti APBN, APBD, atau hibah donor dengan modal swasta, untuk mendanai proyek-proyek pembangunan yang memiliki dampak sosial tinggi namun belum tentu menarik secara komersial. Melalui mekanisme ini, risiko investasi dapat dibagi, insentif diselaraskan, dan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan tujuan sosial yang ingin dicapai.

Pendekatan *blended finance* sangat relevan terutama untuk proyek-proyek di sektor seperti pendidikan, kesehatan, energi terbarukan, dan infrastruktur dasar di daerah tertinggal. Proyek-proyek ini sering kali menghadapi tantangan pendanaan karena tingkat pengembalian finansial yang rendah, meskipun memiliki manfaat jangka panjang yang sangat besar bagi masyarakat. Dengan adanya sinergi antara sektor publik dan swasta, proyek-proyek semacam ini tetap dapat direalisasikan, bahkan dengan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, keberlanjutan pembiayaan tidak hanya bergantung pada besarnya dana yang tersedia, tetapi juga pada inovasi dalam merancang skema pembiayaan, akuntabilitas dalam pengelolaan dana, serta kemampuan membangun kemitraan lintas sektor yang saling memperkuat. Dengan demikian, Indonesia dapat melangkah menuju model pembangunan yang tidak hanya bertumbuh, tetapi juga tangguh, inklusif, dan berorientasi pada masa depan.

Selain mengandalkan sumber pembiayaan konvensional, pemerintah juga mendorong pengembangan instrumen keuangan inovatif, seperti penerbitan obligasi hijau (*green*

bonds) dan obligasi daerah, sebagai alternatif strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan sosial. Instrumen-instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan, tetapi juga sebagai katalisator perubahan menuju model pembangunan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab secara ekologis.

Obligasi hijau, misalnya, dirancang khusus untuk membiayai proyek-proyek yang berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan, termasuk di antaranya pembangunan infrastruktur energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan limbah, serta konservasi sumber daya alam. Sementara itu, obligasi daerah memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam mengakses pasar modal guna membiayai proyek strategis yang relevan dengan kebutuhan lokal, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan pembangunan fasilitas publik berbasis inklusivitas.

Menurut Bank Indonesia (2022), mekanisme pembiayaan semacam ini sangat krusial dalam konteks transisi energi dan pembangunan rendah karbon, yang menjadi salah satu agenda prioritas global dalam menghadapi perubahan iklim. Melalui penerbitan obligasi hijau dan obligasi daerah, Indonesia tidak hanya memperluas basis pembiayaan domestik, tetapi juga menunjukkan komitmen kuat terhadap agenda pembangunan berkelanjutan dan mitigasi risiko lingkungan jangka panjang.

Pemanfaatan instrumen pasar modal yang berbasis keberlanjutan ini menandai pergeseran paradigma dalam pembiayaan pembangunan dari sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, menuju pencapaian pembangunan yang lebih inklusif, resilien, dan selaras dengan tujuan global, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Kesepakatan Paris tentang Perubahan Iklim.

Strategi penting lainnya dalam memperkuat keberlanjutan pembiayaan pembangunan adalah peningkatan rasio pajak (*tax ratio*) melalui reformasi sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan berorientasi jangka panjang. Rasio pajak yang rendah menjadi salah satu tantangan utama dalam menciptakan ruang fiskal yang memadai untuk membiayai program-program pembangunan yang semakin kompleks dan mendesak.

Reformasi perpajakan yang progresif tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk mewujudkan sistem yang mencerminkan asas keadilan sosial. Hal ini mencakup penguatan administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, pengurangan ketergantungan pada pendapatan tak berulang, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui sistem yang transparan dan akuntabel.

Seperti yang ditegaskan oleh Musgrave dan Musgrave (1989), sistem perpajakan yang dirancang secara progresif dan dilaksanakan secara transparan merupakan tulang punggung dari keberlanjutan fiskal dan kemandirian ekonomi suatu negara. Pajak bukan hanya instrumen fiskal, tetapi juga cerminan dari kontrak sosial antara negara dan warga negara di mana masyarakat berkontribusi terhadap pembangunan, dan negara berkewajiban mengelola dana tersebut untuk kesejahteraan publik secara optimal.

Dengan memperkuat sistem perpajakan nasional, Indonesia dapat meningkatkan kapasitas fiskal domestik secara signifikan, mengurangi ketergantungan pada utang, dan menciptakan fondasi ekonomi yang lebih mandiri, tangguh, dan berkeadilan. Reformasi pajak yang berhasil akan menjadi salah satu pilar utama dalam membangun negara yang mampu membiayai cita-cita pembangunannya secara berkelanjutan dan inklusif.

Dengan demikian, pembiayaan pembangunan bukan sekadar persoalan ketersediaan dana semata, melainkan lebih pada bagaimana sumber daya keuangan tersebut dikelola secara adil, efisien, dan bertanggung jawab. Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada integrasi yang harmonis antara berbagai sumber pembiayaan, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), investasi swasta, pinjaman internasional, hingga peran aktif sektor keuangan domestik.

Pengelolaan pembiayaan yang terkoordinasi dalam kerangka kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan menjadi kunci utama agar setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan dampak optimal bagi masyarakat luas. Pendekatan ini menuntut transparansi, akuntabilitas, serta inovasi dalam merancang instrumen dan mekanisme pembiayaan yang mampu menjawab tantangan pembangunan yang terus berkembang.

Dengan strategi yang tepat dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, pembangunan Indonesia dapat melangkah mantap menuju visi jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial dan daya saing yang berkelanjutan. Sebuah Indonesia yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing global bukan lagi sekadar cita-cita, melainkan tujuan nyata yang dapat dicapai melalui pembiayaan pembangunan yang cerdas dan bertanggung jawab.

BAB 9

EVALUASI DAN MONITORING PEMBANGUNAN

Evaluasi dan monitoring pembangunan merupakan komponen esensial dalam siklus kebijakan publik yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap program dan proyek pembangunan tidak hanya berjalan sesuai dengan rencana, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat luas. Proses ini sekaligus menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terjaga dan diperkuat.

Menurut Kusek dan Rist (2004), sistem monitoring dan evaluasi (MONEV) yang efektif tidak hanya sekadar mengukur capaian hasil secara kuantitatif, tetapi juga mendorong pembelajaran sistematis serta perbaikan berkelanjutan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, MONEV berperan sebagai mekanisme umpan balik yang kritis, membantu pembuat kebijakan dan pelaksana proyek untuk mengidentifikasi tantangan, memperbaiki strategi, dan menyesuaikan tindakan secara responsif.

Penerapan sistem evaluasi dan monitoring yang komprehensif ini menjadi pondasi penting dalam memastikan bahwa pembangunan berjalan secara efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada pencapaian tujuan jangka panjang. Lebih jauh lagi, melalui pendekatan ini, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama

menciptakan siklus pembelajaran yang dinamis dan adaptif, sehingga pembangunan nasional tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga transformasi sosial-ekonomi yang nyata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Evaluasi dan monitoring semakin menjadi kebutuhan yang krusial di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat akan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya publik. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai fondasi penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan mampu memberikan hasil yang optimal dan tepat sasaran.

Lebih dari itu, evaluasi dan monitoring menyediakan landasan bagi pengambilan keputusan yang berbasis data (*evidence-based policy*), sehingga kebijakan publik dapat dirumuskan dan diimplementasikan dengan dukungan fakta yang valid dan analisis yang komprehensif. Dengan demikian, pemerintah dapat merespons dinamika dan kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan tepat, sekaligus meminimalkan risiko kegagalan program.

Dalam konteks ini, sistem evaluasi dan monitoring yang kuat menjadi pilar utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif sebuah prasyarat penting bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

A. Tujuan dan Indikator Evaluasi

Evaluasi pembangunan memiliki tujuan utama untuk menilai berbagai aspek penting dari suatu intervensi atau program, termasuk relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan, sebagaimana dijelaskan oleh OECD-DAC (2010). Dengan pendekatan yang sistematis dan metodologis,

evaluasi memungkinkan pemerintah untuk memahami sejauh mana tujuan pembangunan telah tercapai secara konkret.

Lebih dari sekadar pengukuran hasil, evaluasi juga berperan dalam mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang mungkin menghambat keberhasilan program. Temuan evaluasi menjadi dasar yang sangat penting dalam merumuskan rekomendasi strategis guna memperbaiki dan mengoptimalkan pelaksanaan program di masa mendatang. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menjadi alat akuntabilitas, tetapi juga mekanisme pembelajaran yang mendorong peningkatan kualitas pembangunan secara berkelanjutan.

Salah satu aspek krusial dalam evaluasi pembangunan adalah penggunaan indikator kinerja yang terstruktur dan terukur. Indikator ini biasanya dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu indikator *input*, *output*, *outcome*, dan *impact*, yang secara bersama-sama memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses dan hasil suatu program.

Menurut Hatry (2006), penerapan indikator yang jelas dan dapat diukur secara objektif merupakan prasyarat mutlak agar evaluasi dapat menghasilkan penilaian yang akurat dan dapat dipercaya mengenai kinerja suatu intervensi. Dengan indikator yang tepat, evaluasi mampu mengungkap tidak hanya seberapa banyak sumber daya yang digunakan (*input*) atau berapa banyak hasil yang dicapai (*output*), tetapi juga dampak nyata terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang diharapkan (*outcome* dan *impact*).

Sebagai contoh konkret, dalam program pengentasan kemiskinan, indikator *outcome* dapat berupa penurunan angka kemiskinan absolut sebuah ukuran langsung dari hasil program dalam jangka menengah. Sementara itu, indikator *impact* mengacu pada perubahan jangka panjang yang lebih

luas, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, yang mencerminkan keberhasilan transformasi sosial dan ekonomi yang lebih mendalam.

Penggunaan indikator yang sistematis dan komprehensif ini memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi yang tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga relevan secara sosial, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan dan strategi pembangunan yang lebih efektif di masa depan.

B. Sistem Monitoring dan Evaluasi (MONEV)

Monitoring dan evaluasi (MONEV) harus dilaksanakan secara berkesinambungan, berbasis data yang valid, dan terintegrasi secara menyeluruh dalam sistem perencanaan pembangunan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan dapat dipantau secara real-time, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

Di Indonesia, pelaksanaan MONEV telah diatur secara jelas dalam kerangka sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lebih lanjut, penguatan implementasi MONEV didukung oleh Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang menekankan pentingnya integrasi dan standarisasi data sebagai fondasi dalam pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Dengan landasan hukum dan sistem data yang kuat, Indonesia dapat mengoptimalkan peran monitoring dan evaluasi sebagai instrumen vital dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan tidak hanya

terlaksana dengan baik, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Menurut Kementerian PPN/Bappenas (2021), efektivitas sistem monitoring dan evaluasi (MONEV) sangat bergantung pada empat pilar utama, yakni kejelasan metodologi, keandalan data, kapasitas kelembagaan, serta partisipasi aktif pemangku kepentingan. Pilar-pilar ini membentuk fondasi yang kokoh agar proses MONEV tidak sekadar menjadi rutinitas administratif, tetapi benar-benar memberikan nilai tambah dalam perbaikan kebijakan dan implementasi pembangunan.

Keberhasilan monitoring tidak hanya diukur dari banyaknya data yang terkumpul, melainkan lebih pada bagaimana data tersebut diolah, dianalisis, dan dimanfaatkan secara strategis untuk memperbaiki perencanaan dan pengambilan keputusan di masa depan. Sebagaimana ditegaskan oleh World Bank (2005), data yang terkelola dengan baik dapat menjadi sumber kekuatan utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan memperkuat keempat pilar ini, sistem MONEV di Indonesia dapat bertransformasi menjadi instrumen dinamis yang mampu mendorong pembelajaran berkelanjutan dan inovasi kebijakan, sehingga pembangunan nasional dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Penerapan teknologi digital, seperti dashboard kinerja dan aplikasi e-monitoring, semakin memperkuat transparansi serta memungkinkan pengawasan secara real-time terhadap pelaksanaan program pembangunan. Inovasi ini tidak hanya mempermudah akses dan analisis data, tetapi juga meningkatkan responsivitas pemerintah dalam menyesuaikan

kebijakan dan tindakan berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.

Di sisi lain, pendekatan monitoring dan evaluasi yang partisipatif yang melibatkan masyarakat sipil secara aktif menjadi elemen penting dalam memperkuat akuntabilitas sosial. Dengan melibatkan warga sebagai pengawas langsung, proses pembangunan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Estrella dan Gaventa (1998) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam MONEV tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memastikan bahwa hasil pembangunan benar-benar mencerminkan kepentingan publik secara luas.

Kombinasi antara kemajuan teknologi dan keterlibatan masyarakat ini menciptakan fondasi yang kokoh bagi tata kelola pembangunan yang inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan.

C. Studi Kasus: Evaluasi Program Nasional

Salah satu contoh evaluasi pembangunan yang komprehensif dapat dilihat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri). Program ini dirancang untuk mengurangi kemiskinan sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat desa melalui pendekatan yang partisipatif dan mekanisme desentralisasi dana.

Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program, PNPM-Mandiri tidak hanya meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya, tetapi juga memberdayakan komunitas lokal agar lebih mandiri dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Evaluasi yang sistematis terhadap program ini memberikan wawasan berharga mengenai

dampak nyata di lapangan serta pelajaran penting untuk pengembangan program pemberdayaan masyarakat yang lebih luas dan berkelanjutan.

Evaluasi independen yang dilakukan oleh World Bank (2012) mengungkapkan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) berhasil memberikan dampak signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di desa-desa penerima program, dengan penurunan mencapai lebih dari 4% dibandingkan dengan desa kontrol. Selain itu, program ini juga berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar yang vital, seperti pembangunan jalan desa, jembatan, dan penyediaan air bersih, yang secara langsung menunjang kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.

Yang tidak kalah penting adalah peningkatan partisipasi perempuan dalam musyawarah desa yang terjadi secara signifikan selama pelaksanaan program. Hal ini menandakan bahwa PNPM-Mandiri tidak hanya berkontribusi pada aspek ekonomi, tetapi juga berhasil mendorong inklusi sosial dan pemberdayaan gender, memperkuat fondasi masyarakat yang lebih adil dan berdaya.

Temuan evaluasi ini menjadi bukti bahwa pendekatan partisipatif dan desentralisasi dana yang diusung PNPM-Mandiri dapat menjadi model pembangunan yang efektif dan berkelanjutan, sekaligus menginspirasi program-program pemberdayaan masyarakat di masa depan.

Namun demikian, evaluasi juga mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih perlu menjadi perhatian, antara lain rendahnya kapasitas pengelola lokal dalam mengelola dan mengawasi program serta belum optimalnya integrasi PNPM-Mandiri dengan program pembangunan lainnya. Temuan ini menjadi pijakan penting bagi perumusan

dan pengembangan program lanjutan, yaitu Dana Desa, yang dirancang dengan pendekatan lebih sistematis dan terintegrasi dalam kerangka pembangunan nasional.

Melalui perbaikan kapasitas lokal dan sinergi yang lebih kuat antar program, Dana Desa diharapkan dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh, sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya demi mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembelajaran dari evaluasi PNPM-Mandiri menjadi landasan strategis untuk mewujudkan transformasi pembangunan desa yang lebih berdampak dan berkelanjutan.

Dengan demikian, evaluasi dan monitoring bukanlah sekadar kegiatan administratif belaka, melainkan merupakan alat strategis yang sangat vital dalam memperbaiki kebijakan serta meningkatkan kualitas pembangunan secara menyeluruh. Melalui penggunaan indikator yang tepat, sistem yang andal, serta partisipasi yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan, proses monitoring dan evaluasi (MONEV) dapat berfungsi sebagai penggerak utama yang mendorong pembangunan menuju arah yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Studi kasus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) memberikan gambaran jelas bahwa evaluasi yang sistematis dan komprehensif mampu menghasilkan pembelajaran kebijakan yang berharga. Pembelajaran tersebut menjadi pondasi penting dalam merancang dan mengimplementasikan program pembangunan masa depan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berdaya guna secara jangka panjang.

BAB 10

TANTANGAN DAN ARAH MASA DEPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan ekonomi di abad ke-21 menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan dinamis. Gelombang globalisasi yang tak terbendung, disrupsi teknologi yang bergerak sangat cepat, serta krisis multidimensi seperti pandemi global dan perubahan iklim, menuntut paradigma perencanaan pembangunan yang lebih adaptif, tangguh, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, menurut Rodrik (2011), pendekatan perencanaan pembangunan yang bersifat linier dan berjangka panjang saja tidak lagi memadai. Sebaliknya, perencanaan harus mampu beradaptasi secara fleksibel terhadap perubahan global yang cepat dan tidak terduga, sehingga mampu menjaga arah pembangunan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi berbagai ketidakpastian.

A. Globalisasi dan Disrupsi Teknologi

Globalisasi memang membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan dan investasi lintas batas yang semakin intensif. Namun, di sisi lain, proses ini juga membawa risiko signifikan berupa peningkatan ketimpangan sosial dan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang yang masih menghadapi keterbatasan struktural dan kelembagaan. Seperti ditegaskan oleh Stiglitz (2002), tanpa adanya tata kelola yang adil dan inklusif, globalisasi justru cenderung memperkuat posisi kelompok yang sudah

kuat dan memperlemah kelompok yang rentan, sehingga ketimpangan menjadi semakin melebar.

Kondisi ini menegaskan pentingnya upaya penguatan tata kelola dan kebijakan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keadilan sosial serta pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di sisi lain, kemajuan teknologi digital telah melahirkan revolusi industri baru yang secara fundamental mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Brynjolfsson dan McAfee (2014) menegaskan bahwa “otomatisasi dan kecerdasan buatan akan menggantikan banyak pekerjaan rutin, namun juga membuka peluang baru bagi mereka yang mampu beradaptasi dan menguasai keterampilan baru.”

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan di era digital ini harus proaktif dan visioner dengan mengantisipasi transformasi yang terjadi. Investasi strategis pada pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masa depan, pengembangan inovasi, serta pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang memadai menjadi kunci utama agar bangsa mampu menghadapi perubahan dengan tangguh dan meraih manfaat optimal dari kemajuan teknologi.

B. Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan

Isu keberlanjutan kini menjadi fokus utama dalam pembangunan modern yang menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta keterbatasan sumber daya alam yang semakin nyata. Kondisi ini menuntut pergeseran paradigma menuju ekonomi hijau sebuah model ekonomi yang menekankan rendahnya emisi

karbon, efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, serta inklusivitas sosial yang kuat.

Menurut UNEP (2011), “ekonomi hijau bukan hanya baik untuk lingkungan, tetapi juga memberikan peluang besar dalam menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi kemiskinan.” Dengan demikian, transisi menuju ekonomi hijau bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan strategis bagi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, sekaligus menjadi pendorong inovasi serta kesejahteraan masyarakat luas.

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor dalam pembangunan hijau berkat kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang melimpah. Pemanfaatan energi terbarukan, penerapan pertanian ramah lingkungan, serta pengembangan ekowisata berkelanjutan merupakan langkah strategis yang dapat menggerakkan transformasi menuju ekonomi rendah karbon dan berkelanjutan.

Bappenas (2020) menegaskan bahwa integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menjadi kunci penting dalam menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan komitmen yang kuat dan sinergi lintas sektor, Indonesia berpeluang besar tidak hanya menjaga warisan alamnya, tetapi juga menjadi contoh global dalam pembangunan hijau yang berkelanjutan dan berkeadilan.

C. Perencanaan Adaptif di Era Krisis dan Pandemi

Pandemi COVID-19 menjadi titik balik yang penting dalam perencanaan pembangunan, menyoroti urgensi akan sistem yang lebih tangguh, fleksibel, dan responsif terhadap krisis multidimensi. OECD (2020) mencatat bahwa “negara-negara dengan sistem perencanaan yang responsif dan berbasis data (*data-driven*) menunjukkan kemampuan pemulihan yang lebih cepat dari dampak ekonomi pandemi.”

Indonesia pun merespons tantangan ini dengan langkah-langkah strategis, termasuk realokasi anggaran untuk sektor-sektor kritis, penyaluran bantuan sosial tunai bagi kelompok rentan, serta pemberian insentif dan pembiayaan kepada UMKM melalui skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan pentingnya perencanaan pembangunan yang adaptif dan berbasis bukti, guna memastikan ketahanan ekonomi sekaligus menjaga kohesi sosial di tengah ketidakpastian global.

Mazzucato (2018) menekankan bahwa negara tidak cukup hanya berperan sebagai fasilitator pasar, tetapi harus tampil sebagai *pengarah misi* (*mission-oriented state*) yang proaktif dalam menggerakkan inovasi, memperkuat sistem kesehatan, dan membangun kemandirian ekonomi terutama di masa krisis. Pandangan ini relevan dengan kebutuhan zaman, di mana kompleksitas tantangan global menuntut kepemimpinan negara yang visioner dan berani mengambil peran strategis.

Ke depan, perencanaan pembangunan tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan statis. Ia harus diperkaya dengan skenario kontinjensi yang adaptif, sistem peringatan dini yang andal, serta mekanisme koordinasi lintas sektor yang terintegrasi dan responsif. Hanya dengan pendekatan

semacam ini, negara dapat memastikan keberlanjutan pembangunan dan ketangguhan menghadapi guncangan yang tak terduga, sekaligus menciptakan nilai publik yang sejati bagi seluruh warga.

D. Rekomendasi Strategis untuk Pembangunan Masa Depan

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, perencanaan pembangunan masa depan Indonesia harus mengusung strategi yang komprehensif, progresif, dan responsif terhadap dinamika global. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan sosial, ekologis, dan kelembagaan. Adapun beberapa arah strategis yang krusial antara lain:

1. Memperkuat Perencanaan Inklusif dan Adaptif

Dalam menghadapi era yang penuh ketidakpastian dan perubahan cepat, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan *dynamic planning* sebuah sistem perencanaan yang tidak kaku, namun lentur, responsif, dan berbasis pada data serta bukti empiris yang mutakhir. Perencanaan tidak lagi bisa disusun secara *top-down* dan linier, melainkan harus mampu menyesuaikan arah dan strategi seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berubah.

Di dalam kerangka ini, partisipasi multipihak menjadi krusial. Keterlibatan masyarakat sipil, pelaku usaha, akademisi, komunitas lokal, serta kelompok rentan bukan hanya meningkatkan legitimasi sosial dari kebijakan publik, tetapi juga memperkaya perspektif dan memperkuat kapasitas adaptasi. Perencanaan yang inklusif mampu menangkap kebutuhan riil di lapangan, mengurangi risiko kegagalan implementasi, serta mendorong tumbuhnya rasa kepemilikan (*sense of ownership*) dari para pemangku kepentingan.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan tidak hanya menjadi dokumen teknokratis, tetapi juga refleksi dari cita bersama akan masa depan yang adil, tangguh, dan berkelanjutan.

2. Mendorong Transformasi Digital yang Merata

Transformasi digital bukan sekadar tren teknologi, melainkan fondasi strategis bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. Di tengah revolusi industri 4.0 dan percepatan digitalisasi global, Indonesia harus menjadikan transformasi digital sebagai pilar utama pembangunan jangka panjang. Hal ini tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur digital seperti jaringan internet berkecepatan tinggi dan pusat data nasional tetapi juga transformasi kultural melalui peningkatan literasi digital dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di seluruh wilayah, khususnya di daerah tertinggal dan perdesaan.

Digitalisasi memiliki potensi besar untuk menjembatani ketimpangan geografis dan sosial. Dengan akses teknologi yang merata, pelaku usaha kecil dapat terhubung dengan pasar global, siswa di pelosok dapat menikmati pendidikan berkualitas, dan layanan publik dapat menjadi lebih cepat, transparan, dan responsif. Seperti dikemukakan oleh World Bank (2021), ekonomi digital yang inklusif dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja baru yang berbasis inovasi.

Namun demikian, agar digitalisasi tidak memperlebar kesenjangan, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan transformasi digital disertai dengan pendekatan keadilan distribusi memberi perhatian lebih kepada kelompok yang rentan tertinggal dalam arus perubahan. Hanya dengan itulah, transformasi digital akan benar-benar menjadi penggerak keadilan sosial dan pembangunan yang merata.

3. Mengarusutamakan Pembangunan Hijau dan Rendah Emisi

Tantangan perubahan iklim, degradasi ekosistem, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan telah menempatkan urgensi pembangunan hijau sebagai agenda utama abad ke-21. Dalam konteks ini, pembangunan hijau bukan sekadar pilihan moral, melainkan keniscayaan strategis untuk menjamin keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam seluruh kebijakan nasional harus dilakukan secara menyeluruh dan sistemik.

Langkah-langkah konkret seperti penetapan pajak karbon, penyediaan insentif fiskal bagi energi terbarukan, serta reformasi sistem perizinan lingkungan merupakan instrumen kunci untuk mendorong transisi menuju ekonomi rendah emisi. Kebijakan ini perlu dirancang tidak hanya untuk mengurangi jejak karbon, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem investasi hijau yang menarik, mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan, dan membangun ketahanan terhadap bencana iklim.

Menurut UNEP (2011), ekonomi hijau memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi ketimpangan tanpa harus mengorbankan kelestarian alam. Oleh karena itu, pengarusutamaan pembangunan rendah karbon perlu dipahami sebagai jalan menuju masa depan yang tidak hanya lebih bersih secara ekologis, tetapi juga lebih adil secara sosial dan tangguh secara ekonomi. Indonesia, dengan kekayaan hayati dan potensi energi terbarukannya, memiliki peluang besar untuk menjadi pionir dalam transformasi ini.

4. Menjamin Ketahanan Ekonomi melalui Diversifikasi

Ketahanan ekonomi suatu negara ditentukan oleh seberapa dalam dan luas struktur ekonominya mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan global yang tidak menentu. Ketergantungan berlebihan pada ekspor komoditas primer membuat perekonomian rentan terhadap volatilitas harga pasar dunia dan perubahan permintaan global. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi bukan hanya menjadi strategi pilihan, melainkan kebutuhan mendasar untuk membangun kemandirian ekonomi jangka panjang.

Diversifikasi perlu diarahkan pada pengembangan sektor-sektor bernilai tambah seperti industri manufaktur berteknologi tinggi, ekonomi digital, bioekonomi, dan ekonomi kreatif. Peningkatan nilai tambah melalui industrialisasi dan inovasi akan memperkuat fondasi ekonomi nasional, memperluas kapasitas ekspor, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Hausmann dan Rodrik (2003), keberhasilan diversifikasi sangat tergantung pada peran negara dalam mengidentifikasi peluang pertumbuhan baru dan menyediakan dukungan strategis melalui kebijakan industri yang selektif namun terbuka terhadap dinamika pasar. Dalam konteks Indonesia, mendorong integrasi rantai pasok domestik, memperkuat ekosistem UMKM, serta meningkatkan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia menjadi langkah kunci menuju transformasi ekonomi yang inklusif dan resilien.

Dengan memperluas basis produksi dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif, Indonesia dapat membangun sistem ekonomi yang tidak hanya lebih tangguh

terhadap guncangan, tetapi juga lebih berdaya saing dalam lanskap ekonomi global yang semakin kompleks.

5. Menata Ulang Model Pemerintahan Pembangunan

Dalam menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan masa depan, model pemerintahan harus mengalami transformasi fundamental yang menjawab kebutuhan efisiensi, transparansi, dan responsivitas. Reformasi birokrasi bukan sekadar perubahan administratif, melainkan upaya strategis untuk membangun institusi publik yang mampu bergerak cepat, bertanggung jawab, serta adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang.

Penguatan kapasitas kelembagaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi prasyarat utama agar perencanaan pembangunan dapat dirumuskan dengan presisi dan ketajaman analisis. Pendekatan pembangunan berbasis hasil (*result-based development planning*) menuntut tata kelola yang mampu menerjemahkan data dan evaluasi ke dalam kebijakan yang konkret, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Selain itu, integrasi teknologi informasi dan digitalisasi dalam proses birokrasi memberikan peluang besar untuk meningkatkan akuntabilitas, mempercepat pelayanan publik, dan membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. Tata kelola yang cerdas dan transparan bukan hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memperkuat daya saing nasional dalam menghadapi tantangan global.

Dengan model pemerintahan yang terorganisasi secara modern, inklusif, dan berorientasi hasil, Indonesia dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Jadi, masa depan pembangunan ekonomi tidak semata-mata menjadi milik negara yang kuat secara finansial, tetapi lebih kepada negara yang mampu beradaptasi, terus belajar, dan berinovasi dalam menghadapi dinamika global. Ketangguhan suatu negara tidak lagi hanya diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi dari kemampuannya membangun sistem yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Di tengah ketidakpastian yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, gejala geopolitik, dan disrupsi teknologi, pembangunan yang berorientasi pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi satu-satunya pilihan rasional dan visioner. Pendekatan ini tidak hanya menjawab tantangan hari ini, tetapi juga meletakkan pondasi kokoh bagi generasi mendatang.

Seperti yang ditekankan oleh Mazzucato (2018), “negara masa depan bukan hanya entitas yang merespons kegagalan pasar, tetapi juga aktor utama yang secara aktif membentuk dan menciptakan pasar yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.” Dalam semangat tersebut, Indonesia memiliki peluang historis untuk merancang ulang paradigma pembangunan nasional dari sekadar mengejar pertumbuhan, menjadi bangsa yang mengedepankan kesejahteraan bersama, kelestarian lingkungan, dan daya saing jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Ekonomi Lokal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bappenas. (2005). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas. (2020). *Kajian Pembangunan Ekonomi Hijau di Indonesia*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas. (2020). *RPJMN 2020–2024: Menuju Indonesia Maju*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas. (2020). *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: Konsep dan Praktik*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. New York: W. W. Norton & Company.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications.
- Cornwall, A. (2008). "Unpacking 'Participation': Models, Meanings and Practices." *Community Development Journal*, 43(3), 269–283.
- Darmawan, E., & Riyanto, B. (2021). "Peran Bank Pembangunan Daerah dalam Pembiayaan Infrastruktur Daerah." *Jurnal Ekonomi Daerah*, 7(2), 102–115.

- Edwards, M., & Hulme, D. (1996). *Beyond the Magic Bullet: NGO Performance and Accountability in the Post-Cold War World*. West Hartford: Kumarian Press.
- Estrella, M., & Gaventa, J. (1998). *Who Counts Reality? Participatory Monitoring and Evaluation: A Literature Review*. Brighton: IDS.
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell.
- Hatry, H. P. (2006). *Performance Measurement: Getting Results* (2nd ed.). Washington, DC: Urban Institute Press.
- Healey, P. (1997). *Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies*. Vancouver: UBC Press.
- Huda, R. (2020). "Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Pariwisata di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2), 157–169.
- Husna, N., Noor, I., & Rozikin, M. (2013). "Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah di Kabupaten Gresik." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(1), 188–193.
- Irawan, R. (2018). *Transformasi Desa: Studi Kasus Desa Ponggok*. Yogyakarta: Pustaka Desa.
- Kemendesa PDTT. (2021). *Profil Desa dan Kawasan Perdesaan*. Jakarta: Kementerian Desa.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Nota Keuangan dan RAPBN 2023*. Jakarta: Kemenkeu.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Pedoman Umum Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Bappenas.
- Kusek, J. Z., & Rist, R. C. (2004). *Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System*. Washington, DC: World Bank.

- Kusumastuti, R. D., & Mulyani, S. (2021). “Implementasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat di Sumba Barat Daya.” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 22(1), 35–46.
- Law No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
- Law No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mandosir, A. (2021). “Revitalisasi Ekowisata Kampung Yoboi: Antara Identitas Lokal dan Pariwisata Berbasis Masyarakat.” *Jurnal Pariwisata dan Lingkungan*, 5(2), 112–120.
- Marlina, L. (2022). “Pemberdayaan Perempuan dalam Usaha Tenun Tradisional di SBD.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 88–96.
- Mazzucato, M. (2018). *The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy*. London: Penguin.
- Moser, C. O. N. (1993). *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*. London: Routledge.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill.
- Nugroho, H. (2020). “Inovasi dan Kepemimpinan Lokal dalam Penguatan Ekonomi Desa: Kasus Ponggok.” *Jurnal Tata Kelola Desa*, 3(1), 10–21.
- OECD. (2018). *Making Blended Finance Work for the Sustainable Development Goals*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2020). *Better Policies for Better Lives: Strengthening Planning and Policy Making*.
- OECD. (2020). *COVID-19 and Resilient Public Investment in Times of Crisis*. Paris: OECD Publishing.
- OECD-DAC. (2010). *Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management*. Paris: OECD.
- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: Free Press.

- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). "Creating Shared Value." *Harvard Business Review*, 89(1/2), 62–77.
- Rodrik, D. (2011). *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*. New York: W. W. Norton & Company.
- Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. New York: Columbia University Press.
- Stiglitz, J. E. (2000). *Globalization and Its Discontents*. New York: W.W. Norton & Company.
- Suyatno & Suryani, D. A. (2022). "Pengembangan Potensi UMKM Berbasis Lokal dalam Mendorong Perekonomian di Desa Girikerto Sleman." *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*, 9(2), 108–118.
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Harlow: Pearson Education.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- UNDP. (2021). *Indonesia's Sustainable Development Goals (SDG) Roadmap and the RPJMN 2020–2024*. New York: United Nations Development Programme.
- UNDP. (2022). *Inclusive Governance and Participatory Planning in Asia-Pacific*.
- UNEP. (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. Nairobi: United Nations Environment Programme.
- World Bank. (2005). *Monitoring and Evaluation: Some Tools, Methods, and Approaches*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2012). *PNPM Generasi Impact Evaluation Report*. Jakarta: World Bank.

BIODATA PENULIS



Fatimatuazzahro., S.H.I., M.SEI.

Dosen Program studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Lahir di Surabaya, 26 Agustus 1995, Lulus Sekolah Dasar di SDN 1 Curah-Tulis Tongas Probolinggo tahun 2006, Lulus SMPN 1 Tongas Probolinggo tahun 2009, Lulus SMKN 1 Grati Pasuruan tahun 2012, Lulus S1 Program Studi Hukum ekonomi Syariah Tahun 2016 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Lulus S2 di Program Studi Magister Sains Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga tahun 2019. Saat ini adalah Dosen tetap Program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Ditugaskan menjadi Unit Kendali mutu Program Studi Ekonomi syariah pada Gugus Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saat ini Menjadi editor International Journal of Islamic Boarding School di LP2M UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Zahro (panggilan akrabnya) sudah memiliki karya diantaranya adalah Buku BUNGA RAMPAI MANAJEMEN

BISNIS SYARIAH (CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2022), buku Modul Mata Kuliah Ekonomi Pembangunan (UIN KHAS Press, 2022), buku ADMINISTRASI LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN NON-BANK (Diva Press, 2024)

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=1rgIGHgAAAAJ

BIODATA PENULIS



Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.

Dosen FEBI dan Wakil 3 Bidang Kemahasiswaan
UIN KHAS Jember di FEBI

Lahir 12 Maret 1974 di Situbondo, setamat Sekolah Dasar di Gunung Malang 1 Suboh, menempuh pendidikan SMP Suboh, SMA Negeri 1 Suboh dan S1 Program Pendidikan Sejarah nya ditempuh di Universitas Jember. Tahun 1998 menempuh Kursus Bahasa Inggris di Pare Kediri, tahun 1999 mulai mengajar di MAN I Situbondo di Demung, tahun 2001 mulai mengajar di SM A Negeri 1 Suboh. Pernah menjadi Pimpinan Umum majalah Mahasiswa Pijar Pendidikan FKIP Universitas Jember. Pendidikan S2 Program Pascasarjana Konsentrasi Program Kebijakan Publik di Universitas Jember diselesaikan pada tahun 2007. Tahun 2008 mendirikan SMA Negeri 1 Besuki. Tahun 2013-2017 menjabat sebagai Kepala Seksi SMA di Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo. Tahun 2017-2018 menjabat sebagai Kepala Seksi SMA, SMK, PK-PLK di Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Situbondo. Selain itu tugas kesehariannya dosen *freelance* di beberapa universitas swasta. Dan pada tanggal 2 Februari 2019, pindah kepegawaiannya dari Provinsi Jawa Timur ke Kementerian Agama sebagai Tenaga Pengajar di UIN KHAS

Jember di FEBI, kuliah S3 di FISIP Universitas Jember dengan beasiswa 5000 Doktor Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan menjadi lulusan tercepat di program Doktor FISIP Unej. Saat ini diberi tugas untuk menjadi Wakil 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FEBI UIN KHAS jember.

Pria murah senyum ini adalah putra pertama dari tiga bersaudara, pasangan KH. Misbahul Munir dan Hj. Hamidatus Salamah (alm). Sampai saat ini ia telah menulis 22 judul buku, antara lain: Buku Besuki Menyapa Dunia (Diva Press, 2025), Buku Harmoni Kehidupan (Gemilang Press Indonesia, 2025), Buku Jalan Hidup Menemukan Makna di Setiap Persimpangan (Gemilang Press Indonesia, 2025), Buku TEGUH DALAM BADAI, WASPADA DALAM TENANG: Prinsip Ketahanan, Kepemimpinan, dan Pengabdian (Pustaka Ilmu, 2025), Buku Pasar Langit, Potret Ekonomi Mekkah Madinah dalam Pusaran Ibadah (Istana Agency, 2025) Buku Growth Mindset (Diva Press, 2025), Buku Krisis Minat Belajar Mahasiswa: Analisis Psikologis dan Sosiologis (Pustaka Ilmu, 2025), Buku Ekonomi Makro Modern: Tantangan dan Peluang (Istana Agency, 2025), Buku Sistem Informasi Manajemen Perspektif Islam ((Diva Press, 2024), buku Administrasi Lembaga Bank dan Non Bank (Diva Press, 2024), buku Sistem Pengendalian Manajemen (Indigo Media, 2024), buku Birokrasi dan Publik Governance (Istana Agency, 2024), buku Strategies Success In Life (Diva Press, 2024), buku Perilaku Organisasi (UIN KHAS PRESS, 2023), buku Etika Bisnis & Profesi (Indigo Media, 2023) di Jakarta, buku Motivasi Ibuku Tangguh di antara Aku dan Tuhanku (Istana Agency, 2023), Buku Prophetic Governance (UIN KHAS PRESS, 2022), Manajemen Sumber Daya Insani Ala Pesantren (ASWAJA PRESSINDO Yogyakarta, 2021), Sistem Informasi Manajemen (Bildung Yogyakarta, 2020). Buku MANAJEMEN PEMASARAN SYARIAH Sebuah Pengantar (Bildung

Yogyakarta, 2019). Buku Model Pembelajaran dalam Berbagai Pendekatan (LP3DI Press, 2019). Dan, juga menjadi editor beberapa buku karya dosen FEBI UIN KHAS dan Dosen Perguruan Tinggi Lain.

https://scholar.google.com/citations?user=BE_hhcAAA_AAJ&hl=id